

SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan



**Maket Gedung Kebangkitan Nasional Bagian Dalam
Keadaan Tahun 1908**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997**

SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan

Tim Penyusun terdiri dari :

Ketua : Drs. Sudiyo
Sekretaris : Dalimun Santono, BA
Anggota : Drs. Agus Nugroho
Drs. Edy Suwardi

Cetakan Pertama Tahun 1995

Cetakan Kedua Tahun 1997

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
1997 /1998**

KATA PENGANTAR

Berhubung cetakan pertama telah habis, maka buku ini mengalami cetak ulang yang kedua kalinya. Dari hasil yang diperoleh, berupa masukan dari para pembaca ternyata buku ini mendapat sambutan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya permintaan dari berbagai pihak, antara lain para pendidik, peneliti, maupun mahasiswa, yang terus menerus ditujukan kepada museum.

Dengan banyaknya permintaan itu, maka persediaan yang ada di museum telah habis dibagi-bagikan kepada para pengunjung, baik pengunjung pameran tetap maupun pengunjung pameran temporer. Pada prinsipnya dalam cetak ulang ini tidak ada perubahan yang berarti, karena hanya pembetulan salah cetak dan perbaikan kalimat seperlunya saja, sehingga memudahkan para pembaca dalam mencerna dan memahami arti serta isi yang termuat dalam buku ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, kepada para pembaca yang budiman atas masukan yang telah diberikan dan tulisan ini tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan di sana-sini, dengan demikian kami tetap mengharapkan kritikan yang membangun demi sempurnanya buku ini. Akhirulkalam, semoga buku ini ada manfaatnya.

Jakarta, Agustus 1997

Kepala Museum Kebangkitan Nasional,

ttd.

Drs. S u d i y o

Nip. 470 031 816

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
BAB I : SEKILAS PERJUANGAN SEBELUM PERGERAKAN NASIONAL	5
A. Perjuangan Bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan	5
B. Perjuangan RA. Kartini menuju cita-cita nasional	11
C. Faktor-faktor Timbulnya Pergerakan Nasional	14
D. Pengertian Pergerakan Nasional	16
BAB II : ORGANISASI-ORGANISASI AWAL PERGERAKAN NASIONAL	20
A. Perkumpulan Budi Utomo	21
B. Indische Vereniging	24
C. Sarekat Dagang Islam	28
D. Indische Partij	36
E. Perguruan Muhammadiyah	42
BAB III : MASA PERGERAKAN NASIONAL MENCAPAI KEMERDEKAAN	46
A. Perjuangan Pemuda	46
B. Perjuangan Wanita	55
C. Peranan Pendidikan	62
D. Peranan Organisasi Politik	71
E. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	91
BAB IV : MASA PERGERAKAN NASIONAL MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN	118
A. Perjuangan Diplomasi	118

B. Perjuangan Bersenjata	122
C. Pengakuan Kedaulatan	130
D. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN	134

PENDAHULUAN

Banyak para sejarawan membuat definisi sejarah menurut pandangannya masing-masing. Di dalam *"New American Encyclopedia"* menyebutkan sejarah menurut pengertian sempit adalah meliputi kegiatan-kegiatan manusia, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam relasi kronologis antara yang satu dengan yang lain.

Sedangkan di dalam *"Websteris American Dictionary"* menyebutkan bahwa sejarah merupakan laporan lengkap tentang peristiwa yang lalu, baik dari suatu bangsa atau negara, dengan ulangan tafsiran dan keterangan yang membedakannya dari sekedar tarih dan catatan rentetan kejadian-kejadian.

Kemudian oleh **Drs. Sidi Gazalba** dalam bukunya yang berjudul **"Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu"** mengatakan sebagai berikut : "Sejarah adalah gambaran masa lampau tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberikan pengertian tentang apa yang berlalu itu".

Dan oleh **Prof. Dr. Roeslan Abdulgani** dalam bukunya **"Penggunaan Ilmu Sejarah"** mendefinisikan sejarah sebagai berikut : "Yang dimaksud ilmu sejarah ialah salah satu cabang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menghimpun kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah - progres masa depan".

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan pengetahuan masa lampau yang obyek utamanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sedang hasil kegiatannya dapat dihimpun sebagai fakta yang kemudian diberi arti atau tafsiran agar jelas dan disusun secara berurutan menurut waktu (kronologis). Jadi lebih singkatnya, bahwa sejarah adalah suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang dilakukan manusia pada masa lampau yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Apabila kita tinjau dalam pengertian sejarah secara singkat maka sejarah mengandung tiga pengertian yaitu :

- **Sejarah sebagai kisah**, artinya dapat diketahui asal-usul manusia sebagai pelaku sejarah itu.
- **Sejarah sebagai peristiwa**, artinya dapat diketahui tentang kejadian-kejadian masa lampau mengenai apa saja yang telah diperbuat oleh manusia.
- **Sejarah sebagai ilmu**, artinya bahwa apa yang dimuat dalam penyusunan sejarah itu dapat dipercaya kebenarannya. Karena sejarah disusun dengan menggunakan metode tertentu. Dari sejak menghimpun data, menganalisa data, menafsirkan peristiwa kejadian berdasarkan sumber data, dan terakhir adalah penyusunan peristiwa sejarah secara kronologis.

Dengan demikian kita dapat belajar dari sejarah. Dalam pengertian kita harus mampu memanfaatkan sejarah itu, yang meliputi **tiga dimensi**, yaitu dimensi **masa lampau** yang positif digunakan untuk kepentingan **masa sekarang** (kini) dan kemudian untuk merancang kehidupan **di masa yang akan datang**. Itulah antara lain guna sejarah. Sedangkan guna sejarah yang lainnya masih cukup banyak, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengenal identitas (jati diri) bangsa;
2. Untuk kebanggaan nasional;
3. Untuk memudahkan pengenalan dengan bangsa lain;
4. Untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Untuk menanamkan cinta tanah air, rasa nasionalisme dan patriotisme;
6. Untuk bahan studi, dll.

Namun demikian kesemuanya itu, hanya dapat dinikmati dan dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah merdeka. Bagi bangsa yang masih hidup dalam alam penjajahan, tidak mungkin dapat merasakan

hal-hal seperti tersebut di atas. Apalagi untuk merancang kehidupan di masa yang akan datang. Hal itu sangat tidak mungkin. Karena bagi bangsa yang masih hidup dalam alam penjajahan, tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Sehingga kehidupan bagi bangsa yang terjajah, ditentukan oleh bangsa yang menjajah.

Sebenarnya bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan yang cukup lama, apabila kita menengok ke belakang sebelum masuk jaman penjajahan. Pada masa kerajaan **Sriwijaya** dan **Majapahit** bangsa Indonesia telah hidup dalam alam kemerdekaan. Dan dua kerajaan itu pantas kita jadikan kebanggaan nasional, karena keduanya pernah menguasai di bumi Nusantara ini cukup lama. Kerajaan Sriwijaya mampu bertahan kurang lebih 7 (tujuh) abad lamanya, sedangkan kerajaan Majapahit mampu bertahan kurang lebih 3 (tiga) abad lamanya. Kemudian untuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia** ini sampai saat sekarang (tahun 1997) baru berusia 1/2 (setengah) abad. Jadi masih jauh lebih muda dibandingkan dengan masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Namun apabila bangsa Indonesia tetap dapat membina persatuan dan kesatuan, niscaya bangsa Indonesia yang telah memperoleh **kemerdekaan kembali** itu dapat menyamai prestasi kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit tersebut, bahkan dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selama-lamanya.

Tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan telah mengalami pasang surut. Bangsa Indonesia masuk dalam alam penjajahan, yaitu mulai abad ke-17. Dengan dimulainya sistem monopoli perdagangan rempah-rempah oleh bangsa Belanda, melalui **Kongsi Perdagangan Belanda di Hindia Timur** atau disebut *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang berdiri tahun 1602, maka sejak itulah bangsa Indonesia mulai masuk jaman penjajahan. Untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah ternyata sangat sulit. Perjuangan yang hanya mengandalkan kekuatan bersenjata tradisional, ternyata tidak mampu mengusir penjajah dari bumi tanah air Indonesia. Perjuangan semacam ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak melawan VOC sampai awal abad ke-20, yaitu melawan pemerintah Hindia Belanda. Bangsa Indonesia selalu mengalami kekalahan. Adapun kekalahan tersebut rupanya disebabkan oleh berbagai masalah, antara

lain ialah :

1. Belum adanya persatuan dan kesatuan;
2. Sifat perjuangannya masih kedaerahan (parsial);
3. Tujuannya masih berkisar wilayah kekuasaan raja atau penguasa setempat (nasional sempit);
4. Belum ada organisasi perjuangan yang bersifat nasional;
5. Masih mengandalkan kekuatan fisik (senjata), dll.

Sadar terhadap kekalahan yang terus menerus itu, maka bangsa Indonesia mulai merubah taktik perjuangannya. Yang pada mulanya hanya mengandalkan **kekuatan otot** (senjata), kemudian menggunakan **kekuatan otak** (pikiran). Sehingga perjuangan bangsa Indonesia sesudah awal abad ke-20, mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Sifat perjuangannya sudah bersifat nasional;
3. Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangan rakyat;
4. Sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional;
5. Mengandalkan kekuatan otak (pikiran), di mana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dll.

Dengan taktik perjuangan semacam itu, maka bangsa Indonesia berhasil membebaskan diri dari penjajahan. Namun pada saat-saat tertentu perjuangan bangsa Indonesia, juga harus memadukan antara dua kekuatan tersebut, yaitu sejak bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan (1945 - 1949). Taktik yang dipakai adalah **Perjuangan Diplomasi** dan juga **Perjuangan Bersenjata**. Dengan menggunakan perpaduan dua jenis perjuangan tersebut, sehingga bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dan akhirnya memperoleh kedaulatan kembali, kemudian kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB I

SEKILAS PERJUANGAN SEBELUM PERGERAKAN NASIONAL

A. Perjuangan Bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan

Bangsa Indonesia masuk ke dalam alam penjajahan sejak awal abad ke-17. Kedatangan bangsa Eropa yang diawali oleh bangsa **Portugis** dan **Spanyol** dalam rangka mengadakan penjelajahan keliling dunia, maka sampailah bangsa-bangsa tersebut di Asia. Dengan diketemukan **kompas, pembuatan kapal** dan berdasarkan **teori Copernicus** tentang **peta bumi** bahwa bumi ini bulat, maka dimulailah penjelajahan dunia. Dari kedua bangsa itu, pertama kali muncul adanya **Imperialisme Kuno**. Mereka bersemboyan **Gold** (emas lambang kekayaan), **Gospel** (agama sebagai usaha untuk penyebaran agama dan meneruskan perang Salib), dan **Glory** (kejayaan yang berarti ingin menguasai daerah-daerah yang didatanginya). Hal tersebut terjadi sejak abad ke-15 dan ke-16.

Antara Portugis dan Spanyol telah terjadi suatu keterikatan **Perjanjian Tordesilas** pada tahun 1493. Perjanjian itu menetapkan bahwa dunia dibagi dua bagian. Sebagian milik Portugis dan sebagian lagi milik Spanyol. Jadi tidak menganggap bahwa di samping mereka berdua itu, masih ada negara-negara atau bangsa lain yang juga ingin berkuasa di dunia ini. Mereka menganggap dirinya bangsa yang besar, dan tidak mungkin lagi ada bangsa lain yang dapat menyamai dirinya. Hal ini tampak dalam cara mereka mengadakan perjanjian itu, dan dunia hanya dibagi menjadi dua.

Adapun bunyi perjanjian yang dibuatnya itu, antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. **Pulau Verdi** ke barat dimiliki Spanyol, sedangkan Pulau Verdi ke Timur dimiliki Portugis;
2. Daerah-daerah di sebelah **Utara Chatulistiwa** menjadi milik Spanyol, sedangkan daerah-daerah di sebelah **Selatan Chatulistiwa** menjadi milik Portugis.

Dengan cara yang demikian itulah, maka dalam waktu yang relatif singkat, kedua bangsa itu telah berhasil memainkan peranannya,

sehingga dapat menentukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah di pasaran dunia.

Sejak Portugis dapat merebut Malaka pada tahun 1511, terus bergerak untuk menguasai daerah rempah-rempah di Maluku. Antara tahun 1512 - 1570 hubungan persahabatan bangsa Portugis dengan orang-orang Maluku Utara (Ternate dan Tidore) berjalan baik. Begitu pula hubungan bangsa Spanyol dengan orang-orang Maluku juga berjalan baik. Bangsa Spanyol sampai Maluku melalui Philippina, karena bangsa Spanyol sejak tahun 1521 telah berada di Philippina dan mendarat di Pulau Cebu. Di Pulau inilah **Magalhaes** terbunuh oleh penduduk asli. Dan bangsa Spanyol meneruskan usahanya untuk mencari sumber perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Di Maluku Utara bangsa Spanyol dapat menjalin hubungan persahabatan dengan **Uli Siwa** di Tidore, sedangkan bangsa Portugis menjalin persahabatan dengan **Uli Lima** di Ternate. **Uli** adalah semacam **ikatan suku** yang berperan sebagai **pemimpin**. Pada waktu itu di Maluku Utara, sedang terjadi perselisihan antar suku yang tergabung dalam Uli Siwa (Tidore) dan Uli Lima (Ternate). Tetapi pertentangan antar suku ini tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Karena pada saat bangsa Spanyol dan Portugis berusaha untuk mencampuri urusan perdagangan dan pemerintahan, maka rakyat Maluku Utara itu dapat bersatu untuk menghadapi bangsa Portugis maupun Spanyol itu. Tokoh yang terkenal dari Maluku Utara (Ternate), yaitu **Sultan Hairun** dan kemudian diteruskan oleh puteranya, yaitu **Sultan Baab Ullah**. Sejak pemerintahan Sultan Baab Ullah, sebenarnya kekuatan pasukan Portugis sudah lemah, namun sampai wafatnya Sultan Baab Ullah (1583), Portugis belum berhasil terusir dari Ternate. Sehingga perjuangannya diteruskan oleh **Sultan Said** (putera Sultan Baab Ullah yang memerintah sampai tahun 1606). Pada masa pemerintahan Sultan Said inilah, Portugis dan Spanyol dapat diusir dari Maluku Utara dan ditawarkan kapal untuk kembali ke Malaka. Namun ditolak oleh Portugis dan ternyata Portugis pindah ke Maluku Selatan, yaitu di Pulau Seram dan Spanyol kembali ke Philippina.

Di Maluku Selatan ternyata telah datang bangsa Belanda yang mempunyai tujuan yang sama dengan Portugis, yaitu untuk menguasai sumber rempah-rempah. Belanda dengan pasukan VOC-nya tiba di

Ambon pada tanggal 23 Pebruari 1605 dan langsung berhadapan dengan pasukan Portugis. Dalam pertempuran ini, ternyata Portugis mengalami kekalahan dan terusir sampai ke Timor bagian timur. Jadi jelas bahwa bangsa Portugis tidak pernah berhasil berkuasa di Indonesia.

Usaha Belanda selanjutnya adalah untuk menguasai daerah rempah-rempah di Maluku. Pada mulanya Belanda berhasil menjalin hubungan dengan Tidore untuk menghadapi Uli Lima pimpinan dari Ternate. Tetapi setelah Uli Siwa mengerti dan diperlakukan tidak adil oleh Kompeni, maka Uli Siwa pimpinan Tidore itu bangkit melawan. Apalagi setelah pihak Kompeni memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli rempah-rempah dan membasmi tanaman cengkih milik rakyat Maluku, maka perlawanan lebih hebat lagi. Dalam hal ini, terjadi hubungan baik antara Uli Lima di Ternate dengan Uli Siwa di Tidore. Namun Belanda mempunyai taktik baru dalam menghadapi perlawanan rakyat Maluku ini. Pihak Belanda melancarkan politik adu domba (*divide et impera*), yaitu politik memecah belah dan jajah, untuk menguasai wilayah.

Politik tersebut ternyata sangat ampuh, karena Belanda berhasil mengadakan pendekatan dengan pihak penguasa, sehingga penguasa yang terdiri dari Sultan Ternate dan Tidore itu bersedia hubungan baik dengan pihak Belanda. Hal ini terbukti dengan diizinkan Kompeni membangun "**Benteng Melayu**" di Ternate. Izin ini diberikan pada tanggal 26 Mei 1607 dan setelah itu pihak Belanda juga diperbolehkan mengadakan pembasmian tanaman cengkih yang ada di daerah kesultanan Ternate dan Tidore. Padahal tanaman tersebut sangat berguna bagi kehidupan rakyat Ternate dan Tidore. Sehingga rakyat di Ternate dan Tidore menderita dan tidak dapat berbuat banyak. Sebaliknya pihak Sultan menerima ganti rugi setiap tahun, dari perkebunan rempah-rempah milik Kompeni yang ditanam di tanah rakyat tersebut. Jadi sangat berbeda dengan para penguasa sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hairun, Sultan Baab Ullah, maupun Sultan Said, yang sangat gigih menentang bangsa Portugis dan Spanyol.

Demikian halnya keadaan di Maluku Selatan. Kalau di Maluku Utara, Belanda berhasil memecah belah persatuan antara penguasa

dengan rakyatnya, sedangkan di Maluku Selatan, Belanda berhasil mengadu-domba antara rakyat Banda dengan orang-orang yang didatangkan dari Jawa. Orang-orang Jawa tersebut dipekerjakan di perkebunan rempah-rempah milik Belanda. Padahal perkebunan itu berada di tanah rakyat Banda, yang berarti Belanda merampas tanah rakyat. Sedangkan orang-orang Jawa disuruh bekerja di atas tanah milik rakyat Banda itu. Sehingga tidak sedikit orang-orang Jawa yang dimusuhi oleh rakyat Banda. Tetapi bagi orang-orang Jawa yang taat dengan perintah Kompeni, mendapat perlindungan oleh Belanda. Sedangkan yang tidak taat, tetap disiksa secara menyedihkan. Jadi kedudukan orang-orang Jawa di Maluku sangat sulit.

Di lain pihak, bahwa perjuangan rakyat Banda lebih berani dan terarah. Karena mereka sadar bahwa sebab-sebab penderitaan itu diakibatkan oleh kehendak Belanda untuk menguasai tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan rempah-rempah milik Belanda. Sehingga sasaran perjuangannya ditujukan untuk mengusir Belanda dari Maluku. Melihat hal yang demikian itu, pihak Belanda pada tahun 1621 meningkatkan penindasannya terhadap rakyat Banda, yaitu dengan melakukan "**Pelayaran Hongi**" (*Hongitochten*). Pelayaran hongi ini dilakukan dengan cara mengadakan **ekspedisi militer**. Setiap ekspedisi militer, penduduk harus **mengayuh perahu (kora-kora)** yang bertujuan untuk membasmi tanaman cengkih dan pala yang ditanam rakyat di daerah kepulauan Maluku. Hal ini ditentang oleh rakyat Banda secara besar-besaran. Akibatnya Belanda mengadakan penangkapan terhadap rakyat Banda. Banyak rakyat Banda disiksa, dibunuh dan ada yang dibawa ke Batavia (Jakarta), untuk dijadikan budak belian. Kemudian daerah-daerah yang telah kosong dari rakyat Banda, diisi oleh orang-orang Jawa yang dipaksakan oleh Belanda. Dengan demikian sehingga Belanda dapat menguasai daerah rempah-rempah dan berkuasa di Maluku secara keseluruhan.

Perlu diketahui bahwa Belanda datang di Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan *Cornelius de Houtman* mendarat di Banten. Dibanding dengan Portugis, Belanda lebih pandai dalam melancarkan dan merebut kekuasaan daerah-daerah di Indonesia. Portugis sulit menaklukkan perlawanan rakyat, meskipun rakyat berjuang secara **parsial** atau **lokal**. Sebagai contoh, yaitu di daerah Maluku, Portugis

boleh dikatakan tidak pernah berhasil memperoleh kemenangan. Kemudian di Sunda Kelapa yang pada tahun 1527 masih menjadi kota pelabuhan kerajaan Pajajaran. Berhubung Portugis mendapat izin dari raja Pajajaran, sedangkan Fatahillah diberi tugas dari Sultan Demak, maka terjadilah pertempuran antara pasukan Portugis dengan pasukan Fatahillah di daerah Sunda Kelapa itu. Ternyata dalam pertempuran tersebut Portugis mengalami kekalahan total menghadapi pasukan Fatahillah. Hal ini ditandai dengan perubahan nama Sunda Kelapa menjadi "**Jayakarta**" (kemenangan sempurna) pada tanggal 22 Juni 1527 oleh Fatahillah.

Sedangkan Belanda dengan Kompeninya, sejak mendapat kesempatan dan izin oleh Sultan Banten, terus mendirikan loji yang akhirnya digunakan untuk kantor perdagangan dan pertahanan, sehingga mampu bersaing dengan pedagang-pedagang pribumi. Kelicikan Belanda ini, memang tidak diduga oleh Sultan Banten. Hal ini terbukti pada saat Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Anyokrokusumo mengadakan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, raja Banten belum mengadakan campur tangan. Karena antara Kompeni dengan Banten masih ada hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan. Sedangkan Sultan Agung dari Mataram pada masa itu, tidak ada hubungan sama sekali, bahkan Sultan Agung dalam usahanya menyatukan Pulau Jawa banyak mengadakan penyerangan raja-raja pesisir. Hal inilah yang mengakibatkan antara kerajaan Mataram dengan Banten tidak saling kerja sama. Sebaliknya Belanda lebih dekat dengan raja Banten, karena tampaknya raja Banten ada kekhawatiran terhadap serangan Sultan Agung. Meskipun raja Banten tidak memberikan bantuan kepada Belanda, namun hal ini tetap menguntungkan pihak Belanda. Karena Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menghadapi pasukan Sultan Agung. Sehingga penyerangan Sultan Agung dari Mataram dapat digagalkan dan banyak pasukan Sultan Agung mati terbunuh, serta korban penyakit malaria.

Selanjutnya Belanda terus memperluas kekuasaannya dan usaha dagangnya. Sistem monopoli perdagangan tampak berjalan dengan baik. Dengan sistem monopoli inilah, akibatnya kekuasaan raja Banten mulai terganggu. Namun Sultan Banten, yaitu Sultan Abdulmufakhir tidak dapat berbuat banyak, sehingga tidak berani melancarkan

perlawanan terhadap Belanda. Setelah digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah di Banten tahun 1651 - 1682 sadar atas haknya, maka perlawanan terhadap Belanda dilancarkan secara besar-besaran. Untuk mematahkan perlawanan ini Belanda menggunakan politik "*divide et impera*", yaitu dengan mengadu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan puteranya yang bernama Sultan Haji. Karena Sultan Haji menginginkan tahta kerajaan diserahkan kepadanya. Oleh karena itu Belanda memberikan bantuan kepada Sultan Haji untuk memerangi ayahnya. Akibatnya Sultan Ageng Tirtayasa terdesak dan dapat ditangkap kemudian ditawan sampai wafatnya tahun 1692. Sedangkan Sultan Haji naik tahta kerajaan Banten atas bantuan Belanda sejak tahun 1682. Dalam masa pemerintahan Sultan Haji, rakyat Banten tidak merasa senang dan banyak mengadakan perlawanan. Tidak saja ditujukan kepada Sultannya, melainkan ditujukan pula kepada Belanda. Dalam perlawanan ini, rakyat Banten dipimpin oleh Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Rakyat Banten sangat marah dan mengadakan perlawanan habis-habisan, sehingga keraton Banten dihancurkan daripada digunakan untuk kepentingan pihak musuh, yaitu Belanda. Dengan demikian berakhirilah riwayat kekuasaan raja Banten, karena Sultan Haji juga tidak dianggap sebagai rajanya.

Namun demikian untuk pihak penjajah Belanda tetap bertahan secara mantap di Batavia. Hal ini disebabkan karena sejak Belanda berhasil merebut kota pelabuhan Jayakarta dari tangan Pangeran Wijayakrama tahun 1619, Gubernur Jenderal Belanda *Jan Pieterszoon Coen* terus mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Dan kota Batavia ini terus dikembangkan menjadi pusat perdagangan yang terbesar di Asia Tenggara serta didukung oleh Angkatan Laut secara besar-besaran. Dari Batavia inilah VOC dapat mengawasi bandar-bandar dagang, dan benteng-bentengnya yang berada antara Afrika dan Jepang. Karena kedudukan Batavia dinilai sangat strategis untuk pengawasan maupun pertahanan. Hal ini ternyata benar dan terbukti sampai saat VOC bubar dan berganti pemerintahan Hindia Belanda. Batavia tetap efektif.

Peranan Batavia sebagai pusat perdagangan, pertahanan dan pemerintahan sejak VOC dan pemerintahan Hindia Belanda sangat besar. Hampir semua komando untuk memadamkan setiap perlawanan

rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda, dapat digerakkan dari Batavia. Seperti perlawanan rakyat di Maluku, Banten, Mataram, Makasar, yang terjadi pada abad ke-17 dan 18, dapat ditumpas. Kemudian juga perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Diponegoro di Jawa, Sisingamangaraja di Tapanuli, Teuku Umar, Cut Nyak Dien di Aceh, Antasari di Banjarmasin, Pattimura di Maluku, dan lain-lain yang berlangsung pada abad ke-19, kesemuanya dapat ditumpas dan komando penggerakannya datang dari Batavia. Kesemuanya itu merupakan perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, yang kesemuanya dimenangkan oleh pihak penjajah. Adapun sebabnya seperti yang sudah disebutkan di bagian depan, yaitu di bagian pendahuluan.

B. Perjuangan RA. Kartini menuju cita-cita nasional

Pada mulanya RA. Kartini sangat menyesalkan terhadap kehidupan kaum wanita yang sangat terikat oleh adat yang kolot yang selalu menjadi hambatan kuat untuk memajukan dirinya. Penyesalan ini dapat diketahui dengan jelas dalam surat-surat yang ditujukan kepada kawan dekatnya yang berada di negeri Belanda, yaitu **Ny. Van Kool** dan **Abendanon**. Surat-surat tersebut kemudian dapat dihimpun kembali menjadi sebuah buku yang isinya tentang surat-surat Kartini. Dalam surat itu ternyata RA. Kartini mempunyai cita-cita yang luhur dan telah menunjukkan cita-cita nasional. Tidak saja perjuangan untuk persamaan hak antara kaum wanita dengan kaum pria (**perjuangan emansipasi**), melainkan jauh daripada itu, yaitu perjuangan untuk berbangsa dan bernegara.

Tentang perasaan kebangsaan Kartini, dapat diketahui dari bukunya yang berjudul "*Door Duisternis tot Licht*", yang oleh Susanto Tirtoprodjo dijelaskan bahwa Ibu Kartini sudah memasukkan dalam angan-angannya "*national bewustzijn*" (kesadaran berbangsa).

Mengenai gerakan emansipasi yang dilakukan RA. Kartini, telah merintis jalan yang terang untuk membawa kaumnya dan perhatian bangsa Indonesia ke arah cita-cita nasional. Walaupun RA. Kartini belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan, namun dia tetap **optimis** bahwa cita-citanya akan dapat diteruskan oleh generasi berikutnya. Karena sadar bahwa untuk mencapai cita-citanya itu, masih cukup banyak rintangan dan hambatan yang sulit untuk dihindarkan.

Hanya melalui pendidikan dan pelajaran yang baik, maka kedudukan dan kebahagiaan kaum wanita dapat diperbaiki dan setarap dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini tampak dalam buku "**Habis Gelap Terbitlah Terang**", oleh Kartini terjemahan Armin Pane, yang berbunyi sebagai berikut :

"Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan didikan. Karena inilah yang akan membawa bahagia baginya". (Armin Pane 1968 : 112).

Kata-kata RA. Kartini tersebut di atas telah menunjukkan wawasan masa depan yang cerah bagi kaum wanita khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Kartini memang telah banyak mengungkapkan tentang cita-cita perjuangan yang jauh ke depan, namun sangat disayangkan bahwa cita-cita Kartini belum banyak dikenal oleh masyarakat pada masa itu. Jadi Kartini masih berjuang secara tertutup dan belum menggunakan suatu organisasi yang tersusun secara modern. Kartini masih berjuang secara individu, namun bertujuan secara nasional. Kehidupan organisasi pada masa itu, belum memungkinkan mengingat sangat ketatnya adat yang membatasi pergaulan antara kaum wanita dengan kaum pria. Di samping itu, masih sedikitnya kaum pelajar yang mendapat pendidikan sistem barat, sehingga belum muncul wawasan untuk mendirikan organisasi yang bersifat nasional.

Oleh karena itu, tulisan-tulisan Kartini tersebut sebenarnya telah membuka jalan ke arah berpikir yang lebih luas dan bersifat nasional. Pada tahun 1856, memang pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan "**Sekolah Dokter Jawa**", namun muridnya masih sangat terbatas dan hanya untuk orang-orang bangsawan. Dengan demikian tidak banyak yang berpikir untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Dokter-dokter lulusan Sekolah Dokter Jawa itu, sebagian besar hanya untuk membantu pihak pemerintah untuk membasmi penyakit menular yang pada masa itu masih sulit diberantas. Wabah penyakit pada waktu itu, sedang berkecamuk di daerah Purwokerto, Banyumas. Berhubung pihak pemerintah merasa kekurangan tenaga "juru kesehatan", maka dengan secara singkat mendidik para pemuda kaum bangsawan dalam bidang kedokteran. Tetapi meskipun namanya "**Dokter Jawa**", namun

kemampuannya hanya setingkat "**juru suntik**" saja. Itulah sebabnya, mengenai wawasan kebangsaan timbul. Apalagi mengenai organisasi pergerakan yang bersifat nasional, belum muncul sama sekali. Untuk menuju ke arah itu, masih harus melalui perjuangan yang cukup panjang dan banyak rintangan yang harus dilalui. Hal ini disadari RA. Kartini dan tampak seperti yang dituliskan oleh Nilakusuma dalam bukunya yang berjudul "**Wanita di dalam dan di luar Rumah Tangga**", berbunyi sebagai berikut :

"Saya tahu, jalan yang hendak saya tempuh itu, sukar. Banyak duri dan onaknya dan lubang batu berlekuk-lekuk, licin jalan itu belum dirintis. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati merasa bahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putera merdeka dan berdiri sendiri. Sudah senang benarlah hati saya, bila ibu-bapak gadis lainnya, yang hendak berdiri sendiri pula tiada lagi dapat mengatakan Belum ada seorang jua pun orang kita yang berbuat demikian". (Nilakusuma 1955 : 11).

Tampak dalam kata-kata tersebut di atas, bahwa Kartini telah menyadari apa yang akan diperjuangkan itu sangat berat dan sulit untuk dicapai pada saat dia masih hidup. Memang pada masa hidup Kartini, yaitu yang dilahirkan di Jepara, 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904, tampaknya sangat tidak mungkin untuk berhasil dan Kartini dapat menikmatinya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Masih sedikitnya orang-orang yang mendapat pendidikan sistem barat, sehingga wawasan nasional belum timbul;
2. Kehidupan adat yang masih sangat kolot, sehingga tidak memungkinkan adanya komunikasi antara kaum wanita dengan kaum pria di kalangan masyarakat secara terbuka;
3. Kehidupan yang masih sulit dihindari oleh kaum wanita untuk menolak kehendak orang tuanya, sehingga RA. Kartini dengan terpaksa harus berkeluarga dengan seorang pria yang bukan pilihannya sendiri.

Itulah yang menyebabkan Kartini, merasa berat dan menyadari secara ikhlas bahwa perjuangannya, hanya akan berhasil setelah generasi

berikutnya. Namun dia tetap optimis, bahwa cita-citanya akan dapat terwujud, walaupun dia telah tiada. Inilah keluhuran budi RA. Kartini, yang sampai saat ini dan seterusnya tidak dapat dilupakan. Rintisan cita-cita nasional telah dilakukan secara sadar dan penuh keyakinan.

C. Faktor-faktor Timbulnya Pergerakan Nasional

Munculnya pergerakan nasional di Indonesia, disebabkan oleh 2 (dua) faktor. Ada faktor dari dalam negeri (internal) dan faktor luar negeri (external). Tetapi faktor dari dalam negeri lebih menentukan, dibanding dengan faktor yang timbul dari luar negeri. Fungsi dan peranan faktor dari luar negeri hanya bersifat mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional. Hal ini berarti bahwa sebenarnya tanpa adanya faktor dari luar, pergerakan nasional juga akan muncul, hanya waktunya agak lambat. Di samping itu, bisa juga dalam bentuk lain.

Suatu keyakinan bahwa pergerakan nasional lebih ditentukan oleh faktor dari dalam negeri dan akan muncul dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar, karena ditandai dengan perjuangan bangsa Indonesia yang secara terus-menerus dilancarkan oleh rakyat Indonesia yang silih berganti. Belajar dari pengalaman bahwa perlawanan yang dilakukan secara lokal, ketergantungan dengan pemimpin yang masih bersifat feodal atau penguasa setempat, belum adanya persatuan dan kesatuan, dan lain-lain, maka perlawanan yang demikian itu tidak pernah berhasil, melainkan mudah ditumpas oleh pihak penjajah. Kesemuanya itu merupakan pengalaman yang berharga.

Oleh karena itu, perjuangan bangsa Indonesia harus menempuh cara lain. Adapun faktor-faktor yang timbul dari dalam negeri, untuk bergerak secara nasional, adalah sebagai berikut :

1. Adanya tekanan dan penderitaan yang terus menerus, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah;
2. Adanya rasa senasib-sepenanggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara;
3. Adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, karena kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri;
4. Dan lain-lain.

Faktor-faktor seperti tersebut di atas, sebenarnya sudah terkandung di dalam hati sanubari rakyat Indonesia dalam usahanya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah.

Namun mengingat kondisi yang belum memungkinkan, maka untuk bangkit secara nasional masih memerlukan waktu yang tepat. Dengan demikian, berhubung adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang sebagian besar datang dari luar negeri, sehingga pergerakan nasional timbul dengan cepat. Faktor-faktor luar negeri yang dapat mempercepat timbulnya pergerakan nasional itu, adalah sebagai berikut:

1. Adanya faham baru, yaitu **liberalisme** dan human rights, akibat dari Perang Kemerdekaan Amerika (1774 - 1783) dan Revolusi Perancis (1789);
2. Diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan **Politik Etis** (1902), yang menimbulkan wawasan secara luas bagi para pelajar Indonesia, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit;
3. Kemenangan perang Jepang terhadap Rusia tahun 1905, yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia - Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajah (bangsa berkulit putih);
4. Gerakan Turki Muda (1896 - 1918), yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki, sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat, dengan ikatan satu negara, satu bangsa, satu bahasa, ialah Turki;
5. Gerakan Pan-Islamisme, yang ditumbuhkan oleh Djamiluddin al-Afgani bertujuan mematahkan dan melenyapkan Imperialisme Barat untuk membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Gerakan ini menimbulkan nasionalisme di negara terjajah dan anti-imperialis;
6. Dan lain-lain, sepertinya gerakan Nasionalisme di India, Tiongkok dan Philippina.

Jadi jelas faktor dari dalam negeri (internal) lebih menentukan dan faktor dari luar negeri (external) hanya mempercepat proses. Bagi negara yang merdeka dengan pertumpahan darah melawan penjajah, jiwa nasionalismenya lebih mantap. Karena didorong oleh kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa. Hal ini sesuai dengan pendapat **Han Khon** dalam bukunya yang berjudul "**Nasionalisme Arti dan**

Sejarah", yang mengatakan sebagai berikut :

"Nasionalisme adalah suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (*nation state*)". (Han Khon terjemahan Sumantri Mertodipuro, 1984 : 11).

Nasionalisme merupakan salah satu kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern. Ia berasal dari Eropa Barat pada abad ke-18 dan selama abad ke-19 tersebar di seluruh Eropa. Kemudian pada abad ke-20, ia telah menjadi suatu pergerakan sedunia. Dalam tahun ke tahun semakin bertambah penting di Asia dan Afrika. Nasionalisme tidaklah sama disetiap negara dan setiap zaman. Ia merupakan peristiwa sejarah, yang ditentukan oleh ide-ide politik dan susunan masyarakat dari berbagai negara di mana ia berakar.

Di Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai pulau, yang dulu pernah disebut **Nusantara**, yaitu **negara kepulauan** atau juga disebut **negara bahari**. Oleh karena itu, untuk menyatukan negara kepulauan itu memang sulit. Apalagi terdapat berbagai jenis adat, budaya, suku dan agama. Namun berkat adanya saling pengertian, maka dapat **diintegrasikan** dalam satu ikatan **"Bhineka Tunggal Ika"** dan berdasarkan **"Pancasila"**. Dalam hal ini Pancasila sebagai alat pemersatu untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

D. Pengertian Pergerakan Nasional

Ditinjau dari istilah katanya **"pergerakan"** berasal dari kata dasar **"gerak"** (mendapat awalan **per** dan akhiran **an**, menjadi **per - gerak - an**). Di dalam bahasa Inggris **pergerakan** dapat diartikan **"movement"**. Kemudian istilah pergerakan ini digunakan dalam sejarah perjuangan bangsa, menjadi **"pergerakan nasional"** yang identik dengan **"kebangkitan nasional"**.

Sebenarnya kalau dilihat dari kamus bahasa Inggris **"Jhon M. Echols dan Hasan Shadily"** antara **"pergerakan"** dan **"kebangkitan"** ada perbedaan. Istilah **"pergerakan"** dalam bahasa Inggris **"movement"** dan **"kebangkitan"** dalam bahasa Inggris **"awakening"**. Jadi untuk Museum Kebangkitan Nasional dapat disebut dalam bahasa Inggris menjadi **"National Awakening Museum"** atau **"National Move-**

ment Museum". Tetapi karena museum itu nama, lebih baik tetap disebut dalam bahasa Indonesia, yaitu "**Museum Kebangkitan Nasional**".

Untuk menunjukkan sifat yang lebih aktif dan penuh menanggung resiko dalam perjuangan, maka banyak para pelaku sejarah menggunakan perkataan "**pergerakan nasional**" daripada "**kebangkitan nasional**". Walaupun sebenarnya hal itu sama saja tujuannya. Bahkan apabila ditinjau dari awal perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional, organisasi pergerakan nasional, pada waktu itu menggunakan istilah "**insulinde**" (negeri yang cantik molek **bangun** dari tidurnya). Oleh karena itu, digunakan perkataan "**kebangunan nasional**". Yang dimaksudkan dengan **negeri yang cantik molek** adalah **Indonesia (Hindia Belanda)** waktu itu). Karena masih dalam cengkeraman penjajah, maka dikatakan masih tidur. Setelah ada organisasi pergerakan nasional, maka dikatakan "**bangun dari tidurnya**". Jadi rakyatnya mulai berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kata-kata yang demikian itu dilontarkan oleh para pendiri "*Indische Partij*" yang berdiri di Bandung, Desember 1912. Tetapi organisasi ini tidak umur panjang, karena ketiga tokoh pendirinya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, E.F.E. Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat, tahun 1913 ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda.

Selanjutnya dalam penulisan ini, akan lebih banyak digunakan perkataan "**pergerakan nasional**" atau "**kebangkitan nasional**". Hal ini dimaksudkan, agar memudahkan cara mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang ditinjau berdasarkan "*Indonesia Centris*". Artinya penulisan sejarah yang ditinjau berdasarkan kepentingan (penglihatan = kaca mata), bangsa Indonesia sendiri.

Adapun pengertian **pergerakan nasional**, dapat ditinjau melalui pendekatan "*multidimensional*", yang berarti meliputi segala bidang, yaitu bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Namun diantara bidang-bidang tersebut yang paling menonjol adalah pergerakan nasional dalam bidang politik, karena penjajah menggunakan politik dalam segala bidang.

Untuk memudahkan dan memahami tentang sejarah kebangkitan nasional dalam rangka perjuangan mencapai Indonesia Merdeka, maka kebangkitan nasional di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode.

Namun pembagian ini tidak mengikat, karena tujuannya hanya untuk memudahkan penyusunan, memahami, dan mempelajari saja. Adapun tiga periode tersebut, sebagai berikut :

1. Perjuangan mencapai kemerdekaan (1900 - 1945) :

Diawali dengan adanya kesadaran nasional yang pernah dicetuskan oleh RA. Kartini, karena Kartini telah memasukkan angan-angannya "*national bewustzijn*" (kesadaran berbangsa). Oleh karena itu periode Kartini ini lebih tepat disebut "**Awal Kesadaran Nasional**". Sedangkan berdirinya Budi Utomo, dapat disebut "**Awal Pergerakan Nasional**". Karena Kartini masih bergerak secara individu, sedangkan Budi Utomo bergerak secara organisasi pergerakan nasional. Yang selanjutnya diikuti oleh organisasi lain yang bersifat nasional pula. Melalui pergerakan nasional inilah, akhirnya tercapai "**Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**" tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian Proklamasi itu disebut **puncak-puncak pergerakan nasional**;

2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan (1945 - 1950):

Proklamasi kemerdekaan yang telah dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu masih perlu dipertahankan. Karena sudah pasti pihak Belanda atau Sekutu akan datang ke Indonesia, mengingat Belanda maupun Sekutu merasa sebagai pemenang perang dalam Perang Dunia II. Mereka ini tidak mau mengakui perjuangan bangsa Indonesia, yang telah berhasil melawan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, kedatangan mereka harus kita sambut dengan penuh tanggung jawab, yaitu melalui **perjuangan fisik** maupun **perjuangan diplomasi**, sehingga **Kemerdekaan Indonesia** merupakan **merdeka penuh** mendapat pengakuan "**dunia internasional**". Dan ternyata pihak Sekutu (Inggris) datang di Indonesia dan Belanda membonceng dengan sekutu itu. Terjadilah Perang Kemerdekaan I dan II, yang diakhiri dengan **Konferensi Meja Bundar** (KMB) tanggal 2 November 1949 dan sebagai realisasinya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda melakukan **penyerahan kedaulatan**. Tetapi oleh bangsa Indonesia perkataan **penyerahan** itu diganti menjadi **pengakuan**, sehingga tidak ada

lagi perkataan dualisme antara RI dan RIS sejak tanggal 19 Mei 1950. Dan secara tepatnya pada saat peringatan "**Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-5**", tanggal 17 Agustus 1950, kita kembali ke "**Negara Kesatuan Republik Indonesia**".

3. Perjuangan mengisi Kemerdekaan (1950 - sekarang) :

Dengan kembalinya kita ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya bangsa Indonesia terus melakukan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Namun mengingat masih banyaknya kendala dan hambatan, terutama yang datang dari dalam, maka perjuangan untuk mengisi kemerdekaan itu belum dapat berjalan. Sebab syarat utama untuk dapat membangun adalah terciptanya "**stabilitas nasional**". Sedangkan pada saat itu, stabilitas nasional belum dapat diciptakan mengingat masih banyaknya rongrongan yang timbul dari golongan tertentu, yaitu dari **sayap kiri** (komunis) maupun **sayap kanan** (golongan agama yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia). Dengan memakan waktu yang cukup panjang, ternyata rongrongan itu akhirnya dapat terselesaikan dan sejak adanya pemerintahan **Orde Baru**, bangsa Indonesia baru dapat melaksanakan perjuangan mengisi kemerdekaan, melalui **pembangunan nasional di segala bidang**.

BAB II

ORGANISASI-ORGANISASI AWAL PERGERAKAN NASIONAL

Seperti yang telah dijelaskan di bagian depan, bahwa pergerakan nasional yaitu bersifat "*multidimensional*". Artinya meliputi di segala bidang, yaitu bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan demikian tidak satu organisasi saja yang mengawali perjuangan pergerakan nasional itu. Karena ternyata organisasi-organisasi yang mengawali pergerakan nasional mempunyai ciri dan menempuh bidang yang berbeda-beda. Tidak ada satu organisasi pergerakan nasional yang menempuh keempat bidang tersebut sekaligus, paling banyak hanya dua atau tiga bidang yang dilalui. Bahkan ada organisasi pergerakan nasional yang hanya berjuang melalui satu bidang, yaitu Indische Partij.

Tetapi sebelum kita berbicara mengenai ciri dan langkah-langkah perjuangan dalam setiap organisasi pergerakan nasional, terlebih dahulu kita ketahui tentang maksud dan tujuan dari pergerakan nasional itu. Untuk mengetahui maksud dan tujuan pergerakan nasional itu, kiranya dapat kita bandingkan dengan situasi di Amerika Serikat pada masa Perang Kemerdekaan Amerika (1774-1783) dengan situasi di Indonesia pada saat timbulnya perjuangan yang bersifat nasional (k.l. tahun 1900). Karena keadaan di kedua negara itu, mempunyai dasar dan tujuan negara yang sama, antara lain dikemukakan oleh **Prof. Ahmad Soebardjo** dalam bukunya yang berjudul "**Peranan Ide-Ide dan Gerakan Kemerdekaan Indonesia**", sebagai berikut :

"....melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan kebenaran dan keadilan. Rakyat Amerika memisahkan diri dari Inggris di bawah raja George III yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Amerika sebagai rakyat kolonial. Dasar tindakan rakyat Indonesia dan Amerika Serikat adalah sama yakni anti-kolonial, anti-penjajahan. Motivasi daripada tindakan itu adalah sama pula yakni demi kebenaran dan keadilan". (Soebardjo 1977:7).

Jadi inti pergerakan nasional adalah untuk menentukan nasib sendiri, maka cita-cita yang akan dicapai menjadi tanggung jawab bersama atas dasar senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, harus ada persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Untuk

mewujudkan persatuan dan kesatuan perlu adanya organisasi yang bersifat nasional. Sedangkan organisasi yang bersifat nasional, baru muncul setelah adanya golongan "**elit intelektual**", karena golongan ini memiliki wawasan yang luas, akibat penerapan pendidikan sistem barat terhadap pelajar Bumi Putera, pada masa **STOVIA** dan pelaksanaan **Politik Etis**. Oleh karena itu, setelah tahun 1900 barulah muncul berbagai organisasi pergerakan nasional, yang diawali oleh **Perkumpulan Budi Utomo** berdiri tanggal 20 Mei 1908.

Untuk mengetahui tentang langkah dan perjuangan organisasi-organisasi pergerakan nasional, dapat diikuti uraian di bawah ini.

A. Perkumpulan Budi Utomo

Perkumpulan ini didirikan oleh para pelajar STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) di bawah pimpinan R. Soetomo. Sebelum R. Soetomo dkk. mendirikan Perkumpulan Budi Utomo, terlebih dahulu terjadi pertemuan antara dr. Wahidin Sudirohusodo dengan R. Soetomo dan M. Soeradji pada akhir tahun 1907, di dalam gedung STOVIA. Dalam pertemuan tersebut dr. Wahidin banyak mengemukakan tentang ide-ide untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui "studiefonds" (dana pendidikan). Kalau bangsa sudah cerdas maka banyak wawasan yang timbul, sehingga tidak mudah untuk diadu-domba dan diatur oleh pihak penjajah. Sedangkan dari pihak R. Soetomo dan para pelajar STOVIA telah tertanam **rasa nasionalisme**, untuk berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan bahwa para pelajar STOVIA telah banyak mengetahui perjuangan di negara-negara lain, melalui berbagai buku bacaan yang diperolehnya. Dengan demikian antara gagasan dr. Wahidin dengan gagasan R. Soetomo dkk itu, sangat cocok bagaikan "**tumbu menemukan tutupnya**".

Tidak lama kemudian, akhirnya R. Soetomo dengan M. Soeradji berhasil mengadakan pertemuan dengan kawan-kawan pelajar STOVIA lainnya, untuk membicarakan tentang berdirinya organisasi yang bersifat nasional itu. Pertemuan tersebut diselenggarakan **secara non-formal** pada hari senggang (tidak ada pelajaran), dengan mengambil tempat di salah satu ruang, yaitu Ruang Anatomi STOVIA. Hasil pertemuan itu sangat positif dan berhasil mendirikan organisasi yang diberi nama "**Perkumpulan Budi Utomo**".

Organisasi ini ternyata merupakan organisasi modern, karena memiliki susunan pengurus secara lengkap dan tujuan organisasi secara jelas yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Budi Utomo. Adapun kepengurusan Budi Utomo saat berdirinya adalah sebagai berikut :

- Ketua : R. Soetomo
- Wakil Ketua : M. Soelaiman
- Sekretaris I : Soewarno I (Gondo Soewarno)
- Sekretris II : M. Goenawan
- Bendahara : R. Angka
- Komisaris : M. Soeradji, M. Moh. Saleh, Soewarno II (M. Soewarno) dan R.M Goembrek.

Pada tanggal 3 - 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan Kongres I di Yogyakarta. Dalam Kongres tersebut Budi Utomo menghasilkan susunan Pengurus Besar Budi Utomo, AD/ART Budi Utomo dan menentukan Kantor Pusat Budi Utomo. Selanjutnya para pendiri Budi Utomo yang terdiri dari para pelajar STOVIA tersebut di atas, merupakan pengurus Budi Utomo cabang Betawi. Sedangkan Kantor Pengurus Besar Budi Utomo berada di Yogyakarta, dengan diketuai oleh RTA. Tirto Kusumo dan dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua.

Dengan demikian tampak jelas bahwa para pelajar STOVIA hanya sebagai pendiri saja, karena untuk Pengurus Besar Budi Utomo dijabat oleh orang-orang yang lebih tua, yaitu para Bupati maupun pejabat yang lain. Hal ini jelas, suatu jiwa besar dari para pelajar STOVIA yang merasa masih muda dan sibuk dengan sekolahnya. Melihat hasil-hasil kongres yang dinilainya positif itu, tidak lama kemudian di daerah-daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa banyak cabang-cabang Budi Utomo yang didirikan.

Walaupun Budi Utomo memiliki cabang-cabang cukup banyak, belum ada perubahan langkah perjuangannya, yaitu tetap menempuh perjuangan melalui bidang sosial-budaya. Hubungan dengan pemerintah cukup dekat, mengingat para pengurusnya sebagian besar terdiri dari para pegawai pemerintah. Oleh karena itu, gerakan Budi Utomo terkesan lamban dan sangat hati-hati. Bagi anggota Budi Utomo yang

tidak sabar, terpaksa ke luar dari keanggotaan Budi Utomo, antara lain dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Mereka ini menginginkan gerakan yang militan dan langsung bergerak dalam bidang politik. Budi Utomo bukan tidak mau bergerak dalam bidang politik, tetapi tidak boleh terlalu cepat. Sebab sejak awal tujuan Budi Utomo pada prinsipnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi masih banyak segala sesuatu yang diperlukan dan harus tetap bekerjasama dengan pihak pemerintah. Lebih baik **"Biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas"**.

Itulah semboyan Budi Utomo menggunakan filsafat **"tumbuhnya pohon beringin"**. Pohon ini hidupnya lambat, dengan sabar, tetapi semakin lama semakin bertambah besar dan apabila sudah besar berdiri kokoh dan rindang, serta dapat memberi keteduhan siapa pun yang ada di bawahnya. Budi Utomo tidak menghendaki seperti **"tumbuhnya pohon kara atau semangka"**. Yaitu tumbuh cepat dan berbuah banyak, tetapi sekali berbuah (hanya satu musim) terus pohonnya mati tidak dapat hidup lagi.

Hal tersebut di atas memang terbukti, bahwa Budi Utomo cukup lama bertahan, yaitu dari tahun 1908-1926 tetap masih bergerak dalam bidang sosial-budaya dan belum berubah ke bidang politik. Setelah Dr. Soetomo kembali dari negeri Belanda dan mendirikan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), yang bergerak dalam bidang politik, maka Budi Utomo baru mulai mengubah langkah perjuangan ke dalam bidang politik. Hal demikian terjadi disebabkan kedua organisasi ini, pada mulanya didirikan oleh Dr. Soetomo. Setelah Dr. Soetomo mendapat pengalaman perjuangan dalam memimpin Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, di mana organisasi mahasiswa itu banyak bergerak dalam bidang politik, maka tidak sulit untuk merubah Budi Utomo dari pergerakan sosial budaya ke pergerakan politik. Apalagi setelah seringkali adanya musyawarah antara partai-partai besar tentang menjaga keutuhan tenaga yang bergerak secara kooperasi, maka dalam Kongres Budi Utomo tanggal 24-26 Desember 1935 di Solo terjadilah **fusi** (penggabungan) antara PBI dengan Budi Utomo menjadi satu dengan nama **"Partai Indonesia Raya"** (PARINDRA). Yang perlu dicatat dalam perjuangan Budi Utomo adalah suatu cara penggerakan Budi Utomo yang pandai membaca situasi.

sehingga mampu menjadi penggerak awal dan tercatat sebagai organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia dan selanjutnya mampu bertahan cukup lama, akhirnya pada saat yang tepat berhasil merubah langkah perjuangannya ke dalam perjuangan di bidang politik secara aktif. Sampai pada jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda, gerak langkah Budi Utomo itu masih sangat terasa yang disalurkan melalui organisasi gabungan, yaitu Parindra.

B. Indische Vereniging

Indische Vereniging (**Perhimpunan India**) pada mulanya bergerak dalam bidang sosial. Didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studinya di negeri Belanda, pada tanggal 15 November 1908. Sebagai organisasi mahasiswa yang berada jauh dari tanah tumpah darahnya, maka kehidupan mahasiswa tersebut secara kerjasama dan saling tolong menolong sesama mahasiswa. Sehingga dari yang belum mengenal, tetapi karena merasa berasal dari tanah tumpah darah yang sama, maka menjadi kenal dan semakin lama semakin bertambah akrab. Tidak sedikit para mahasiswa saling pinjam-meminjam biaya, apabila diantara mereka ada yang belum mendapat kiriman uang untuk membiayai studinya. Lama kelamaan mereka mulai merasa satu ikatan kebudayaan yang diteruskan menjadi ikatan berbangsa dan bernegara.

Organisasi yang pada awalnya hanya bergerak dalam bidang sosial, yang lengkap dengan kepengurusannya itu mengikuti jejak Budi Utomo. Oleh karena itu, juga mempunyai kepengurusan, terdiri dari :

- Ketua : Sutan Casyangan Soripada
- Sekretaris merangkap anggota : Sumitro Kolopaking
- Panitia Penyusunan AD/ART : Sutan Casyangan Soripada, Sumitro Kolopaking, Sosrokartono, dan Husein Djajadiningrat.

Pergerakan dalam bidang sosial itu, ternyata tidak lama bertahan, karena sejak tahun 1913 mulai diwarnai dalam pergerakan di bidang politik. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari datangnya tokoh "Tiga Serangkai" (dr. Cipto Mangunkusumo, E.F.E. Douwes Dekker

dan Suwardi Suryaningrat) pendiri *Indische Partij* yang dibuang ke negeri Belanda. Bahkan Suwardi Suryaningrat sempat terpilih sebagai Ketua *Indische Vereniging* pada periode 1917 - 1919. Sejak itulah, pergerakan *Indische Vereniging* mulai berani dan mengarah kepada perjuangan untuk Indonesia Merdeka.

Adapun sebab-sebab perubahan pergerakan itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Adanya perubahan kebijakan politik pemerintah di negara jajahan yang ingin menerapkan kehidupan dengan sistem demokrasi liberal, yakni dengan membentuk *Volksraad* (semacam DPR kolonial Belanda);
2. Selesainya Perang Dunia I, tahun 1919 makin banyak para pelajar Indonesia yang datang di negeri Belanda.

Dengan situasi dan kondisi seperti tersebut di atas, pergerakan *Indische Vereniging* tampak lebih terbuka. Sasaran dan cita-cita perjuangan yang bersifat nasional lebih tegas. Antara lain tentang perubahan nama organisasi dari "*Indische Vereniging*" diganti menjadi "*Indonesische Vereniging*". Sebab kata "*Indische*" mempunyai arti "**India**". Dalam hal ini berarti orang-orang keturunan Belanda, masih boleh masuk menjadi anggota perhimpunan mahasiswa itu. Sedangkan dengan istilah kata "*Indonesische*", berarti seluruh anggotanya hanya terdiri dari orang-orang Indonesia saja (Bumi Putera). Jadi tidak boleh orang-orang keturunan Belanda, masuk menjadi organisasi mahasiswa tersebut.

Kemudian juga kata-kata yang masih berbau asing atau bahasa Belanda, harus diganti dengan kata-kata berbahasa nasional (waktu itu masih menggunakan bahasa Melayu). Antara lain :

- *Inlanders* : diganti menjadi "**bumi putera**", karena kata *inlanders* mempunyai pengertian pribumi atau penduduk asli yang tampak masih berbau primitif.
- *Indonesiers* : diterjemahkan menjadi "**orang indonesia**".
- *Indiers* : diterjemahkan menjadi "orang India" dan tidak boleh digunakan untuk sebutan "orang Indonesia".
- *Insulinde* : diterjemahkan menjadi "**negeri Indonesia**" yang cantik molek.

- *Hindia Putera* : nama sebuah majalah Indonesische Vereniging, diganti menjadi "**Indonesia Merdeka**".

Penggantian nama dan kata-kata tersebut lebih tegas lagi pada saat pimpinan "*Indische Vereniging*" dijabat oleh Ahmad Soebardjo, yaitu pada periode tahun 1919-1921. Sejak kepemimpinan Ahmad Soebardjo mulai dipergunakan istilah "*Indonesische Vereniging*" diterjemahkan menjadi "**Perhimpunan Indonesia**". Dan selanjutnya diusulkan agar tidak menggunakan lagi dengan bahasa Belanda-nya, yaitu "*Indonesische Vereniging*".

Tampaknya usul Ahmad Soebardjo ini dapat dipertimbangkan, tetapi melihat situasi dan kondisi yang tepat baru diputuskan. Hal ini terbukti baru secara resmi tidak boleh digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu sejak organisasi dijabat oleh dr. Soekiman Wirjosandjojo. Kemudian mengenai lambang organisasi warna "**merah-putih**" dengan gambar "**kepala kerbau**" sudah pernah diusulkan oleh Ahmad Soebardjo sejak kepemimpinannya. Dan pada saat kepemimpinan dr. Soekiman ini, baru secara resmi digunakan. Jadi tampak jelas bahwa situasi dan kondisi sangat diperhitungkan, sehingga tidak mengakibatkan organisasi tersebut mengalami kesulitan dan dicap menentang kolonial Belanda.

Kegiatan perhimpunan Indonesia di negeri Belanda sangat aktif. Anggota-anggota Perhimpunan Indonesia (PI), selalu hadir dalam setiap diselenggarakan konferensi di negara Eropa, seperti di Jerman, Perancis, Brussel (Belgia), dan lain-lain untuk membicarakan masalah perjuangan menentang penjajahan dan ketidakadilan. Jadi pokok masalahnya adalah perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Hal ini tampak jelas pada waktu Moh. Hatta sebagai ketua PI yang baru saja untuk menggantikan dr. Sukiman. Moh. Hatta mempunyai ketajaman berpikir dan pandangan yang luas, jauh ke depan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan propaganda tentang masalah Indonesia ke dunia internasional, dalam waktu singkat telah mendapat simpati dari berbagai bangsa-bangsa di dunia.

Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh Moh. Hatta dalam pidatonya di forum internasional, yaitu pada waktu mengucapkan pidato di muka peserta "*Congres Democratique Internationale Pour la Paix*", bulan Agustus 1926 di *Bierville* dekat Paris. Moh. Hatta sebagai ketua PI

baru pertama kali berbicara di forum internasional. Ternyata pidato Moh. Hatta tersebut, mendapat sambutan hangat oleh bangsa-bangsa dari Asia. Karena yang datang dalam kongres tersebut selain dari Indonesia, juga diundang wakil-wakil dari India, Tiongkok dan Muangthai. Dan baru pertama kali itulah Indonesia bersuara di forum internasional dengan mengutarakan tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan negaranya.

Nama Indonesia buat pertama kali pula, ditonjolkan dalam forum internasional. Inilah yang membuat pemerintah Belanda, baik di Nederland maupun di Hindia-Belanda sangat marah terhadap para anggota PI. Hal ini dapat dimengerti, karena dari pihak pemerintah Belanda mengetahui persis tentang perjuangan PI di forum internasional. Moh. Hatta dengan terang-terangan menggunakan "**nama Indonesia**" dalam pidatonya itu, dan tidak lagi menggunakan kata "**Hindia Belanda**", walaupun pada masa itu masih dalam cengkeraman penjajah Belanda.

Oleh karena itu, dengan dikemukakannya nama "**Indonesia**" dalam forum internasional tersebut berarti istilah **Indonesia** tidak lagi dipandang dalam pengertian **etnologi** dan **anthropologi**, melainkan sudah mempunyai pengertian "**politik**". Segenap cita-cita tentang kemerdekaan nasional, dilambangkan dalam nama "Indonesia" itu. Dengan demikian PI-lah yang pertama kali, memberi arti-kata politik dan ketatanegaraan, tentang nama Indoneisa tersebut.

Namun pada saat para mahasiswa di negeri Belanda sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam forum internasional, ternyata di tanah air terjadi perjuangan untuk melawan pemerintahan Hindia-Belanda, yaitu dilancarkan pemberontakan PKI pada tahun 1926, yang mengalami kegagalan. Hal ini sebenarnya tidak membuat kendornya para mahasiswa di negeri Belanda. Terbukti masih aktifnya para anggota PI dalam kongres "**Liga Anti-Imperialis dan Penindasan Kolonial**" yang diselenggarakan di Brussel, Belgia, pada tanggal 10-15 Pebruari 1927. Dalam kongres ini, PI diwakili oleh Moh. Hatta, Nazir Dt. Pamuncak, Gatot Tarumamihardja dan Ahmad Soebardjo. Ternyata secara tidak diduga Semaun (Pemimpin PKI) juga hadir dalam kongres tersebut. Tetapi menurut keterangan Semuan, bahwa sebenarnya dia juga tidak menyetujui pemberontakan itu karena Semaun sendiri.

pada saat terjadi pemberontakan, pada tanggal 13 November 1926 sedang berada di Moskow. Sehingga dia tidak kembali ke tanah air, melainkan terus pergi ke negeri Belanda dan menyempatkan mampir di Brussel untuk mengikuti kongres.

Semaun mengerti ada kongres di Brussel atas pemberitahuan dari Moh. Hatta, yakni pada saat Semaun bertemu dengan Moh. Hatta pada bulan Desember 1926. Pertemuan empat mata antara Semaun-Hatta ini, tampaknya diketahui oleh pihak pemerintah Belanda. Hal ini terbukti bahwa akibatnya Moh. Hatta dan kawan-kawannya dikejar-kejar oleh pihak pemerintah Belanda. Oleh karena itu, berita pengejaran ini telah didengar oleh para anggota PI pada waktu masih dalam kongres di Brussel. Termasuk Semaun sebenarnya juga dalam status pengejaran, karena dia sebagai pemimpin PKI yang gagal dalam pemberontakan itu. Sedangkan Moh. Hatta sendiri dalam posisi yang sulit. Hal ini disebabkan adanya tuduhan, bahwa Moh. Hatta juga dianggap sebagai pendukung pemberontakan PKI di Hindia-Belanda. Padahal Moh. Hatta sejak awal tidak senang terhadap paham komunis. Namun karena pertemuan dengan Semaun, maka Moh. Hatta tetap dituduh sebagai pendukung PKI. Akhirnya Moh. Hatta, Alisastro Amidjojo, Nazir dt. Pamuncak dan Abdul Madjid ditangkap. Keempat mahasiswa tersebut dituduh sebagai pendukung PKI, dan kemudian diadili. Dalam pidato pembelaannya Moh. Hatta menggunakan judul **"Indonesia Vrij"** (Indonesia Merdeka).

Sedangkan yang tidak berhasil ditangkap, banyak yang melarikan diri ke luar dari negeri Belanda dan tidak sedikit yang terpaksa pulang ke tanah air, kemudian bergabung dengan pejuang di tanah air terutama para pemuda/pelajar.

C. Sarekat Dagang Islam

Mengenai Sarekat Dagang Islam (SDI) masalah tahun berdirinya masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. sebab ada pihak yang mengemukakan Sarekat Dagang Islam lebih dulu daripada Budi Utomo, yaitu sejak 16 Oktober 1905. Kelahiran berdirinya SDI pernah dikemukakan oleh Moh. Roem dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional pada tanggal 23 Oktober 1977, dengan judul **"Peranan Sarekat Islam dalam Pergerakan Kemerdekaan"**.

Moh. Roem mengemukakan sebagai berikut : "Bahwa saya berbahagia masih ketemu dengan Haji Samanhoedi sendiri, di rumah bapak Goenawan di tahun tigapuluhan, yang memberi kesaksian pada pembicara, bahwa Sarekat Dagang Islam didirikan di tahun 1905 pada tanggal 16 Oktober".

Namun oleh Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul "Gerakan Islam Modern di Indonesia", mengadakan bantahan, antara lain mengemukakan sebagai berikut :

".....bagaimana jejak itu dihapuskan, bahwa SDI didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Kiyai Haji Samanhoedi diawali oleh Tamar Jaya, tiadanya bukti sulit dipercaya".

Hal ini sebenarnya bersumber dari usaha Dr. D.A. Rinkers yang bertujuan untuk kepentingan kolonial, berusaha keras menghapus peranan Tirto Adhi Soerjo, karena dinilai sangat berbahaya terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Sebab Tirto Adhi Soerjo telah dikenal sejak kegiatannya di Bogor, bersama-sama para pengusaha besar yakni keluarga Badjenet. Kegiatan mereka adalah mendirikan organisasi bernama Sarekat Dagang Islam, yang nama tersebut dicetuskan pada pertemuan pertama tanggal 27 Maret 1909 di rumah Tirto Adhi Soerjo di Bogor. Namun baru mendapat peresmian dari pihak pemerintah Hindia-Belanda, pada tanggal 5 April 1909.

Pada saat berdirinya, SDI dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Presiden : Sjech Achmad bin Abdoelrachman Badjenet
- Wakil Presiden : dr. Mohamad Dagrim
- Komisaris : Sjech Achmad bin Said Badjenet, Sjech Galib bin Said Tebe, Sjech Mohamad bin Badjenet, Mas Railoes, dan Haji Mohamad Arsad
- Kasir : Sjech Said bin Abdurrachman Badjenet
- Sekretaris-Adviseur : R.M. Tirto Adhi Soerjo. (van der Wal : 96).

Dalam waktu yang tidak lama keluarga Badjenet, menarik diri dari keanggotaan SDI. Akhirnya Tirto Adhi Soerjo memimpin sendiri

organisasi tersebut. Adapun penarikan diri para keluarga Badjenet itu, disebabkan adanya perbedaan pandangan arah dan tujuan organisasi. Keluarga Badjenet menghendaki bahwa organisasi tetap bertujuan untuk "**organisasi dagang**" yang titik beratnya pada bidang per-ekonomian. Sedangkan Tirto Adhi Soerjo menghendaki bahwa organisasi akan di arahkan kepada suatu "**Pergerakan dalam bidang politik**". Sebab pada waktu itu, di negara-negara Asia sedang terpengaruh dengan gerakan Pan-Islamisme Internasional. Gerakan ini secara tradisional berpusat di Turki. Oleh karena itu, sebenarnya untuk keluarga Badjenet sangat cocok masuk dalam gerakan Islam, yang tergabung dalam SDI. Karena keluarga ini termasuk golongan Arab dan pernah menyelesaikan studinya di Turki. Namun karena arah tujuan keluarga Badjenet hanya semata-mata untuk kepentingan dagang, maka mereka keluar dari SDI.

Setelah keluarga Badjenet keluar dari keanggotaan SDI, maka arah dan tujuan SDI diwarnai gerakan dalam bidang politik. Dalam hal ini Dr. Moh. Hatta dalam ceramahnya yang berjudul "**Permulaan Pergerakan Nasional**", menjelaskan sebagai berikut :

".....R.M. Tirto Adhi Soerjo berkeliling seluruh Jawa tapi yang dikunjungi hanya kota-kota besar saja. Di kota-kota besar itu masing-masing dianjurkan mendirikan Sarekat Dagang Islam. Akhirnya dia sampai di Solo dan di sana dicobanya pula mendirikan Sarekat Islam (SI) dengan semboyan "**kebebasan ekonomi rakyat tujuannya, Islam jiwanya, guna kekuatan dan persatuan**". (DR. Moh. Hatta 1977 : hasil transkrip sebuah ceramah).

Dengan anjuran R.M. Tirto Adhi Soerjo tersebut, maka di Solo berdiri Sarekat Dagang Islam yang diketuai oleh Haji Samanhoedi. Bersamaan dengan penyusunan dasar Sarekat Islam pada tanggal 9 November 1911, maka kata "**Dagang**" pada Sarekat Dagang Islam itu dihilangkan. Sehingga hanya menjadi Sarekat Islam saja. Sejak itulah sebenarnya organisasi itu, mulai merubah langkah pergerakannya, yaitu dari bidang ekonomi ke arah bidang politik. Dengan demikian jelas bahwa SI merupakan perkembangan dari SDI yang pernah didirikan di Bogor pada tanggal 27 Maret 1909 oleh Tirto Adhi Soerjo bersama-sama keluarga Badjenet.

Kegiatan SDI selanjutnya, baik yang ada di Solo maupun di

daerah-daerah lain terus diawasi oleh pemerintah. Hal ini tampak bahwa pada saat Tirto Adhi Soerjo, sedang giat-giatnya mempropagandakan program SDI di daerah Solo ditangkap oleh pemerintah Hindia-Belanda dan kemudian diasingkan. Namun tidak jelas kemana Tirto Adhi Soerjo diasingkan. Sejak tanggal 11 November 1912, yaitu waktu penangkapan Tirto Adhi Soerjo, terjadi perubahan nama secara resmi Sarekat Dagang Islam cabang Solo menjadi Sarekat Islam dengan Anggaran Dasar baru. Sejak itu pula pimpinan SI dijabat oleh Haji Samanhoedi. Dan selanjutnya, atas usaha Dr. D.A. Rinkers lebih menonjolkan peranan Haji Samanhoedi, dibanding dengan Tirto Adhi Soerjo. Oleh karena itu, mengenai tahun berdirinya SDI yang tertulis dalam buku-buku untuk SD, SMP, dan SMU, banyak yang menggunakan angka tahun 1911, karena ditinjau menurut pemerintah Hindia-Belanda.

Terlepas mana yang dipakai mengenai angka tahun kelahiran SDI, yang jelas bahwa SDI termasuk suatu organisasi pergerakan nasional yang ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional. Tirto Adhi Soerjo tercatat sebagai tokoh yang ulet dalam SDI dan juga sebagai pendiri pers nasional, yaitu "**Medan Prijaji**". Mengenai Medan Prijaji, pemerintah Hindia-Belanda sangat khawatir dan terlihat dalam laporan Dr. D.A. Rinkers dalam surat rahasianya yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal tertanggal 19 Februari 1912. Isi laporan tersebut antara lain sebagai berikut :

"Satu-satunya terbitan yang mendominasi semua terbitan tersebut, kecuali **Darmokondo**, adalah **Medan Prijaji**, yang selain tidak keluar dari watak umum tersebut juga banyak lebih energik, penuh bakat, tapi sementara itu lebih tidak terbuka dan lebih berbisa sepak-terjangnya, dan menyatakan seluruh Jawa sebagai medan geraknya". (Van der Wal : 78-79).

Dari tulisan-tulisan Tirto Adhi Soerjo yang dimuat dalam Medan Prijaji, pihak pemerintah sudah menaruh kekhawatiran tentang pengaruhnya di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, Tirto Adhi Soerjo sering ditangkap dibuang keluar Jawa. Antara lain pernah dibuang ke Telukbetung, Lampung. Tetapi pada saat-saat melakukan kegiatan propaganda tentang program SDI, Tirto Adhi Soerjo juga ditangkap, namun tidak jelas dimana tempat pembuangannya.

Sejak Tirto Adhi Soerjo dalam pembuangan, maka kegiatan SDI

diteruskan oleh Haji Samanhoedi. Kepemimpinan Haji Samanhoedi inipun mendapat persetujuan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Namun setelah terjadi perselisihan antara pedagang batik dari golongan Islam dengan pihak pedagang batik Tionghoa, maka pemerintah Hindia-Belanda ikut campur dan membatasi ruang gerak SDI. Sejak itulah, gerakan SDI mulai mengarahkan perlawanannya terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Program SI yang pernah dilontarkan oleh Tirta Adhi Soerjo tampak menjadi dasar perjuangannya

Kegiatan SDI yang telah berubah dari bidang ekonomi ke arah bidang politik itu, tampak semakin sulit untuk bergerak di daerah Solo. Akhirnya ruang gerak SDI terpaksa berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lain. Di antara daerah yang paling tepat dan mendapat sambutan dari tokoh masyarakat setempat adalah pada saat pergerakan SDI di daerah Surabaya. Dengan demikian Surabaya-lah yang dapat diandalkan untuk pusat pergerakan SDI. Oleh karena itu, pada tahun 1915 di Surabaya didirikan "**Central Sarekat Islam**" dengan ketua terpilih Haji Samanhoedi dan wakil ketua H.O.S. Cokroaminoto.

Sejak H.O.S. Cokroaminoto dalam kegiatan pergerakan organisasi tersebut, maka tampak jelas pergerakan dalam bidang politik lebih diutamakan, daripada kegiatan dalam bidang ekonomi. Dengan perubahan langkah dan gerak perjuangan itu, maka sebutan nama organisasi tidak lagi SDI, melainkan SI. Terlebih-lebih setelah selesainya Kongres SI tanggal 26 Januari 1913 dan Kongres Nasional SI pertama tanggal 17-24 Juni 1916 di Bandung, H.O.S. Cokroaminoto lebih menonjol, karena terkenal dengan keberaniannya dalam berpidato dalam setiap pertemuan atau rapat besar. Antara lain mengatakan sebagai berikut:

"kepada Hindia-Belanda diminta tanggungjawabnya terhadap rakyat, yakni : "**melindungi penduduk bumi putera dari perbuatan sewenang-wenang**",bahwa gerakan Islam itu diperkuat untuk membina suatu barisan Islam dalam usaha pembentukan suatu bangsa". (Ruben Nalenan 1974 :91).

Dengan menonjolnya Cokroaminoto, maka kepemimpinan Haji Samanhoedi tidak tampak, sehingga selama 5 (lima) tahun Haji Samanhoedi telah berhasil meneruskan cita-cita SDI, tetapi sebagai penerus dalam bidang politik adalah Cokroaminoto. Sebenarnya

kepemimpinan Haji Samanhoedi itu, mulai kurang menonjol sejak tahun 1913, karena hampir segala persoalan organisasi diserahkan kepada Cokroaminoto. Oleh karena itu Cokroaminoto dalam tahun itu juga diangkat sebagai Ketua SI, namun dalam pembentukan **Central Sarekat Islam** (CSI) tahun 1915 Haji Samanhoedi masih didudukkan sebagai Ketua dan Cokroaminoto sebagai Wakil Ketua. Hal ini tampaknya untuk menghargai kepada Haji Samanhoedi, karena telah ikut merintis perjuangan SDI sejak tahun 1911, yang seterusnya sampai SDI menjadi pergerakan nasional untuk mencapai cita-cita pembentukan suatu bangsa, seperti yang diucapkan oleh Cokroaminoto tersebut.

Melihat kepemimpinan Cokroaminoto dalam SI, maka pihak pemerintah Hindia-Belanda semakin curiga terhadap organisasi itu. Terlebih lagi setelah Cokroaminoto sebagai Ketua SI dan Abdul Muis sebagai Wakil Ketuanya, maka gerakan SI tampak lebih terbuka, yakni mengajukan mosi pada tanggal 25 November 1916, yang selanjutnya lebih terkenal dengan "**Mosi Cokroaminoto**", yang isinya sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk Parlemen yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dengan hak yang penuh menentukan hukum (undang-undang);
2. Dibentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Parlemen.

Segala kegiatan Cokroaminoto sebagai Ketua SI, dinilai oleh pemerintah Hindia-Belanda sangat merugikan, sehingga ia dicurigai. Namun mengingat Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada saat itu, tidak bersifat kejam, maka mosi Cokroaminoto itu bahkan dijadikan pertimbangan untuk kebijakan dalam membentuk semacam Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad). Sehingga Gubernur Jenderal *Van Limburg Stirum* pada tanggal 18 Mei 1917 meresmikan pembentukan Volksraad, dimana SI mewakilkan Cokroaminoto dan Abdul Muis menjadi anggota.

Berbeda dengan Gubernur Jenderal sebelumnya, yaitu *Van Heutsz* dan *Idenburg*, yang selalu bersikap keras dan kejam dalam setiap langkahnya untuk menindak kaum pergerakan nasional. Sedangkan semasa Gubernur Jenderal dijabat oleh *Van Limburg Stirum*, tampak banyak toleransinya terhadap tuntutan dari pihak kaum pergerakan

nasional. Oleh karena itu, apa saja yang telah dilakukan oleh Gubernur Jenderal sebelumnya, tidak menjadi suatu pegangan. Sebagai contoh tentang kecurigaannya terhadap SI, di mana SI akan mengarah kepada pembentukan suatu bangsa. Untuk hal ini pada saat Gubernur Jenderal sebelumnya yaitu Idenburg menanggapinya sangat keras dan menuduh SI akan menggunakan persatuan Islam untuk melawan pemerintah. Oleh karena itu, dengan secepatnya pemerintah berusaha memecah organisasi SI itu.

Cara yang dipergunakan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk memecah organisasi Islam itu adalah dengan mengadakan penyusupan ke dalam organisasi tersebut. Beberapa orang Belanda yang berpaham **sosialis demokrasi** didatangkan di Hindia-Belanda. Mereka ini antara lain *HJFM. Sneevliet, JA. Bransteder, HW. Dekker* dan *Bergsma*. Diantara mereka ini yang paling terkenal adalah *Sneevliet*. Oleh karena itu, ia diberi tugas untuk memimpin *infiltrasi* (penyusupan) ke dalam tubuh organisasi Islam yang dianggap berbahaya itu.

Dengan kedok ikut memperbaiki nasib rakyat, maka *Sneevliet* dkk. mudah bergaul dengan orang-orang SI. Melalui pergaulan inilah faham sosialis demokrasi dimasukkan. Bahkan tidak sedikit ajaran marxis masuk ke dalam tubuh SI itu. Akibatnya banyak orang-orang SI yang tertarik dengan ajaran tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu sejak kedatangan orang-orang Belanda berfaham sosialis demokrasi pada tahun 1913, pada bulan Mei 1914 di Semarang telah berhasil didirikan *Indische Sociaal Demokratische Vereniging* (ISDV). Banyak orang-orang SI masuk ke dalam ISDV itu, yang berarti mempunyai keanggotaan rangkap. Sedangkan ISDV dibentuk oleh orang-orang Belanda (*Sneevliet* dkk) itu, memang bertujuan untuk memecah belah SI. Dengan demikian berhasillah tujuan pemerintah memecah belah organisasi yang memiliki anggota sangat besar itu.

Orang-orang SI yang masuk ke dalam ISDV, antara lain ialah : *Semaun, Dharsono, Alimin, Tan Malaka*, dan lain-lain. Perbedaan pandangan antara orang-orang SI yang terpengaruh faham sosialis demokrasi dengan yang tidak terpengaruh, tampak semakin tajam. Yakni pada saat Pembentukan Sarekat Buruh pada tahun 1919. Sarekat Buruh yang dibentuk itu bernama "**Persatuan Pergerakan Kaum Buruh**" (PPKB) dan langsung di bawah SI, yang berarti

mempunyai garis hubungan vertikal kepada Central Sarekat Islam (CSI). Sarekat Buruh ini juga dipimpin oleh Cokroaminoto, Suryopranoto, Sosrokardono, dan lain-lain. Sedangkan Semaun dkk. dari ISDV menghendaki Sarekat Buruh dengan nama "*Revolutionair Socialistische vak Centrale*". Dengan demikian Semaun memimpin dua organisasi buruh, yakni seperti tersebut di atas dan yang satu lagi bernama "*Vereniging van Spoor en Tramwegpersoneel*" (VSTP).

Melihat permasalahan tersebut di atas, maka dalam tubuh SI ada perbedaan pandangan yang sangat mendasar. Yakni dalam hal faham (ideologi) dan Sarekat Buruh. Oleh karena itu, dalam setiap rapat selalu terjadi perdebatan yang tidak menghasilkan titik temu. Salah satu pihak memandang dari segi Islam (kelompok Cokroaminoto dkk) dan di pihak lain memandang dari segi non-Islam, yaitu sosialis demokrasi yang berbau marxis. Dalam keadaan yang demikian, kelompok Cokroaminoto dkk. mengusulkan kepada CSI, agar orang-orang yang memiliki keanggotaan rangkap diberikan suatu ketegasan untuk memilih salah satu organisasi saja. Hal ini berarti apakah memilih masuk SI atau ISDV. Karena dua organisasi ini, mempunyai landasan dan tujuan yang berbeda.

Usulan Cokroaminoto dkk. itu disetujui oleh CSI, sehingga pada tahun 1920, terjadi perpecahan dalam tubuh SI. Satu pihak mengikuti kelompok Semaun dkk, yang menganut faham sosialis demokrasi berbau marxis dan yang satu pihak lagi mengikuti kelompok Cokroaminoto dkk, yang tetap untuk meneruskan program lama, yaitu : - kebebasan ekonomi rakyat, berjiwa Islam, guna kekuatan dan persatuan. Selanjutnya kelompok Semaun dkk. disebut **SI merah** dan kelompok Cokroaminoto dkk. disebut **SI putih**.

Kemudian atas dorongan Semaun dkk., maka dalam Kongres ISDV ke-7 tanggal 23 Mei 1920, nama ISDV dirubah menjadi "**Perserikatan Komunis Hindia**" dan tidak lama kemudian pada tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia itu dirubah namanya menjadi "**Partai Komunis Indonesia** (PKI)". Sedangkan SI putih dari kelompok Cokroaminoto dkk. menilai bahwa Semaun dkk, telah membelokkan haluan Islam dari SI ke haluan komunis. Untuk menghadapi masalah tersebut, SI putih mengusulkan rapat kepada CSI untuk membahas penyatuan Sarekat Buruh. Ternyata CSI menyetujui dan

rapat diadakan pada bulan April 1923. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa :

1. Dibentuk organisasi penyatuan Sarekat Buruh dengan nama **"Persatuan Vakbond Hindia"** (PVH);
2. Apabila ada seorang pimpinan buruh ditangkap, kaum buruh akan mengadakan pemogokan;

Ternyata Semaun dkk. sangat memaksakan untuk pemogokan, sehingga kelompok Cokroaminoto, menyatakan ke luar dari PVH dan sekaligus juga merubah sikapnya dari **kooperatif** ke **non-kooperatif**. Dalam hal ini, berarti SI keluar dari Volksraad, dan menamakan organisasinya menjadi **"Partai Sarekat Islam" (PSI)**.

D. Indische Partij

Organisasi ini berdiri tanggal 6 September 1912 di Bandung. Pendirinya adalah dr. Cipto Mangunkusumo, EFE. Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat, yang selanjutnya terkenal dengan sebutan **"Tiga Serangkai"**. Berbeda dengan organisasi sebelumnya, di mana organisasi sebelumnya bersifat sangat hati-hati, sedangkan organisasi ini bersifat keras dan langsung bergerak dalam bidang politik.

Sifat keberaniannya sangat menonjol, yaitu melalui tulisan-tulisannya yang dimuat dalam berbagai majalah. Suwardi Suryaningrat menulis dalam harian *"De Express"* dengan judul *"Als ik eens Nederlander was"* (Andaikata saya seorang Belanda). Tulisan ini sebenarnya ditujukan untuk menyindir pemerintah Hindia Belanda, yang pada waktu itu akan mengadakan peringatan 100 tahun pembebasan negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Sebab dalam peringatan tersebut diperlukan biaya yang dipungut dari penduduk Hindia Belanda. Yang berarti penduduk di negeri jajahan, diajak untuk berfoya-foya dalam peringatan bangsa yang menjajah itu untuk kepentingan dirinya.

Hal tersebut memang sangat mengherankan dan dinilai tidak pada tempatnya. Oleh karena itu Suwardi Suryaningrat mengadakan protes secara halus melalui tulisannya itu. Dalam tulisannya tersebut juga dikatakan sebagai berikut :

"Jika sekiranya penulis seorang Belanda, maka ia akan mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar tidak merayakan **hari Pembebasan** itu di Hindia Belanda". (Ruben Nalenan 1974 : 86).

Kata-kata tersebut mengandung maksud, bahwa sebenarnya pemerintah Hindia Belanda "**harus malu**" mengajak bangsa yang terjajah untuk peringatan negeri si penjajah, di negara jajahannya itu. Tetapi sebenarnya, disadari atau tidak, bahwa pihak pemerintah Hindia-Belanda, juga membuka mata rakyat Hindia-Belanda tentang pentingnya "**kemerdekaan dan kebebasan suatu bangsa**". Oleh karena itu, tulisan tersebut segera ditarik dari peredaran, agar tidak dapat terbaca oleh masyarakat luas.

Dengan tulisannya tersebut, maka Suwardi Suryaningrat ditangkap. Berhubung Suwardi termasuk salah satu pendiri Indische Partij dan sesuai dengan anggaran dasar Indische Partij yang disusun pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung, maka dr. Cipto Mangunkusumo berusaha membelanya. Tulisan dr. Cipto tersebut dimuat di dalam majalah Indische Partij yang bernama "*Het Tijdschrift*" dan hariannya bernama "*De Express*". Adapun judul tulisan tersebut berbunyi (dalam bahasa Indonesianya) "**Kekuatan atau Ketakutan**". Setelah tulisan dr. Cipto Mangunkusumo tersebut beredar di majalah dan juga di harian itu, maka tidak lama kemudian dr. Cipto juga ditangkap. Dengan demikian di antara pendiri Indische Partij tersebut, tinggal satu lagi yang belum ditangkap, yaitu EFE. Douwes Dekker.

Dengan pendiriannya yang tetap teguh dan sangat berpegang kepada prinsip perjuangan, sebagaimana bertujuan sebagai berikut :

"Tujuan Indische Partij ialah untuk membangunkan patriotisme semua "Indiers" terhadap kepada Tanah Air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan Tanah Air "**Hindia**" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka". (Sartono Kartodirdjo 1975 : 191).

Pendiri Indische Partij yang tinggal satu orang belum ditangkap itu, tetap terus berjuang membela rakyat. Baginya, meskipun termasuk keturunan Belanda (Indo), namun dalam perjuangan merasa satu dengan orang-orang kelahiran Hindia Belanda asli. Dalam perjuangan untuk kepentingan Tanah Air tidak ada perbedaan antara Indo maupun pribumi. Dia merasa hidup di Tanah Airnya sendiri dan tidak senang

melihat kehidupan di masyarakat yang sangat membedakan antara ras, derajat, maupun perlakuan. Dia berjuang untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam anggaran dasar Indische Partij, adalah sebagai berikut :

1. memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua *Indiers*; meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah Budaya Hindia; mengasosiasikan intelek secara bertingkat ke dalam suku dan inter-suku yang masih hidup berdampingan pada masa ini; menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri;
2. memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan;
3. memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme yang bisa mengakibatkan *Indiers* asing sama lain, sehingga dapat memupuk kerja sama atas dasar nasional;
4. memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan memperkembangkan individu ke arah aktivitas yang lebih besar secara teknis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan;
5. berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia;
6. memperkuat daya rakyat Hindia untuk dapat mempertahankan Tanah Air dari serangan asing;
7. mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman dan menghindian pengajaran, yang di dalam semua hal terus ditujukan kepada kepentingan ekonomi Hindia, di mana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan karena ras, sex atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang setinggi-tingginya yang bisa dicapai;
8. memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan;
9. memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

Jadi jelas bahwa Indische Partij bergerak langsung terjun dalam bidang politik. Oleh karena itu, tidak mustahil apabila tokoh-tokohnya mendapat pengawasan secara ketat. Pergerakan dalam bidang politik pada saat itu memang masih sangat berbahaya. Organisasi yang

tampak bergerak dalam bidang politik, sudah pasti mendapat tuduhan pemerintah kolonial Belanda, bahwa organisasi tersebut akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Hal ini dapat dirasakan Indische Partij pada saat mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal pada tanggal 4 Maret 1913, agar organisasi ini mendapat pengakuan sebagai badan hukum, ternyata ditolak. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum.

Walaupun sudah jelas kegiatan Indische Partij mendapat pengawasan secara ketat, namun pendirinya, yaitu EFE. Douwes Dekker tetap meneruskan perjuangannya. Dia berusaha menghadap kepada Gubernur Jenderal dengan tujuan, ingin menjelaskan dan bersedia merubah pasal-pasal dari Anggaran Dasar Indische Partij, apabila dianggap membahayakan pemerintah. Akan tetapi usaha EFE. Douwes Dekker ini sia-sia saja, karena pada tanggal 11 Maret 1913 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peringatan kepada Indische Partij dan organisasi ini tetap dinyatakan sebagai partai terlarang. Peringatan tersebut juga ditujukan kepada partai-partai lain, bahwa kemerdekaan itu tidak dapat diterima sebagai hadiah dari pemerintah kolonial. Akhirnya Douwes Dekker menyimpulkan sebagai berikut :

"Bahwa pengertian "**pemerintah Hindia**" haruslah dipandang sebagai salah satu daripada partai yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah yang berkuasa di suatu tanah jajahan, bukanlah pemimpin namanya penindasan, dan penindasan itu adalah musuh yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, lebih berbahaya daripada pemberontakan yang meminta perubahan-perubahan pemerintahan (revolusi)". (DMG. Koch 1951 : 39).

Mengenai perkataan "**pemerintah Hindia**" yang dimaksudkan adalah pemerintahan bagi rakyat di negeri jajahan, apabila memang nantinya telah berhasil perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Jadi bukan pemerintahan kolonial Belanda yang biasa disebut dengan "**Pemerintah Hindia-Belanda** (*Nederlandsch Indie*)". Jadi perjuangan rakyat di Hindia-Belanda itu bertujuan untuk mencapai negara merdeka, yang nantinya disebut "pemerintah Hindia". Inilah yang menjadi tujuan utama dari Indische Partij. Oleh karena itu Indische Partij dapat dikatakan sebagai organisasi pergerakan nasional

pertama yang bergerak dalam bidang politik. Berbeda dengan Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam, di mana organisasi tersebut bergerak sangat hati-hati, sehingga sampai tahun 1912 belum tampak radikal. Bagi anggota-anggota yang menghendaki pergerakan radikal, menyatakan keluar dari Budi Utomo, yaitu dr. Cipto Mangunkusumo dan Suryadi Suryaningrat. Sedangkan untuk organisasi SDI, baru berubah ke arah pergerakan politik pada tahun 1913, setelah organisasi berubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI).

Mengenai Indische Partij, setelah Suwardi Suryaningrat dan dr. Cipto ditangkap, maka Douwes Dekker terus mengadakan pembelaannya. Di dalam majalah dan harian Indische Partij, EFE. Douwes Dekker menulis pembelaan itu dengan judul (bahasa Indonesianya) **"Pahlawan kita Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo"**. Setelah tulisan tersebut diketahui oleh pihak pemerintah kolonial Belanda, maka EFE. Douwes Dekker ditangkap oleh pemerintah. Dengan demikian ketiga tokoh Indische Partij, kesemuanya telah ditangkap pemerintah Hindia-Belanda pada tahun yang sama, yaitu tahun 1913. Jadi umur Indische Partij sangat singkat, kurang lebih hanya satu tahun saja. Namun apa yang dicita-citakan Indische Partij, sebenarnya telah tertanam oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebenarnya ketiga pemimpin Indische Partij tersebut ditawarkan dibuang di dalam negeri saja. Yaitu Douwes Dekeer ke Timor (Kupang), dr. Cipto Mangunkusumo ke Banda dan Suwardi Suryaningrat ke Bangka. Namun ketiga-tiganya memilih dibuang ke luar negeri saja, yakni ke negeri Belanda. Dengan pertimbangan, kalau dibuang di dalam negeri diperlakukan hukum kolonial (kejam), kalau di buang ke luar negeri diperlakukan hukum internasional. Sifat hukum internasional adalah liberal dan demokrasi, sehingga masih dapat untuk mempelajari masalah-masalah perjuangan di negara-negara lain.

Hal tersebut di atas memang benar dan ternyata setelah sampai di negeri Belanda dapat bertemu dengan para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri tersebut. Pada saat itu, para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda juga sedang giat-giatnya berorganisasi, yaitu bernama Indische Vereniging. Dengan demikian para tokoh Indische Partij tersebut dapat bergabung dalam organisasi tersebut. Bahkan Suwardi Suryaningrat sempat duduk menjadi ketua Indische Vereniging.

Kedatangan "**Tiga Serangkai**" membawa udara segar bagi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Cita-cita nasional yang tidak berhasil diperjuangkan di tanah air, diteruskan di negeri Belanda. Indische Vereniging yang sebelumnya hanya bergerak dalam bidang sosial, mulai berubah ke arah bidang politik untuk mencapai cita-cita nasional. Untuk menyampaikan gagasannya, agar diketahui oleh sesama kawan dalam perjuangan baik yang ada di negeri Belanda maupun di tanah air, maka sejak tahun 1918 Indische Vereniging mendirikan "**Kantor Berita**" yang diberi nama "*National Persbureau*" (Kantor Berita Nasional). Pimpinan Kantor Berita ini adalah Suwardi Suryaningrat dan telah berhasil menerbitkan majalah yang diberi nama "**Hindia Putera**". Tetapi pada tahun 1919, nama majalah dan nama organisasi, diusulkan oleh Ahmad Soebardjo, agar nama yang berbau kolonial dihilangkan dan diganti nama yang mengarah kepada kepentingan nasional. Sehingga untuk organisasi diusulkan menjadi "*Indonesische Vereniging*". Jadi ada perubahan dari "*Indische*" menjadi "*Indonesische*" kemudian nama "**Hindia Putera**" agar diganti menjadi "**Indonesia Merdeka**".

Mengenai usul tersebut pada prinsipnya disetujui, namun untuk memasyarakatkan secara luas, masih harus dipertimbangkan secara matang. Baru pada tahun 1922 nama itu diperkenalkan ke masyarakat dan secara resmi, yaitu pada tahun 1925 kata-kata yang berbau kolonial tidak boleh dipakai lagi. Sepertinya **Indonesische Vereniging** harus diterjemahkan menjadi "**Perhimpunan Indonesia**".

Sepeninggalnya "Tiga Serangkai" ke negeri Belanda, keadaan organisasi Indische Partij semakin lama semakin mundur. Sebenarnya mundurnya Indische Partij bukan karena ditinggalkan oleh ketiga tokoh pendirinya, melainkan karena adanya larangan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Sehingga hampir setiap langkah-gerakannya tertutup, walaupun penerusnya berusaha merubah nama organisasi, yaitu dari Indische Partij menjadi "**Partai Insulinde**". Sebab pihak pemerintah tetap curiga terhadap organisasi yang baru ini. Dari program partainya masih tampak sebagai penerus dari Indische Partij yang telah dilarang itu. Antara lain menyebutkan sebagai berikut :

"mendidik suatu nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita

persatuan bangsa". (Sartono Kartodirdjo 1975 : 193).

Sementara itu juga disebabkan oleh pengaruh Sarekat Islam yang semakin kuat di kalangan masyarakat, maka banyak para penerus Indische Partij yang mengikuti jejak Sarekat Islam. Dengan demikian Indische Partij semakin lemah dan mati dengan sendirinya. Walaupun sebenarnya Douwes Dekker sekembalinya dari negeri Belanda pada tahun 1918, masih berusaha untuk menghidupkan kembali kegiatan Indische Partij, namun usahanya sia-sia saja. Usaha Douwes Dekker itu antara lain dengan mengubah nama Indische Partij menjadi "*Nationaal Indische Partij*" (NIP) pada tahun 1919. Berhubung sudah dicatat oleh pemerintah, sebagai organisasi yang berbahaya, maka dalam bentuk apapun Indische Partij tetap dilarang.

Akhirnya dari "**Tiga Serangkai**" yang masih dapat diharapkan adalah cita-citanya yang masih tetap hidup di kalangan masyarakat, yaitu dapat disalurkan melalui bidang pendidikan. Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1922, berhasil mendirikan "**Taman Siswa**" yang bergerak dalam bidang pendidikan, sehingga banyak berdiri "**Sekolah-sekolah Taman Siswa**" hampir di seluruh Indonesia dan yang pertama kali berdiri adalah Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Kemudian pada tahun yang sama, Douwes Dekker juga mendirikan sekolah di **Cigelereng**, Bandung, dengan nama "*Ksatria School*". Pada tahun 1926 sekolah ini maju pesat, dan Douwes Dekker berhasil mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama "**Yayasan Ksatria Institut**". Demikian juga dr. Cipto Mangunkusumo tidak mau ketinggalan, dari dokter ini didirikan sekolah "**Kartini Club**". Akan tetapi karena kekurangan dana, sehingga tidak dapat berkembang dan akhirnya bubar.

E. Perguruan Muhammadiyah

Pergerakan Nasional tidak selalu dilancarkan melalui bidang politik. Walaupun pada dasarnya pergerakan dalam bidang politik adalah yang paling menonjol. Tetapi bukan berarti pergerakan di bidang lain tidak berperan. Seperti yang ditempuh oleh Perguruan Muhammadiyah, bahwa perguruan ini tidak mau ikut dalam pergerakan di bidang politik, melainkan menempuh melalui bidang pendidikan dan sosial yang tetap berjiwa Islam.

Perguruan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh KH. Achmad Dachlan. Organisasi ini cepat mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagaimana Sarekat Islam bahwa Muhammadiyah sebagai persatuan Islam juga mendapat sorotan tajam oleh pihak pemerintah kolonial Belanda. Namun berhubung langkah dan gerak Muhammadiyah tidak menjurus ke arah bidang politik, maka tidak dianggap berbahaya bagi pemerintah.

Pada saat itu di kalangan masyarakat, dianggapnya telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tidak utuh dalam melaksanakan ajaran-ajaran Agama. Di samping itu dianggapnya pula para pemeluk agama Islam bersifat kaku dan ketinggalan dengan perkembangan zaman. Keadaan seperti itu menumbuhkan simpati bagi para pemeluknya, terutama di kalangan muda yang sudah mendapatkan pendidikan sistem barat. Bagi kalangan muda bahkan menganggap bahwa agama dan umat Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa (Alfian 1989 : 8).

Melihat hal-hal tersebut di atas Muhammadiyah merasa tergerak untuk memperbaiki dan memajukan ajaran agama Islam. Agama Islam tidak boleh dicampur-adukkan dengan ajaran-ajaran lain, sehingga tidak bersih dan tidak murni seperti tuntunan Al-Qur'an. Di samping itu Al-Qur'an tidak boleh dipandang sebagai hal yang kaku, melainkan bersifat "*fleksibel*" (luwes) dan terus mengikuti perkembangan zaman. Memang ada usaha-usaha dari pihak pemerintah untuk menghambat kemajuan. Sehingga Islam agar tetap bersifat "*Ortodok*" (kuno). Kalau Islam tetap ortodok, berarti pemerintah mudah untuk mengaturnya dan mudah diadu-domba. Dengan demikian politik "*divide et impera*" mudah diterapkan di dalam agama Islam, sehingga tidak terjadi persatuan dan kesatuan Islam.

Pola pikir para tokoh Muhammadiyah untuk memajukan agama Islam tersebut, akhirnya mereka termasuk sebagai penganut aliran modernist Islam. Tetapi ada yang beranggapan bahwa aliran modernist Islam itu, datangnya juga dari politik kolonial sendiri. Namun politik kolonial itu, sebenarnya menghendaki agar agama Islam tidak murni dan tidak utuh. Oleh karena itu, pihak pemerintah Belanda menghidup-hidupkan kepercayaan masyarakat yang tidak berlandaskan agama Islam. Ilmu-ilmu kebatinan, perbuatan musyrik dan bid'ah dipelihara.

sehingga di dalam tubuh organisasi Islam akan terjadi perpecahan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan terhadap Sarekat Islam, di mana pemerintah Hindia Belanda mengawasi secara ketat.

Walaupun perlakuan pemerintah Hindia-Belanda terhadap Muhammadiyah tidak seketat seperti pengawasan terhadap SI, namun kekhawatiran pemerintah tetap ada. Hal ini terbukti, ruang gerak Muhammadiyah tetap dibatasi. Terutama untuk fasilitas-fasilitas pendidikan, yang berupa gedung maupun kebutuhan-kebutuhan perlengkapan sekolah, pemerintah tidak memberi bantuan sama sekali. Karena pemerintah tahu bahwa pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah bersifat modern dan mengarah kepada pendidikan ilmiah yang tetap berdasar agama Islam. Sehingga dari pendidikan ini, pemerintah juga selalu mengadakan pengawasan secara teratur.

Sikap Muhammadiyah memang kooperasi, artinya mau menerima bantuan dari pihak pemerintah. Di samping itu, Muhammadiyah dalam programnya tidak mengarah kepada pergerakan politik, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. tetapi tujuan Muhammadiyah ingin memajukan masyarakat dalam bidang agama, agar kembali kepada yang asli sesuai perintah Allah swt., sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an. Ajaran-ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw., tetap dijadikan landasan pokok dan dijaga jangan sampai menyimpang. Oleh karena itu, untuk menjaga ajaran-ajaran tersebut, perlu adanya lembaga pendidikan agama yang berdasar Islam. Makin banyaknya sekolah-sekolah yang berlandaskan agama Islam, maka mudalah untuk menjaga kemurnian agama tersebut.

Akan tetapi untuk menciptakan tujuan seperti yang diharapkan, rupanya masih banyak kendala yang dihadapi. Antara lain belum tersedianya gedung sekolah, dana pendukungnya, lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Dengan demikian Muhammadiyah harus berusaha sendiri untuk menutupi atau melengkapi segala kebutuhannya itu. Berhubung anggota-anggota Muhammadiyah bersifat modern dan berwawasan luas, maka tidak sulit untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Para donatur dalam waktu singkat mudah didapatkan. Di samping itu, dari pihak pemerintah juga tidak menghambat usaha Muhammadiyah ini. Hal ini terbukti bahwa Muhammadiyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil

menghimpun dana untuk mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, Gedung-gedung Sekolah, Rumah Yatim Piatu, dan sebagainya.

Dengan berdirinya berbagai sarana sosial dan pendidikan tersebut, maka jelas bahwa Muhammadiyah mudah untuk menyalurkan cita-citanya, melalui sekolah-sekolah yang didirikan. Oleh karena itu, usaha untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan agama Islam, dapat terlaksana. Usaha dalam bidang sosial yang paling nyata di kalangan masyarakat, yaitu ditandai dengan berdirinya lembaga sosial bernama "**Pertolongan Kesengsaraan Umum**" (PKU) pada tahun 1923. Lembaga ini banyak bergerak di dalam bidang sosial, sedang lembaga pendidikan yang disebut "**Perguruan Muhammadiyah**" banyak bergerak di dalam bidang pendidikan. Inilah perjuangan Muhammadiyah yang secara konsisten dipegang teguh sampai sekarang, tidak mengarah kepada perjuangan di bidang politik.

BAB III

MASA PERGERAKAN NASIONAL MENCAPAI KEMERDEKAAN

A. Perjuangan Pemuda

Pergerakan Nasional untuk mencapai Indonesia Merdeka dikenal melalui tiga generasi, yaitu generasi '08, generasi '28 dan generasi '45. Tiga generasi perjuangan tersebut kesemuanya diawali oleh golongan pemuda. Dengan kata lain, bahwa ketiga generasi itu digerakkan oleh kaum muda. Namun pergerakan pemuda dari tiga generasi tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dalam langkah perjuangannya. Di bawah ini akan dapat diketahui tentang langkah yang ditempuh oleh golongan pemuda pada setiap generasi.

Pada generasi '08, yang ditandai dengan berdirinya Perkumpulan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar STOVIA di bawah pimpinan R. Soetomo. Gedung STOVIA adalah sebuah gedung yang merupakan tempat bertemunya para pemuda dari berbagai daerah, baik yang belajar di STOVIA maupun yang bukan pelajar STOVIA. Pemuda-pemuda tersebut tampak lebih mudah bergaul dan ada kebebasan keluar masuk gedung STOVIA setelah Budi Utomo berdiri. Terlebih-lebih setelah selesainya Kongres Budi Utomo Pertama tanggal 3 - 5 Oktober 1908 di Yogyakarta dan dibebaskannya R. Soetomo dari tuntutan para dosen STOVIA untuk dipecat dari sekolahnya. Direktur STOVIA dr. HF. Roll membela R. Soetomo, sehingga apa yang dituduhkan oleh para dosen itu dapat dijawab oleh dr. HF. Roll dengan baik, sehingga R. Soetomo tidak bisa dipecat dari STOVIA.

Melihat dan memperhatikan sikap dan langkah yang dilakukan oleh Direktur STOVIA tersebut, tampaknya mulailah para pemuda dari luar STOVIA memberanikan masuk ke gedung STOVIA dengan secara teratur. Makin lama terjadilah pergaulan antara pemuda dari berbagai daerah secara akrab. Pada mulanya hanya pemuda-pemuda dari Jawa saja yang menginginkan untuk berorganisasi. Hal itu disebabkan telah ada organisasi Budi Utomo, yang selanjutnya diambil alih kepengurusannya oleh golongan yang sudah dewasa atau golongan pejabat. Oleh karena itu, kaum mudanya ingin membentuk organisasi pemuda Jawa.

Pada tanggal 7 Maret 1915 di dalam gedung STOVIA, lahir organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan bernama "**Tri Koro Dharmo**", merupakan organisasi pemuda pertama. Tri Koro Dharmo berarti tiga tujuan mulia, berlambangkan "**keris**" yang bertuliskan "**Sakti, Budi, Bakti**".

Azas organisasi ini adalah :

1. menimbulkan pertalian antara murid-murid bumiputera pada sekolah menengah, dan kursus perguruan menengah (*uitgebreid*) dan sekolah vak;
2. menambahkan pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;
3. membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia. (Sartono Kartodirdjo 1975 - 195).

Para pendiri Tri Koro Dharmo adalah dr. Satiman Wirjosanjoyo, Kadarman, Sunardi dan beberapa pemuda lainnya yang kesemuanya berasal dari Jawa. Memang untuk sementara yang dapat diterima masuk menjadi anggota adalah para pemuda yang berasal dari Jawa dan Madura. Tetapi tujuan organisasi ini sebenarnya untuk mencapai **Jawa-Raya** dengan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok. Namun mengingat semakin banyak pemuda yang berminat masuk menjadi anggota, bahkan tidak saja pemuda dari Jawa dan Madura, melainkan juga dari berbagai pulau di Indonesia ini, maka akhirnya Tri Koro Dharmo membuka kesempatan pemuda-pemuda dari berbagai pulau.

Dengan kesempatan yang diberikan oleh Tri Koro Dharmo tersebut, ternyata banyak pemuda dari Sumatera masuk menjadi anggota Tri Koro Dharmo. Akan tetapi hal tersebut hanya terjadi untuk sementara. Ternyata pada saat itu masih diperlukan adanya semangat kedaerahan. Kalau Tri Koro Dharmo didorong oleh adanya organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo dan tidak cepat bergerak ke bidang politik, tidak demikian halnya bahwa para pemuda dari Sumatera ingin menonjolkan kedaerahannya bergerak di bidang sosial. Pada tanggal 9 Desember 1917 lahirnya organisasi pemuda dari Sumatera bernama "*Jong Sumatranen Bond*". Di antara pemuda-pemuda dari Sumatera tersebut terdapat Moh. Hatta dan Moh. Yamin. Kedua pemuda ini akhirnya terpilih sebagai pemimpin dalam organisasi pemuda itu.

Tampak organisasi pemuda kedaerahan tersebut sangat hati-hati dan tidak cepat bergerak ke arah politik. Hal ini rupanya mengambil pelajaran dari organisasi-organisasi sebelumnya, yaitu Budi Utomo yang mengawali pergerakannya melalui bidang sosial-budaya, ternyata selamat dari pengawasan pemerintah kolonial. Kemudian SI bergerak melalui bidang ekonomi dan meningkat ke bidang politik, ternyata mendapat pengawasan secara ketat oleh pemerintah, bahkan SI dicurigai dan pihak pemerintah berusaha memecah belah persatuan SI tersebut. Selanjutnya organisasi Indische Partij, di mana organisasi ini langsung bergerak dalam bidang politik. Setelah pemerintah mengetahui persis bahwa Indische Partij bergerak dalam bidang politik, maka secara cepat tidak diberi izin badan hukumnya. Bahkan ketiga pendirinya ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda.

Dari pengalaman tersebut, maka organisasi pemuda lebih menitik beratkan semangat kedaerahan. Dan pada waktu itu semangat kedaerahan masih sangat diperlukan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pergerakan untuk melawan penjajah tidak hanya dilakukan oleh pemuda Jawa saja, tetapi daerah-daerah lain juga ada rasa tidak senang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hanya dalam kesepakatan dan pengalaman dalam perjuangan, maka tidak lagi berjuang secara fisik, melainkan berjuang secara moral. Jadi tidak ada perang, melainkan harus semangat persatuan dan kesatuan yang dapat dibina melalui pendidikan. Oleh karena itu, pemuda-pemuda harus sekolah untuk memperoleh kecerdasan dan menambah wawasan.

Dengan berprinsip seperti tersebut di atas, maka pada tanggal 12 Juni 1918, nama Tri Koro Dharmo diubah namanya menjadi "**Jong Java**". Selanjutnya diikuti pemuda-pemuda dari daerah lain, dengan mendirikan organisasi pemuda sesuai dengan asal nama daerahnya. Sehingga muncul organisasi pemuda : **Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Ambon, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Timoresche Jongeren Bond**, dan lain-lain. Di samping pemuda-pemuda kedaerahan juga terdapat pemuda-pemuda yang bergerak dalam bidang agama. Dengan demikian, berdiri organisasi pemuda bernaftaskan Islam, yaitu "**Jong Islamieten Bond**" pada tahun 1924, didirikan oleh R. Moh. Cahya dan didukung oleh H. Agus Salim. Untuk Jong Islamieten Bond ini, sebenarnya sudah melangkah

ke arah perjuangan politik, karena anggota-anggotanya sudah lebih dewasa dan bertujuan untuk "**Persatuan berdasarkan Islam**", seperti yang diperjuangkan oleh **Partai Sarekat Islam**.

Sampai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Pertama pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926, semangat kedaerahan tersebut masih dipertahankan secara kuat. Sehingga dalam kongres tersebut belum menghasilkan kebulatan pendapat, terutama masalah "*fusi*" (penggabungan) organisasi pemuda menjadi satu wadah dan masalah "**bahasa persatuan**". Juga langkah perjuangannya masih sangat hati-hati, dan belum berani melangkah perjuangan dalam bidang politik. Dengan demikian organisasi pemuda masih bersifat kedaerahan dan jumlahnya cukup banyak. Dalam Kongres Pemuda Pertama itu di bawah pimpinan Moh. Tabrani, sedang organisasi-organisasi pemudanya akhirnya juga menghasilkan tokoh-tokoh terkenal, seperti Ir. Sukarno, Abdullah Sigit, dr. Sukiman dari Jong Java, Amir Sjarifuddin dan STG. Mulia dari Jong Batak, Moh. Hatta dan Moh. Yamin dari Jong Sumatranen Bond, Arnol Mononutu dari Jong Celebes, Sam Ratulangi dari Jong Minahasa, Herman Johannes dari Tomoresche Jongeran Bond, Moh. Husni Thamrin dari Pemuda Kaum Betawi, J. Leimena dari Jong Ambon, dan sebagainya.

Walaupun mereka ini, pada mulanya masih mempertahankan sifat kedaerahan, namun ternyata pandangan ke depan cukup luas. Faham **Nasionalisme** sebagaimana yang telah dikemukakan menurut **Ernest Renan** telah dipelajarinya. Oleh karena itu, mengenai kebulatan pendapat untuk pembentukan organisasi pemuda "**satu wadah**" dan yang bersifat nasional itu, tinggal menunggu waktu saja.

Para pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan itu, mencoba untuk menggabungkan berbagai aspirasi dan pendapat, agar segala perbedaan suku, budaya (adat), kepercayaan maupun agama, tidak menjadi permasalahan. Maka dibentuklah "**Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia**" (PPPI) pada tahun 1926 di Jakarta di bawah pimpinan Moh. Abdullah Sigit. Dan dari pemikiran yang timbul dari PPPI itu, berhasil mendirikan wadah pemuda dalam satu organisasi, yaitu "**Jong Indonesia**" terbentuk pada tanggal 20 Februari 1927 di Bandung. Kemudian Jong Indonesia dalam kongresnya pada bulan Desember 1927 bersepakat mengubah nama organisasinya menjadi

"Pemuda Indonesia" dan panjinnya berwarna "**merah putih berkepala banteng**".

Kemudian pada generasi '28, yang ditandai dengan tercetusnya "**Sumpah Pemuda**" dari hasil kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dalam generasi ini sudah berani menggunakan pemikiran politik secara terbuka. Hal ini karena dipengaruhi oleh kejadian-kejadian sebelumnya, antara lain ialah :

1. pemberontakan PKI yang gagal, mengakibatkan banyaknya para tokoh pergerakan nasional baik komunis maupun non-komunis ditangkap, dipenjara ataupun dibunuh dan yang tidak tertangkap tidak berani melakukan kegiatan, sehingga seolah-olah pergerakan nasional "*vacuum*" untuk sementara;
2. munculnya pergerakan pemuda-pemuda yang bersikap *kooperatif* (mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda) yang tergabung dalam "*Indonesische Studieclub*" di bawah pimpinan Dr. Soetomo dan pemuda-pelajar yang bersikap *non-kooperatif* (tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda) yang tergabung dalam "*Algemene Studieclub*" di bawah pimpinan Ir. Sukarno. Pemuda-pemuda ini bergerak untuk mengisi ke-vacum-an;
3. banyaknya para anggota Perhimpunan Indonesia (PI) yang pulang dari negeri Belanda, karena di Eropa merasa tidak aman dan dikejar-kejar oleh pemerintah di *Nederlandsch*, akibat pemberontakan PKI yang gagal pada tahun 1926. Di samping itu juga pulang, karena sudah menyelesaikan studinya;
4. berdirinya partai-partai politik yang melancarkan pergerakan melalui *kooperatif* dan *non-kooperatif* sejak tahun 1927, dan sebagainya.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka para pemuda memiliki wawasan politik kebangsaan secara luas. Masalah-masalah yang menjadi hambatan pada waktu Kongres Pemuda Pertama diteliti kembali. Kebanyakan pemuda-pelajar yang tergabung dalam pergerakan dengan menempuh jalan kooperatif adalah para pemuda-pelajar yang termasuk "old elite" (elit lama) mengikuti jejak Dr. Soetomo. Sedangkan para pemuda-pelajar yang tergabung dalam pergerakan dengan menempuh jalan non-kooperatif adalah para pemuda-pelajar yang termasuk "new elite" (elite baru) mengikuti jejak Ir. Sukarno. Namun meskipun tampak

ada dua cara yang ditempuh pergerakan pemuda-pelajar itu, tujuannya tetap sama, yaitu ingin "**mencapai Indonesia Merdeka**"

Pergerakan pemuda-pelajar tersebut tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga dilakukan di luar negeri, bahkan ada di negeri yang menjajahnya, yaitu negeri Belanda. Pergerakan pemuda-pelajar di negeri Belanda itu bernama Perhimpunan Indonesia yang sejak tahun 1926 dipimpin oleh Moh. Hatta. Para pemuda ini memiliki pengalaman secara internasional, karena seringnya mengikuti "**Konfrensi Internasional**" di Eropa untuk **menentang Imperialisme dan Kolonialisme**. Dari pengalaman inilah, merupakan modal yang sangat berharga untuk menunjang perjuangan, dalam rangka mencapai Indonesia Merdeka. Sehingga setelah kembali ke tanah air dapat terpadu dengan cita-cita perjuangan nasional, yang mengakibatkan pergerakan pemuda lebih mantap dan terarah.

Sementara itu, kesadaran nasional menjelang **Sumpah Pemuda** benar-benar tertanam di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini tampak jelas terutama para pemuda ada kecenderungan untuk meninggalkan sifat kedaerahan. Semua yang masih bersifat kedaerahan dengan rela dikesampingkan, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam persidangan nanti. Dengan belajar dari **Kongres Pemuda Pertama** bahwa masalah kedaerahan ternyata menjadi ganjalan, karena masing-masing masih mempertahankan sifat kedaerahan itu sangat kuat. Tetapi pada saat ini, hal yang menjadi gamjalan itu disadari benar. Oleh karena itu dalam pembahasan untuk menuju persatuan dan kesatuan tidak mengalami kesulitan.

Masalah persiapan kongres, telah lama dibahas oleh berbagai wakil dari organisasi pemuda kedaerahan, yaitu PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Pemuda Indonesia, dan sebagainya. Akhirnya pada bulan Juni 1928, persiapan Kongres Pemuda Kedua telah tersusun, sebagai berikut :

- Ketua : Sugondo Djojopuspito dari PPPI, mahasiswa Fakultas Hukum;
- Wakil Ketua : Djoko Marsaid dari Jong Java, mahasiswa Fakultas Hukum;

- Sekretaris : Moh. Yamin dari Jong Islamieten Bond;
- Bendahara : Amir Sjarifuddin dari Jong Bataks Bond;
- Pembantu I : Djohan Moh. Tjai dari Jong Islamieten Bond;
- Pembantu II : Kotjo Sungkono dari Pemuda Indonesia;
- Pembantu III : Senduk dari Jong Celebes;
- Pembantu IV : J. Leimena dari Jong Ambon;
- Pembantu V : Rohjani dari Pemuda Kaum Betawi.

(Sutrisno Kutuyo 1970 : 50).

Tampak dalam susunan kepengurusan tersebut, terdiri dari para pemuda-pelajar yang berwawasan politik. Banyaknya pemuda-pelajar yang pernah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, yang kemudian juga ikut dalam pembicaraan persiapan Kongres Pemuda Kedua, maka sedikit banyak akan memberikan arah dan tujuan kongres tersebut. Dengan demikian keputusan akan mudah diambil.

Di samping segala persiapan telah tersusun dengan baik, arah dan tujuan telah ada satu titik pandang, maka para pembicara dalam Kongres Pemuda Kedua itu dengan mudah untuk menyampaikan isi pokoknya. Kongres berlangsung tanggal 27-28 Oktober 1928, dengan tiga kali sidang, yaitu sidang pertama di Gedung "*Katholiek Jongelingenbond*" (Katedral-Lapangan Banteng sekarang), sidang kedua di Gedung "*Oost Java Bioscoop*" (Jl. Medan Utara No. 14) dan sidang ketiga di Gedung "*Indonesich Clubgebouw*" (Jl. Kramat Raya No. 106 sekarang). Jadi sejak hari Sabtu (malam) sampai dengan Minggu (malam).

Pemrasaran pada sidang pertama ialah Moh. Yamin tentang "**Persatuan dan Kebangsaan Indonesia**". Pemrasaran pada sidang kedua ialah Nona Purnomo Wulan tentang "**Pendidikan Wanita**" dan S. Mangunsarkoro, Sarwono, Ki. Hajar Dewantoro tentang "**Pendidikan Nasional**". Pemrasaran pada sidang ketiga ialah Ramelan tentang "Perihal Kepanduan" dan Mr. Sunario tentang "**Pergerakan Pemuda dan Pemuda Internasional**".

Tampak mengenai judul yang akan dibahas tersebut di atas, kesemuanya telah menunjukkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, apabila negara telah merdeka. Rasa persatuan dan kesatuan

menjadi pokok permasalahan dalam pembicaraan itu. Dalam pembicaraan tidak ada yang menunjukkan sifat kedaerahan lagi, dan kesemuanya mengarah kepada terbentuknya negara kesatuan. Sehingga dalam keputusan Kongres Pemuda Kedua, sangat jelas dan tegas, bahwa antara yang hadir merasa ada satu ikatan, yaitu "**Ikrrar Pemuda**".

Secara lengkap **Keputusan Kongres Pemuda Kedua** pada tanggal 28 Oktober 1928, dibicarakan oleh Ketua Kongres (Sugondo Djojopuspito) sebagai berikut :

"Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan:

- **Pertama** : kami putra dan putri Indonesia, mangaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia;
- **Kedua** : kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia;
- **Ketiga** : kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya : "**kemauan, sejarah, hukum adat, pendidikan dan kepanduan**".

"Kerapatan juga mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disebarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita." (**Persatuan Indonesia**, Koleksi Perpustakaan Nasional 1928 : 1-2).

Dalam keputusan itu, pada mulanya disebut "Ikrrar Pemuda", tetapi untuk selanjutnya lebih terkenal dengan "**Sumpah Pemuda**". Hal ini disebabkan, bahwa isinya banyak diilhami oleh jiwa dan semangat "**Sumpah Palapa**". Gajah Mada, yang pada masa kerajaan Majapahit bertujuan untuk menyatukan "**Nusantara**". Jadi persatuan dan kesatuan bangsa, dapat disamakan dengan persatuan dan kesatuan seperti jaman kejayaan Majapahit. Walaupun sebenarnya pengertian negara pada masa kerajaan Majapahit dengan negara Indonesia Merdeka (RI), ada perbedaan. Negara kerajaan Majapahit termasuk **nasional tradisi**,

sedangkan RI termasuk negara **nasional modern** (*nation state* = negara kebangsaan).

Namun demikian, sepantasnya harus dihargai bahwa dalam proses penyatuan dari berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional merupakan suatu proses **integrasi** yang nilainya sangat dalam. Hal ini berlaku apa yang telah dikemukakan oleh **teori nasionalisme** dari seorang pujangga Perancis bernama **Ernest Renan**, yang intinya adalah bahwa **rasa senasib dan sepenanggungan suatu bangsa menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk suatu negara kebangsaan**. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sejak selesainya kongres Pemuda kedua tersebut, organisasi-organisasi pemuda kedaerahan mulai memproses untuk "bersatu menjadi satu wadah", dan baru berhasil secara tuntas, yaitu pada tanggal 31 Desember 1930 dengan nama organisasi "**Indonesia Muda**".

Perlu dicatat bahwa dalam kongres itu juga berhasil dikumandangkannya gesekan Lagu Indonesia Raya oleh sang penciptanya, yaitu **Wage Rudolf Supratman**. Lagu itu cukup dengan gesekan biola saja, karena telah dipertimbangkan tentang isinya dan situasi waktu itu, memang tidak memungkinkan. **Isinya** sangat **heroik** dan **situasi** masih dalam pengawasan *PID* (*Politieke Inlichtingen Dienst*) secara ketat. Sehingga Ketua Kongres mempersilakan W.R. Supratman mengumandangkan lagu Indonesia Raya tanpa syair dan dilakukan sebelum keputusan kongres dibacakan. Sebab dalam kongres itu, juga hadir **Van Der Plas** dan *PID* yang sengaja ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Selanjutnya pada generasi '45, bahwa generasi ini ditandai dengan dicetuskannya "**Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**" tanggal 17 Agustus 1945 di Gedung Pegangsaan Timur No.56 (sekarang Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta).

Mengenai proses tercetusnya "**Proklamasi**" tersebut memang memerlukan perjuangan sangat berat. Seperti yang sudah disebutkan di bagian depan bahwa pergerakan pemuda sampai dengan tercetusnya "**Sumpah Pemuda**" memerlukan sikap yang hati-hati, terutama dalam melangkah perjuangan di bidang politik.

Hal itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak tahun 1929, di mana pada saat itu telah terjadi **perlombaan senjata**, akibat dari situasi

dunia telah terjadi saling curiga-mencurigai antara negara satu dengan negara lain. Dengan demikian timbul "**politik mencari kawan**" dan terjadilah dua blok kekuatan besar, yaitu **blok sekutu** di satu pihak dan blok *fascis (nazi)* di lain pihak. Ternyata Belanda menentukan pilihan masuk blok sekutu. Dengan perhatian masing-masing negara yang sangat menitik beratkan terhadap ancaman dari negara lain, maka keadaan perekonomian terabaikan. Akibatnya terjadilah "**malaise (krisis) ekonomi dunia**". Kejadian ini berlangsung cukup lama, sehingga pihak Belanda juga mengikuti perubahan-perubahan, baik kebijaksanaan di pemerintahan Nederlandsch maupun pemerintahan di negeri jajahan, yaitu Hindia-Belanda.

Di Hindia-Belanda terjadi penggantian Gubernur Jenderal *De Graeff* (1926 - 1931) diganti Gubernur Jenderal *De Jonge* (1931 - 1936). Gubernur Jenderal *De Jonge* ini bertindak keras dan sangat reaksioner. Akibatnya pergerakan pemuda dan pergerakan politik, sulit untuk memperjuangkan cita-citanya. Keadaan demikian berlangsung terus sampai dengan penggantian Gubernur Jenderal yang baru, yaitu *Carda van Starckenborgh Stachouwer* (1936-1942), sampai saat penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Gubernur Jenderal baru ini bersifat kaku dan penuh keangkuhan. Semua yang menjadi keinginan rakyat di negara jajahan tidak mendapat perhatian sama sekali. Dalam kondisi yang demikian, maka sikap para pemuda acuh tak acuh terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebaliknya pengaruh **Barisan Propaganda** Jepang sudah mulai di Asia, dan bagi rakyat Indonesia termasuk pemudanya, sangat mengharapkan kedatangan Jepang di Indonesia.

Pergerakan pemuda pada masa pendudukan Bala Tentara Jepang diwarnai dengan pergerakan politik dan telah dibekali dengan pendidikan militer. Pergerakan pemuda tersebut berjalan seiring dengan pergerakan nasional yang banyak dilakukan oleh kaum pergerakan nasional. Oleh karena itu, uraian tentang perjuangan pemuda generasi '45, akan disatukan dengan uraian tentang peranan organisasi politik di bagian belakang.

B. Perjuangan Wanita

Perjuangan **Emansipasi** yang telah dilakukan oleh R.A. Kartini

sebenarnya tidak ditujukan untuk kepentingan wanita saja. Karena apabila dikaji lebih jauh, sebenarnya dengan kemajuan kaum wanita itu juga mengarah kepada kemajuan bangsa. Bahkan Kartini telah berangan-angan untuk menyadarkan bangsanya dari kehidupan yang gelap, artinya masih dalam cengkeraman penjajah, agar segera bangkit untuk menuju kehidupan yang terang, yang berarti membangun bangsa dalam situasi negara merdeka.

Hal itu telah disebutkan oleh Susanto Tirtoprodjo, yang berbunyi sebagai berikut :

"bahwa Ibu Kartini sudah memasukkan dalam angan-angannya *nationaal bewustzijn* (kesadaran berbangsa) alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan didikan. Karena inilah yang akan membawa bahagia baginya". (Armin Pane 1968 : 112).

Jadi jelas bahwa Kartini menitik beratkan pendidikan untuk memajukan bangsanya. Hal ini sangat tepat, karena dengan pendidikan akan membawa pengaruh sangat luas. Orang akan menjadi cerdas, memiliki wawasan jauh ke depan, dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Dengan demikian rintisan Kartini tersebut tepat dan dapat dipergunakan dalam perjuangan untuk menghadapi sistem kehidupan kolonial, yang ternyata membuat masyarakat Indonesia menjadi keterbelakangan, kesengsaraan dan kebodohan. Itulah yang dirasakan dalam kehidupan pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Dengan kesadaran seperti tersebut di atas, maka kaum wanita tidak tinggal diam. Sejak kaum pria bangkit untuk menentang penjajahan, dalam bentuk perjuangan moral, maka kaum wanita bangkit pula. Perjuangan moral ini tidak menggunakan kekuatan fisik, melainkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diawali oleh Perkumpulan Budi Utomo yang bergerak melalui bidang sosial-budaya. Walaupun Budi Utomo pada mulanya bersifat organisasi lokal di Jawa, namun tidak lama kemudian meningkat ke luar P. Jawa, yaitu Sumatera, Sulawesi, Maluku dan lain-lain, di mana di daerah-daerah tersebut didirikan cabang Budi Utomo. *Studiiefonds* (dana pendidikan) digalakkan.

Di Jakarta pada tahun 1912, berdiri organisasi **Puteri Mardika**

atas prakarsa Budi Utomo. Pada tahun itu pula atas prakarsa Ny. Van Deventer (penganjur Politik Etis) didirikan "**Kartini Fonds**" (Dana Kartini). Organisasi-organisasi wanita ini berkembang secara pesat, bertujuan perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga, serta peningkatan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Mengenai ketrampilan khusus wanita, juga mendapat perhatian secara baik, terutama jahit-menjahit, menenun dan merawat kesehatan anak. Duduk dalam kepengurusan Puteri Mardika, yaitu : R.A. Sabarudin, R.A. Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo. (Kowani 1978 :16).

Setelah berdiri organisasi wanita tersebut, ternyata di daerah-daerah lain juga berdiri organisasi wanita dengan tujuan yang sama. Di antara organisasi-organisasi wanita di daerah itu, yang tampak lebih menonjol ialah "**Kautamaan Istri**" di Tasikmalaya didirikan tahun 1913, dan kemudian diikuti dengan "**Kautamaan Istri**" di Sumedang (1916), Cianjur (1916), Ciamis (1917), Cicurug (1918), Kuningan (1922), dan Sukabumi (1926). Bahkan pada tahun 1915 "**Kautamaan Istri**" juga berdiri di Padang Panjang, atas prakarsa seorang lulusan Kautamaan Istri di Jawa Barat.

Kalau di Jawa Barat, muncul **Dewi Sartika** sebagai tokoh wanita yang banyak mengikuti jejak R.A. Kartini, tidak ketinggalan juga **Rohanah Kudus** yang pada tanggal 11 Februari 1914 mendirikan "**Kerajinan Amai Setia (KAS)**" di Kota Gedang, Sumatera Barat. Sekolah Kartini didirikan di Semarang dan Jakarta (1913), Madiun (1914), Malang dan Cirebon (1916), Pekalongan, Surabaya, dan Rembang (1917). Sedangkan di Jepara lebih awal telah didirikan Sekolah Kartini, yang dipimpin langsung R.A. Kartini dan saudara-saudaranya.

Sejak tahun 1917, mulai berdiri organisasi politik dan tidak ketinggalan pula wanita ikut terjun dalam perjuangan menuju cita-cita Indonesia Merdeka. Oleh karena itu banyak berdiri organisasi wanita yang mengarah ke perjuangan di bidang politik. Sepertinya **Sarekat Siti Fatimah** di Garut, berdiri pada tahun 1918, yang merupakan bagian dari Sarekat Islam (SI). **Wanodyo Utomo** di Yogyakarta berdiri pada tahun 1920, yang akhirnya menjadi **Sarekat Putri Islam** (1925). Pada tahun 1920 berdiri "**Gorontaloosche Mohamed-**

daansche Sumatra" di Bukit Tinggi dan **Nahdatul Fa'at** sebagai bagian dari **Wal Fadjri**.

Tidak kalah pentingnya dan perlu dicatat, yaitu pada tanggal 22 April 1917 Perguruan Muhammadiyah mendirikan "**Aisyiyah**" di Yogyakarta dan 8 Juli 1917 didirikan "**PIKAT**" (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) oleh Maria Walanda Maramis di Manado. Pada tahun 1921 di Yogyakarta didirikan "**Wanita Utomo**" dan tahun 1924 didirikan "**Wanita Katholik**" juga di kota tersebut.

Kalau pergerakan wanita tersebut masih bergerak di bidang sosial-budaya dan sosial-religius, maka di daerah Maluku, yaitu di Ambon telah berdiri organisasi wanita yang bergerak dalam bidang kemiliteran dan politik bernama "**Ina Tuni**", yang berdiri pada tahun 1927. Organisasi wanita ini merupakan bagian dari **Sarekat Ambon** yang berjuang bersama-sama dengan kalangan militer Ambon.

Pergerakan wanita antara tahun 1920-1927, mulai tegas, bahkan ada yang ingin melangkah ke arah pergerakan politik, seperti Ina Tuni, dan pergerakan wanita yang merupakan bagian dari partai-partai politik, yaitu PSI, PKI, PNI dan **Permi** (Persatuan Muslimin Indonesia). Sedangkan yang tetap bergerak dalam bidang sosial-budaya, yaitu JJM (*Jong Java Meinsjeskring*), WTS (**Wanita Taman Siswa**), JIBDA (*Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling*) dan **Putri Indonesia**. Kemudian menjelang Sumpah Pemuda, yaitu tahun 1928 berdiri organisasi-organisasi wanita "**Perti**" (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan DHE (Dameskransje Help Elkander) di Jakarta. Untuk DHE ini terus berubah namanya menjadi organisasi wanita "**Sahati**". Di samping itu juga pada tahun yang sama berdiri organisasi wanita "**Putri Setia**" di Manado".

Sejalan dengan pergerakan pemuda, maka setelah terjadinya Kongres Pemuda Kedua, para kaum wanita juga mengadakan suatu **Kongres Perempuan Indonesia I** pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Pendopo Joyodipuran, Yogyakarta. Adapun Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia I, sebagai berikut :

- Ketua : Ny. R.A. Sukonto dari Wanita Utomo;
- Wakil Ketua : Nn. St. Mudjinah dari Aisyiyah;
- Penulis I : Nn. St. Sukaptinah (Ny. Sunaryo Mangunpuspito) dari JIBDA;

- Penulis II : Nn. Sunaryati (Ny. Sukemi) dari Putri Indonesia;
- Bendahara I : Ny. Hardjodiningrat dari Wanita Kahtolik;
- Bendahara II : Nn. R.A. Suyatin (Ny. Kartowiyono) dari Putri Indonesia;
- Anggota-anggota : Nyi. Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa;
 Ny. Drijowongso dari Wanita PSII;
 Ny. Muridan Noto dari Wanita PSII;
 Ny. Umi Salamah dari Wanita PSII;
 Ny. Djohanah dari Aisyiyah;
 Ny. Badiah Muryati dari Jong Java Dames Abdeeling;
 Nn. Hajinah (Ny. Mawardi) dari Aisyiyah;
 Nn. Ismudijati (Ny. A. Saleh) dari Wanito Utomo;
 Ny. R.A. Mursandi dari Wanita Katholik;

Sedangkan yang hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia I terdiri dari wakil-wakil organisasi. Kongres mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan Wanita Indonesia;
2. Supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban keperluan dan kemajuan wanita.

Keputusan-keputusan kongres, sebagai berikut :

1. Mendirikan badan federasi bersama, bernama PPPI (**Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia**);
2. Menerbitkan Surat Kabar yang redaksinya dipercayakan kepada PPPI;
3. Mendirikan Studiefonds, untuk menolong gadis-gadis yang tidak mampu;
4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri;
5. Mencegah perkawinan anak-anak;
6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar :

- secepatnya mosi diadakan fonds bagi janda dan anak-anak
 - tunjangan bersifat pensiun (onderstand) jangan dicabut
 - sekolah putri diperbanyak.
7. Mengirimkan mosi kepada **Raad Agama**, agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. (Kowani 1978 : 33-34).

Setelah terjadi Kongres Perempuan Indonesia I itu, kegiatan selanjutnya secara rutin dapat berjalan secara baik. Hubungan antar organisasi lebih dipererat, terutama kegiatan PPPI yang merupakan wadah dari organisasi gabungan itu, memiliki fungsi dan peranan sangat besar. Hal ini tampak dalam membahas untuk persiapan **Kongres Perempuan Indonesia II**, sudah mengarah kepada tujuan dan sasaran yang lebih tegas. Dalam persiapan Kongres Perempuan Indonesia II, dijelaskan tentang **maksud kongres** adalah :

- merapatkan persaudaraan antara organisasi-organisasi wanita Indonesia untuk memperbaiki nasib kaum wanita Indonesia dan rakyat Indonesia umumnya.

Sedangkan dasar kongres adalah sebagai berikut :

- Kenasionalan, kesosialan, kenetralan, dan keperempuanan.

Kalau dibandingkan dengan kegiatan kaum pemuda dan kaum pergerakan nasional, maka kegiatan kaum wanita lebih terbuka dan tampak berjalan dengan lancar. Sedangkan kegiatan kaum pemuda dan kaum pergerakan nasional lebih hati-hati dan mendapat pengawasan dari pihak pemerintah kolonial secara ketat sedangkan pergerakan wanita tidak ketat. Hal itu terbukti bahwa hampir seluruh program yang telah dicanangkan kongres dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pada tanggal 20-24 Juli 1935 berhasil menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Keputusan-keputusan dalam kongres tersebut ternyata sangat menyentuh dalam kehidupan berorganisasi untuk perjuangan wanita jauh ke depan, yaitu mengenai :

1. Dibentuk badan perikatan dengan nama "**Kongres Perempuan Indonesia**" (saat ini disebut KOWANI);
2. Tiap-tiap tiga tahun sekali diadakan Kongres Perempuan (sampai saat ini tetap dipakai sebagai pedoman KOWANI);

3. Pencanaan tentang kewajiban utama wanita Indonesia ialah menjadi "**Ibu Bangsa**", yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya (sampai saat ini tetap diperingati, bahwa setiap tanggal **22 Desember** diadakan peringatan "**Hari Ibu**").

Dengan demikian jelas bahwa pada saat pemerintah Hindia Belanda menghadapi kesulitan ekonomi, karena antara tahun 1929-1933 sedang terjadi "**Krisis Ekonomi Dunia**", maka perhatian pemerintah di bidang ekonomi lebih besar. Sebaliknya perhatian pemerintah di bidang politik rendah. Kaum wanita lebih mendapat kebebasan, sedangkan kaum pria lebih ditekan. Sikap Gubernur Jenderal De Jonge terhadap pergerakan nasional sangat kejam, karena dianggapnya semua yang dilakukan oleh kaum pergerakan nasional hanya akan mengganggu usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Oleh karena itu sikap pemerintah terhadap kaum pergerakan nasional acuh-tak acuh dan semua yang diusulkan oleh pihak kaum pergerakan nasional ditolak. Banyak kaum pergerakan nasional ditangkap dan dijebloskan dalam penjara.

Melihat perlakuan pemerintah yang demikian itu, kaum wanita juga ikut merubah taktik perjuangannya. Yaitu dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional, baik yang dilancarkan dalam **Mosi Soetardjo** (1936) dan tuntutan GAPI (1939) tentang "**Indonesia Berparlemen**". Hal ini sudah tampak pada waktu diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung dan Kongres Perempuan Indonesia IV di Semarang. Dalam kongres-kongres tersebut, dijelaskan bahwa maksud dan dasar kongres tetap sama, yaitu "merapatkan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia, untuk menguatkan usaha memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya".

Untuk selanjutnya setelah masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia, karena Jepang hanya menitik beratkan untuk menghadapi perangnya terhadap **Pasukan Sekutu**, maka pada masa Jepang seluruh organisasi politik dilarang. Sejalan dengan itu pula, maka kegiatan kaum wanita dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dapat bekerja sama secara baik dengan kaum pria. Ada yang berperan di garis depan dan ada yang berperan di garis belakang.

Yang di garis depan ikut latihan baris-berbaris dan kemiliteran, akhirnya lahir "**Barisan Srikandi**" atau pun kelaskaran wanita lainnya. Kemudian yang di garis belakang, aktif bekerja di dapur umum dan palang merah. Dengan demikian kaum wanita ikut berperan aktif dalam setiap perjuangan dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia.

C. Peranan Pendidikan

Sebelum pelaksanan **Politik Etis** (1902), di Indonesia sudah ada pendidikan agama, adat maupun pendidikan non-formal, yang sifatnya masih tradisional dan menghasilkan orang-orang yang berwawasan sempit. Pendidikan semacam itu **statis** dan kurang berorientasi ke masa depan. Akibatnya tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1902, belum banyak memberikan pendidikan kepada orang-orang Indonesia. Pada waktu terjadi wabah penyakit di daerah Purwokerto, Banyumas tahun 1847, pemerintah Hindia Belanda mulai tergerak untuk mengadakan pemberantasan penyakit yang dinilai berbahaya. Karena penyakit yang sedang melanda di daerah Banyumas itu, termasuk penyakit menular (tiphus, kolera, desentri, dan sebagainya), yang waktu itu masih sulit diobati dengan obat tradisional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengikutsertakan para pemuda untuk melakukan pemberantasan penyakit tersebut. Namun para pemuda itu terlebih dahulu harus dibekali ketrampilan dalam hal menyuntik. Diadakanlah kursus "**Juru Suntik**" secara cepat dan para lulusan kursus akan diangkat menjadi penyuluh kesehatan di daerah-daerah asal mereka masing-masing. Untuk di daerah Purwokerto-Banyumas itu, memang dijadikan sebagai tempat praktek awal. Setelah itu para penyuluh kesehatan, terus ditugaskan di daerahnya masing-masing dan diangkat sebagai pegawai pemerintah.

Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di daerah Purwokerto tersebut, maka pemerintah Hindia-Belanda berusaha meningkatkan ketrampilan para penyuluh kesehatan agar mempunyai ilmu tentang kedokteran. Mulailah direncanakan pendidikan kedokteran dengan sistem pendidikan 3 tahun. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Pemerintah No.3 Tahun 1856 tertanggal 11 Mei 1856. Kepada para lulusan sekolah tersebut diberikan gelar "**Dokter Jawa**". Oleh karena itu sekolahnya disebut "**Sekolah Dokter Jawa**".

Sebagai Direktur Sekolah Dokter Jawa I adalah **dr. P. Bleeker** (Opsir Kesehatan Klas I Rumah Sakit Militer Weltewreden). Dia menjabat Direktur dari tahun 1851-1860.

Syarat-syarat untuk diterima sebagai murid Sekolah Dokter Jawa adalah sebagai berikut :

1. pada prinsipnya masih sama dengan waktu menerima sebagai murid kursus Juru Suntik/Juru Kesehatan, yaitu pemuda Jawa dari lingkungan keluarga baik-baik, bersopan santun, pandai berbahasa Melayu, bisa menulis dan membaca huruf Jawa dan berbakat;
2. jumlah yang diterima sebanyak 30 orang pemuda, tetapi sejak tahun 1856 tidak hanya terdiri dari pemuda Jawa, melainkan juga diterima pemuda dari luar Jawa sebanyak 6 orang. Dengan demikian terinci seperti di bawah ini :
 - pemuda Jawa : 24 orang
 - pemuda Sumatra Barat : 2 orang
 - pemuda Minahasa : 2 orang
 - pemuda dari pulau lain : 2 orang (Hadisutjipto 1973:7).

Dengan persyaratan yang tercantum seperti tersebut di atas, sehingga mutu lulusan Sekolah Dokter Jawa, masih seperti juru suntik saja. Oleh karena itu, muncul berbagai saran atau usul-usul dari berbagai pihak. Terutama dari kalangan dokter sendiri. Antara lain masalah : lama pendidikan harus ditambah, ujian praktek harus diadakan secara intensif dan sarana pendidikan harus ditambah, serta gedungnya diperluas dan terpisah dengan rumah sakit.

Usul tersebut dengan rinci disampaikan oleh para Direktur Sekolah Dokter Jawa, yaitu sejak dr. C. Eijkman (1888-1896) dan diteruskan oleh Direktur berikutnya, yaitu dr. HF. Roll (1896-1899). Kemudian diterima oleh pemerintah Hindia-Belanda, akhirnya dimulailah membangun gedung baru. Pembangunan dimulai pada tahun 1899, tetapi mengalami kemacetan karena kekurangan dana. Setelah ada bantuan dari pihak swasta, maka pembangunan baru dapat diteruskan sampai selesai. Pada saat pembangunan gedung sedang berjalan, nama Sekolah Dokter Jawa juga mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1900 berubah menjadi *STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen)*. Adapun tempat pendidikan STOVIA masih berada

di dalam RumahSakit Militer Weltewreden. Baru pada tahun 1902 dilakukan pembukaan dan peresmian menempati gedung yang baru dibangun itu. Sebagai Direktur STOVIA I adalah dr. HF. Roll, yaitu dari tahun1901-1908. Dengan demikian pada saat lahirnya Perkumpulan Budi Utomo dan juga sampai berlangsungnya Kongres Budi Utomo I tanggal 3-5 Oktober 1908, yang menjabat Direktur STOVIA masih dr. HF. Roll. Hal ini terbukti pada waktu R. Soetomo diancam oleh para dosen STOVIA untuk dipecat dari STOVIA, dr. HF. Roll masih bertindak sebagai pembela R. Soetomo dan berhasil meredam kemarahan para dosen tersebut. Sehingga R. Soetomo tidak berhasil dikeluarkan dari STOVIA.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya pendidikan sisitem Barat, baik sejak Sekolah Dokter Jawa (1856) sampai dengan STOVIA (1908), peranan pendidikan cukup besar. Dari lulusan Sekolah Dokter Jawa, sepertinya dr. Wahidin Soediro Husodo mencetuskan "*studiefonds*" (dana pendidikan) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dari para pelajar STOVIA di bawah pimpinan R. Soetomo berhasil mendirikan organisasi "**pergerakan nasional pertama**", yaitu Budi Utomo. Itu semua sangat positif dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional. Karena setelah Budi Utomo berdiri, tidak lama kemudian berdiri pula organisasi pergerakan nasional lainnya yang mengikuti jejak dan cara berorganisasi seperti Budi Utomo itu.

Sebenarnya pihak pemerintah Hindia-Belanda, sejak awal telah memperhitungkan dampak dari penerapan pendidikan sistem Barat di negeri jajahan. Dengan secara hati-hati, **diskriminasi** dan sangat **selektif** pendidikan itu diberikan kepada rakyat Indonesia. Hanya anak golongan bangsawan dan Belanda keturunan, serta anak-anak keturunan Timur Asing (Cina dan Arab), yang mendapatkan pendidikan sistem Barat. Namun demikian, walaupun hanya sebagian kecil rakyat Indone-sia yang mendapatkan pendidikan sistem Barat, ternyata menghasilkan kaum **elit-intelektual**. Kaum elit-intelektual ini banyak yang memiliki rasa kesadaran nasional, harga diri dan wawasan luas. Inilah benih-benih penggerak perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka. Makin tahun kaum elit-intelektual itu makin bertambah banyak, sehingga menimbulkan pergerakan nasional yang lebih mantap.

Disadari atau tidak, sebenarnya munculnya kaum elit-intelektual itu, ditimbulkan oleh **kaum liberalisme Belanda** yang dengan gigih memperjuangkan perbaikan taraf hidup rakyat di negeri jajahan. Hal itu dilakukan sebagai "**balas jasa**", karena dinilainya bahwa rakyat di negeri jajahan telah mendatangkan keuntungan yang sangat banyak dalam pelaksanaan "*Cultuur Stelsel*" (Tanam Paksa) sejak tahun 1837 - 1900. Keuntungan yang sangat banyak itu harus dibalas dengan "balas budi". Setiap per-sidangan di parlemen hal tersebut terus diperdebatkan antara pihak pe-merintah di Nederlandsch dengan kaum liberal Belanda, sepertinya : Van Dedem, Van Kol, Van Deventer dan Brooschooft. Ternyata dalam persidangan pada akhir tahun 1900, kaum liberal itu memperoleh suatu kemenangan. Akhirnya berhasillah usaha untuk memperbaiki rakyat Indonesia itu, diberi nama "**Politik Etis**" (Balas Budi). Dalam "**Trilogi Politik Etis**", disebutkan 3 bidang, yaitu **irigasi** (pengairan), **migrasi** (pemindahan penduduk) dan **edukasi** (pendidikan). Dari 3 bidang itu, hanya bidang **edukasi** (pendidikan) yang sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Politik Etis dilaksanakan pada tahun 1902, sehingga sejak tahun tersebut para pemuda Indonesia semakin banyak yang mendapatkan pendidikan sistem Barat. Tidak hanya di bidang kedokteran yang diberikan sistem Barat, melainkan juga pengetahuan umum (ilmu bumi, sejarah, dan sebagainya) diberikan dalam pendidikan tersebut. Walaupun pelaksanaannya tetap diskriminatif dan selektif, tetapi dampak pendidikan tersebut sangat positif bagi rakyat Indonesia. Wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air semakin mendalam, sehingga mudah terjalin rasa persatuan dan kesatuan.

Namun sejalan dengan perkembangan pendidikan di tanah air, terjadi pula perkembangan politik internasional. Hal ini disebabkan dengan adanya Revolusi Rusia tahun 1917, di mana kaum komunis mendapat kemenangan. Akibat dari politik internasional itu, maka orang-orang SI yang telah memperoleh didikan Sneevliet, ingin memasukkan ajaran komunis ke dalam Sekolah-Sekolah Sarekat Islam. Semaun, Darsono, dan Alimin adalah tokoh-tokoh SI yang telah kena pengaruh komunis, bekerja keras untuk menanamkan ajaran komunis di Indonesia. Dengan demikian mulailah terjadi perpecahan di kalangan SI. Ternyata tidak hanya SI pimpinan HOS. Cokroaminoto saja yang

menentang gerakan komunis tersebut, melainkan juga organisasi-organisasi lain, seperti Budi Utomo, Insulinde, SDAP Hindia-Belanda dan SI Putih, menentanginya. Golongan yang menentang itu, mendesak kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menggantikan *Volksraad* dengan parlemen pilihan rakyat. Gubernur Jenderal "*van Limburg Stirum*", menanggapi desakan itu, dengan mengeluarkan "**Janji Bulan November** (November-Beloofte) pada tanggal 18 November 1918. Isinya merupakan janji pemerintah Belanda untuk mengadakan perubahan-perubahan bagi rakyat Hindia-Belanda secara luas.

Dengan keluarnya janji tersebut, suasana di negeri jajahan dapat dikendalikan. Akhirnya pemerintah mengambil tindakan secara tegas, yakni penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat gerakan komunis, baik orang Belanda sendiri maupun orang-orang Indonesia. Tetapi orang-orang Indonesia banyak yang dilepas lagi, sedangkan orang-orang Belanda banyak yang diusir, termasuk Sneevliet dkk-nya. Dengan demikian, maka boleh dikatakan gerakan kaum sosialis atau komunis pada akhir tahun 1918 yang ada di Indonesia mengalami **depresi**. Peranan golongan Eropa di dalam ISDV menjadi berkurang, akhirnya muncul aktivis-aktivis orang-orang Indonesia mengambil alih menjadi pimpinan ISDV. Mereka itu antara lain Semaun dan Darsono.

Sejak pengambilalihan pimpinan ISDV tersebut, maka gerakan komunis mulai dapat bangkit kembali, terutama dalam bidang pendidikan. Melalui bidang pendidikan ini, kaum komunis sangat pandai memasukkan faham komunis. Terlebih lagi dengan seorang guru yang berfaham komunis, yaitu **Tan Malaka**. Pada bulan Februari 1921 datang di Batavia (Jakarta). Tan Malaka adalah seorang guru sekolah yang diadakan oleh sebuah perusahaan bernama "*Deli & Snemah Maatschappij*" di Fort de Kock (Bukittinggi).

Tan Malaka kemudian pergi ke Yogya dan bertemu dengan R. Sutopo (redaktur kepala dari surat kabar "Budi Utomo"). Di kota Yogya Tan Malaka ditawarkan untuk memimpin sekolah yang akan didirikan oleh R. Sutopo itu. Kemudian di kota itu pula Tan Malaka berjumpa dengan para tokoh SI yang sedang mengadakan kongres organisasi tersebut. Antara lain ialah HOS. Cokroaminoto, Semaun, dan Darsono. Oleh Semaun, Tan Malaka ditawarkan untuk memimpin sekolah untuk anak-anak anggota SI di Semarang. Tawaran ini diterimanya, sehingga

dimulailah persiapan untuk mendirikan sekolah tersebut. Dengan cepat dukungan dari berbagai pihak datang, termasuk juga dukungan dari Ny. Sneevliet yang kebetulan masih berada di Semarang. Dalam waktu singkat sudah tercatat murid sebanyak 50 orang dan sejumlah buku-buku untuk bahan pendidikan. Setelah Sekolah SI dapat berjalan dengan baik, maka di daerah-daerah juga berdiri sekolah-sekolah SI sebagai cabangnya. Namun ternyata ada reaksi dari Residen Semarang dan melaporkan kepada Gubernur Jenderal, bahwa sekolah itu didirikan "**atas dasar komunistis**" (Sartono Kartodirdjo 1975 : 264).

Sejak itu mulailah sekolah SI mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Usaha untuk mengadakan "**malam derma**" dihalang-halangi. Akan tetapi pihak pimpinan sekolah tidak kehilangan akal. Murid-muridnya dibekali surat untuk meminta sumbangan kepada masyarakat di sekitarnya. Mereka keluar kampung masuk kampung dengan "**baju putih berselempang merah**" yang bertuliskan "**Rasa Kemerdekaan**". Dengan demikian bantuan dari masyarakat dapat diperolehnya dengan lancar. Hanya dalam beberapa bulan saja bantuan telah terkumpul dan jumlah muridnya telah bertambah menjadi 120 orang. Dengan itu pula, dapat dicatat bahwa sekolah tersebut mengambil langkah **non-kooperasi** dan bertujuan untuk membangunkan "**hati merdeka**" dan pergaulan anak-anak menurut dunia anak-anak sendiri, serta dilatih "**keberanian berbicara**" dan "**rasa kemerdekaan**". Dengan demikian, berarti anak-anak bumi putera dikelak kemudian dapat mengerti tentang kewajibannya untuk membela kaum proletar dan rasa belas kasihan terhadap kaum terhina.

Apabila diperhatikan tentang tujuan sekolah SI masa Tan Malaka tersebut, memang semata-mata untuk menghadapi penindasan kaum penjajah dan itu tujuan utama, namun kurang memperhatikan dasar-dasar agama Islam, sehingga mudah timbul keretakan dari dalam tubuh SI sendiri. Itulah sebabnya, meskipun sekolah SI telah berkembang pesat, akhirnya mengalami perpecahan juga, sehingga bubar seiring dengan pecahnya organisasi SI (1924). Sejak itu sekolah-sekolah SI menjadi **Sekolah Rakyat**.

Di samping sekolah SI yang menyelenggarakan pendidikan bersikap non-kooperatif, juga **Perguruan Taman Siswa**, Pendidikan **INS** (*Indonesisch Nederlandsche School*), dan **Perguruan Rakyat**.

Penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan oleh pihak swasta, yang segala sesuatunya dibiayai sendiri. Tujuan dari pendidikan ini hampir sama, yaitu "**mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja merdeka**, di dalam batas-batas tujuan mencapai tertib-damainya hidup bersama. Hal ini berarti terkandung suatu dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri". (Sartono Kartodirdjo 1975 : 251).

Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, dan pendirinya bernama RM. Suwardi Suryaningrat. Taman Siswa ini termasuk pergerakan nasional dalam bidang pendidikan, yang sangat mementingkan kebudayaan nasional. Berbeda dengan Pujangga Baru yang menganjurkan "**menuju ke Barat**", karena kebudayaan "**berjiwa dinamis, kemampuan kreatif dan inisiatif**". Sedangkan menurut penganut Taman Siswa bahwa "**berpegang pada filsafat hidup nasional itu ternyata sudah berjiwa universal**". Hal ini dikemukakan oleh S. Mangunsarkoro dan diperkuat oleh W.F. Wertheim dalam analisisnya "*Cultur Dynamics in Indonesia*" (Dinamik budaya di Indonesia).

Kemudian dalam pendidikan INS yang didirikan oleh Moh. Sjafei pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam, Sumatera Barat, mengemukakan bahwa "**pengajaran pemerintah Hindia Belanda bercorak berat sebelah, yang hanya mementingkan kecerdasan saja**". Praktek pendidikan dan pengajaran pada waktu itu kurang atau sama sekali tidak memperhatikan perkembangan rasa, kecakapan dan ketangkasan. Mata pelajaran ekspresi (menggambar, menyanyi, bahasa dan kerja tangan), tidak diperhatikan. Sedangkan menurut Moh. Sjafei, mata pelajaran ekspresi itu sangat penting. Hal ini sesuai dengan semboyan : *Hoofd, Hart en Hand* (kepala, hati dan tangan). Memang ada perbedaan dengan Taman Siswa, bahwa dalam pendidikan INS masalah "**budaya nasional tidak begitu ditonjolkan**". Dalam pelaksanaan pengajaran, harus semuanya praktis "**dari rakyat untuk rakyat**".

Sedangkan pendidikan dalam Perguruan Rakyat, yang merupakan gabungan dari dua perkumpulan, yaitu **Pustaka Kita** pimpinan Mr. Sunario dan Arnol Mononutu W. tahun 1928 dan **Perhimpunan Untuk Belajar** pimpinan Sudarmoatmojo dan Thaib. Perguruan

Rakyat berdiri pada tanggal 11 Desember 1928 di Jakarta. Tujuannya telah dirumuskan dalam beberapa sendi Perguruan Rakyat, yang tersusun jelas. Di samping ada kesamaan pandangan dengan prinsip Taman Siswa dan Pendidikan INS, tetapi ada ciri khas tersendiri, yaitu "**bahwa pendidikan itu dalam orientasinya lebih bercorak sosiologis daripada condong ke filsafat metafisis**". Sedangkan dalam pendidikan Taman Siswa, terasa filsafat hidup lebih diutamakan. Namun demikian hubungan Perguruan Rakyat dengan Taman Siswa tetap berjalan baik, karena ada prinsip-prinsip yang bersamaan, yaitu "usaha menghubungkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia, untuk berperasaan dan berpikir guna menjawab masalah-masalah yang nyata dihadapi oleh masyarakatnya".

Jadi peranan pendidikan **non-kooperasi**, tetap bertujuan untuk membekali rakyat Indonesia ke arah tercapainya cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Wawasan kebangsaan, harga diri dan rasa kesadaran nasional akan timbul, apabila masyarakat telah terdidik dengan baik. Faham baru sebagaimana yang telah dimunculkan dalam Perang Kemerdekaan Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789), dalam bentuk "*human rights* dan *liberalisme*", telah difahami secara jelas, lebih menetapkan perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional tersebut.

Begitu pula pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang menempuh sikap **kooperasi**, antara lain melalui Perguruan Muhammadiyah dan **Nahdatul Ulama** (NU), walaupun bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan, yang berlandaskan Islam, namun tetap mengarah kepada kehidupan bangsa untuk mencapai Indonesia Merdeka. Dengan demikian peranan pendidikan sangat positif dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional.

Perlu menjadi suatu catatan, bahwa pendidikan pada masa kolonial Belanda, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia-Belanda maupun swasta, menghasilkan para ilmuwan (cendekiawan) dan kemudian tidak sedikit yang tampil sebagai kaum pergerakan nasional. Sepertinya : dr. Wahidin Sudirohusodo, dr. Sutomo, dr. Cipto Mangunkusumo, H. Agus Salim, Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. Sunario, Ki Hajar Dewantoro, dan lain-lain. kesemuanya pendidikan zaman kolonial Belanda. Tokoh-tokoh tersebut memiliki kemampuan ilmiah dan berwawasan kebangsaan yang mantap. Namun untuk

perjuangan secara fisik, tidak mendapat bekal sama sekali. Oleh karena itu, pada saat terjadi **transisi** (peralihan) kekuasaan penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang (1942), bangsa Indonesia tidak berani mengambil alih disebabkan tidak mempunyai modal organisasi perjuangan secara fisik. Hal tersebut sangat berbeda dengan masa transisi pada saat Jepang menyerah kalah terhadap Sekutu, tanggal 14 Agustus 1945.

Pada saat tersebut bangsa Indonesia, berani mengambil sikap secara tegas dan berani **memanfaatkan momentum** yang sangat tepat. Momentum tersebut digunakan untuk memproses "**Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**", walaupun terjadi perbedaan pendapat antara kaum pergerakan nasional (**kaum tua**) dengan **kaum muda**. Pihak kaum tua (**PPKI = Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia**) ingin menyelenggarakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atas pesan **Marsekal Terauci** (Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon - Indo China), sedangkan dari pihak kaum muda, menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan bantuan Jepang. Akhirnya perbedaan pendapat tersebut terjadi titik temu dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas usaha bangsa Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945.

Keberanian mengambil sikap secara tegas dan tepat itu, karena telah diperhitungkan segala resiko apa pun yang akan terjadi. Apabila terjadi tindakan fisik dari tentara Jepang, sudah pasti akan dihadapi secara fisik pula. Hal tersebut disebabkan, karena bangsa Indonesia telah memiliki modal perjuangan secara fisik, yaitu pendidikan kemiliteran yang diberikan oleh Jepang sendiri. Baik muda, tua dan wanitanya, telah banyak yang dididik kemiliteran. Di samping itu, organisasi-organisasi perjuangan juga telah berdiri dan siap untuk digerakkan. Sehingga jelas bahwa pada masa pendudukan bala tentara Jepang, pendidikan yang diberikan dititikberatkan kepada pendidikan militer. Inilah modal bangsa Indonesia dalam perjuangan secara fisik. Pada masa penjajahan Belanda, tidak ada sama sekali pendidikan kemiliteran itu. Namun pendidikan ilmiah pada masa penjajahan Belanda bermutu tinggi, sedangkan pendidikan ilmiah pada masa penjajahan Jepang bermutu rendah. Jepang hanya semata-mata mempersiapkan tenaga-

tenaga, untuk kepentingan perangnya menghadapi Sekutu. Oleh karena itu, pendidikan masa penjajahan Jepang hanya bersifat pendidikan militer. Inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia berani mengambil sikap pada masa transisi tersebut.

D. Peranan Organisasi Politik

Dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia menempuh melalui berbagai bidang. Yaitu bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik. Di antara bidang-bidang tersebut, bidang politik yang paling menonjol, karena penjajah Belanda menggunakan politik dalam segala bidang. Hal ini terjadi pada awal abad ke-20, di mana pada waktu itu bangsa Indonesia telah mengubah cara pejuangannya, tidak lagi bersifat lokal, melainkan bersifat nasional. Dalam perjuangan yang bersifat nasional itu, peranan organisasi sangat menentukan. Organisasi pergerakan nasional pertama telah dirintis oleh Budi Utomo, namun Budi Utomo pada awalnya menempuh perjuangan melalui bidang sosial-budaya. Organisasi Budi Utomo tersebut telah modern, karena telah tersusun secara baik dan juga jelas arah dan tujuannya, yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Kemudian setelah Budi Utomo berdiri, terus diikuti organisasi-organisasi lain, yaitu SI yang pada mulanya bergerak dalam bidang ekonomi, terus meningkat ke bidang politik. Organisasi pergerakan nasional yang langsung bergerak dalam bidang politik adalah *Indische Partij*. Sejak tahun 1912 pemerintah Hindia Belanda, telah melakukan pengawasan secara ketat terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional. Dengan demikian untuk *Indische Partij*, mengalami tindakan pertama dari pihak kolonial Belanda, karena ketiga tokoh pendirinya ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Kemudian organisasi ini, dilarang dan tidak dapat bangkit lagi sejak tahun 1913.

Setelah *Indische Partij* ditindak, tidak lama kemudian organisasi Sarekat Islam juga dicurigai. Padahal SI pada mulanya tidak menyatakan pergerakannya bersifat politik, tetapi seluruh aksi organisasi itu dapat dilihat bahwa pelaksanaannya menuju ke struktur ketatanegaraan yang bersifat nasional dan tidak menghendaki "**stelsel - terjajah - penjajah**". SI memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menentang penindasan

maupun bentuk lain yang menyengsarakan, serta penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Dengan demikian SI dianggap sebagai suatu organisasi pergerakan nasional yang bergerak secara "**demokratis-ekonomis-nasionalistis**".

Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat SI telah mendapat hati di kalangan masyarakat dan merupakan organisasi massa yang pertama di Indonesia yang berpengaruh dalam bidang politik. Akibatnya pemerintah Hindia Belanda khawatir terhadap perkembangan SI, sehingga ruang gerak SI dibatasi dan tidak diperbolehkan mempunyai pengurus besar. Berdasarkan laporan-laporan dari para Residen, maka **Gubernur Jenderal Indenburg** mengambil langkah politik yang sifatnya memecah belah persatuan SI atau boleh disebut politik "*divide et impera*". Hal ini terbukti, karena pemerintah Hindia Belanda hanya memperbolehkan SI berdiri secara lokal saja. Di samping itu, pada tahun 1914 orang-orang Belanda yang sengaja didatangkan ke Indonesia, berhasil mendirikan ISDV. Bagi orang-orang Indonesia yang berminat masuk dalam organisasi ini, dapat diterima. Akibatnya banyak tokoh-tokoh SI yang masuk menjadi anggota ISDV. Antara lain ialah Semaun, Darsono dan Alimin. Sejak itulah mulai ada benih-benih perpecahan dalam tubuh SI.

Usaha pemerintah Hindia Belanda untuk memecah persatuan SI tersebut, ternyata tidak saja didorong oleh gerakan-gerakan di dalam negeri pemerintah jajahan saja, melainkan juga adanya pengaruh dari luar, yaitu **Gerakan Pan-Islamisme** yang anti-imperialis barat dan akan membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Ternyata usaha ini berhasil dengan cepat, terutama dengan datangnya Tan Malaka yang telah menganut faham Marxis (lihat uraian di bagian depan tentang peranan pendidikan dalam sekolah SI).

Dengan masuknya faham komunis ke dalam tubuh SI, maka pecahlah SI menjadi dua. Satu pihak menjadi SI di bawah pimpinan HOS. Cokroaminoto dan pihak lain lagi di bawah pimpinan Semaun. Akhirnya kedua-duanya menjadi suatu organisasi partai politik, yaitu Partai Sarekat Islam (PSI) dan yang di bawah Semaun menjadi PKI. Kedua partai ini berjuang dengan mengambil sikap **non-kooperasi** sejak tahun 1923. Namun PSI lebih lunak dibandingkan dengan PKI.

Gerakan PKI selanjutnya sangat radikal dan selalu menggerakkan organisasi buruh untuk mogok, apabila tuntutan perbaikan nasib buruh tidak dipenuhi. Sebagai puncak kegiatan PKI untuk memperjuangkan nasib buruh adalah melancarkan pemogokan secara besar-besaran. Padahal cara-cara yang demikian itu, dapat dihindarkan dan dapat di tempuh dengan jalan lain. Oleh karena itu, dalam tubuh PKI itu sendiri pada awal tahun 1926 terjadi suatu perbedaan pandangan. Ada yang berpendapat harus dilakukan pemberontakan, tetapi ada yang tidak setuju pemberontakan. Pihak Tan Malaka bersikap tidak setuju pemberontakan, sedangkan di pihak Alimin, Darsono, dkk-nya, setuju melakukan pemberontakan. Akhirnya diputuskan oleh Alimin dkk-nya, untuk berontak. Pada saat terjadi **pemberontakan PKI** tanggal 13 November 1926, Semaun sedang berada di Moskow untuk membicarakan tentang gerakan **Komunis Internasional** (Komintern). Menurut Semaun sebenarnya pemberontakan itu, belum waktunya. Karena di dalam tubuh partai, belum ada kekompakan. Garis komando ke massa pendukung partai belum terbentuk, sehingga boleh dikatakan bahwa PKI belum siap melakukan pemberontakan. Akibatnya sangat vatal dan gagal total. Sebab hanya dalam waktu 3 hari saja, telah dapat ditumpas oleh pihak pemerintah kolonial Belanda. Demikian tanggapan Semaun sewaktu bertemu dengan Moh. Hatta di negeri Belanda pada bulan Desember 1926.

Sebenarnya Tan Malaka sejak awal sudah menduga, bahwa pemberontakan yang dilakukan PKI pasti tidak berhasil. Jadi senada dengan apa yang dikemukakan oleh Semaun. Namun pihak Alimin dkk. sangat sulit dipengaruhi jalan pikirannya. Dengan demikian pada saat Semaun sedang berada di luar negeri, dilancarkan pemberontakan tersebut. Setelah Semaun mendengar kejadian di tanah air, bahwa PKI telah melancarkan pemberontakan dan gagal, maka Semaun memutuskan tidak kembali ke tanah air, melainkan pergi ke negeri Belanda. Di negeri Belanda, Semaun mengadakan pertemuan rahasia empat mata dengan Moh. Hatta.

Dalam pertemuan Semaun - Hatta itu, Semaun melampiaskan kesedihannya, tentang kegagalan pemberontakan PKI pada bulan November 1926. Walaupun Semaun tidak menyetujui pemberontakan tersebut, namun sebagai pemimpin PKI yang bertanggung jawab

tentang organisasi tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengatakan bahwa organisasinya telah rusak-parah dan sulit untuk dibangun kembali. Oleh karena itu, Semaun menyerahkan kepada Moh. Hatta untuk meneruskan kepemimpinan pergerakan, karena Moh. Hatta dianggap mampu untuk tampil sebagai pemimpin pergerakan nasional. Sedangkan Semaun tidak ada harapan lagi untuk meneruskan perjuangan, yang bertujuan mengikuti "**Garis Moskow**".

Garis Moskow adalah berpaham komunis yang mengikuti politik **Stalin**, yang melarang dengan keras terhadap seorang komunis menyerahkan kepemimpinan pergerakan kepada kaum nasionalis. Karena masalah itu dapat diartikan, bahwa kepentingan golongan lebih diutamakan dari pada kepentingan nasional. Kaum nasionalis yang memegang pimpinan pergerakan, menurut garis Moskow dianggap sebagai golongan "**burjuis nasional**". Jadi dalam hal ini berlaku bagi Semaun, karena tampak Semaun telah mengalami putus-asa, tidak ada alternatif lain. (Sudiyo 1989 : 66).

Walaupun masalah tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa oleh Semaun, tetapi mempersulit perjuangan para mahasiswa Indonesia yang tergantung dalam PI di negeri Belanda. Karena pemerintah Belanda menuduh para mahasiswa tersebut, sebagai penerus pemberontakan PKI yang gagal di tanah air. Di negeri jajahan banyak para tokoh, baik komunis maupun para kaum pergerakan nasional ditangkap. Ada yang di bunuh dan ada yang dijebloskan dalam penjara atau dibuang ke Tanah Merah (Digul) Irian Barat. Bagi kaum pergerakan nasional yang tidak tertangkap, tidak berani melakukan kegiatan untuk sementara. Dalam hal ini seakan-akan kegiatan partai-partai politik berhenti. Begitu pula kegiatan para mahasiswa di negeri Belanda, mendapat pengawasan secara ketat. Padahal pada saat itu, para mahasiswa sedang giat-giatnya melakukan kegiatan bersama-sama dengan para mahasiswa dari Asia dan Afrika yang sedang kuliah di Eropa. Bersama mereka aktif menghadiri setiap konferensi untuk menentang imperialisme, serta berjuang untuk kepentingan nasional yang masih mengalami penindasan oleh penjajah.

Pada saat para mahasiswa sedang giat-giatnya tersebut, ternyata ada berita dari negeri jajahan maupun di negeri penjajah sendiri, bahwa para mahasiswa sedang dicari-cari oleh para polisi Belanda. Dengan

demikian banyak para mahasiswa yang terus tetap berada di luar negeri Belanda atau sembunyi di tempat-tempat kenalnya, sehingga tidak tertangkap oleh polisi Belanda tersebut. Di samping itu ada juga yang terpaksa pulang ke tanah air. Dengan demikian ada yang sudah menyelesaikan studinya, tetapi ada juga yang belum berhasil menyelesaikan studinya. Namun demikian para pengurus PI, yaitu Moh. Hatta, Alisastroamijoyo, Nazir Dt. Pamuncak dan Abdul Madjid Djojodiningrat, tertangkap oleh polisi Belanda, kemudian dijebloskan dalam tahanan.

Setelah enam bulan dalam tahanan keempat mahasiswa tersebut baru diajukan dalam sidang pengadilan, dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan PKI yang gagal tersebut. Dalam tahanan itu, ternyata Ali Sartroamijoyo diberi kesempatan menempuh ujian akhir dan berhasil lulus. Kemudian Moh. Hatta pada waktu dalam persidangan berhasil mengucapkan pidato pembelaannya dengan diberi judul "*Indonesia Vrij*" (Indonesia Merdeka). Kemudian mahasiswa yang lain juga mengadakan pembelaannya yang dibantu oleh para advokat Belanda, antara lain bernama Mr. Duys, Mr. Mobach dan Nona Mr. L. Weber. Setelah semua proses persidangan berjalan lancar, maka hakim ketua membaca keputusannya. Ternyata keempat-empatnya dinyatakan tidak terlibat dan akhirnya dibebaskan dari tahanan. Karena tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu.

Sementara itu, di negeri jajahan sementara kaum pergerakan tidak berani melakukan kegiatan yang bersifat politik atau menggerakkan massa. Dalam situasi yang demikian, maka muncul tokoh muda, yaitu Ir. Sukarno. Tokoh ini memang belum banyak dikenal oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun sejak tahun 1925, telah berhasil mendirikan perkumpulan pelajar yang ada di Bandung dengan nama "Algemeene Studie Club". Dia banyak belajar dari terbitan-terbitan karya HOS. Cokroaminoto tentang "**Islam dan Sosialisme**". Dari Ir. Sukarno sendiri timbul gagasan untuk bergerak yang menjurus kepada nasional murni. Artinya benar-benar menuju kepada "nation state" (negara kebangsaan). Dalam hal ini Ir. Sukarno banyak belajar dari buku **Ernest Renan** tentang "**apa bangsa itu**".

Oleh karena itu, Ir. Sukarno tampil sebagai pemimpin pergerakan nasional tidak canggung dan belum dicurigai oleh pemerintah Hindia-

Belanda. Terlebih-lebih pada saat itu juga telah banyak para anggota PI yang pulang ke tanah air. Kepulangan anggota PI ini ada yang memang sudah menyelesaikan studinya di negeri Belanda, tetapi ada pula yang karena menghindari kejaran dari pemerintah di negeri Belanda, setelah gagalnya pemberontakan PKI tahun 1926. Setelah di tanah air, para anggota PI itu banyak bergabung dengan Ir. Sukarno untuk melakukan pergerakan. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1927 didirikan suatu organisasi politik dengan nama "**Perserikatan Nasional Indonesia**" (PNI), yang kemudian pada tahun itu juga berubah namanya menjadi "**Partai Nasional Indonesia**" yang juga disingkat PNI. Adapun para pendiri PNI itu adalah gabungan dari para pelajar yang lulus di tanah air dan pelajar/mahasiswa yang datang dari negeri Belanda. Mereka-mereka itu adalah Ir. Sukarno, Ir. Anwar, Mr. Isaq Cokrohadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Sunario, Mr. Budhiarto, dan bukan dari kalangan intelektual, yaitu Tilaar dan Sudjadi. Adapun Tilaar dari karyawan swasta, sedangkan Sudjadi dari pegawai negeri. Berhubung PNI mengambil langkah pergerakan secara non-kooperasi, maka Sudjadi melepas pegawai negerinya dan pindah ke karyawan swasta.

PNI diharapkan akan menjadi partai pelopor dalam pergerakan nasional, kalau PSI bersifat "**Islamis**", PKI bersifat "**Sosialis** dan **Marxis**", sedangkan PNI bersifat "**Nasionalis**". Dengan demikian di dalam PNI tidak membedakan agama dan pandangan apa pun. PNI dalam hal ini bersifat "**netral**", dan hanya menuju ke satu tujuan, yakni berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Sebenarnya PNI untuk menjadi suatu partai politik itu, tidak disetujui oleh dr. Cipto Mangunkusumo. Hal ini dipertimbangkan bahwa gerakan ke arah partai politik, dianggap sangat berbahaya. Karena pengalaman dari pemberontakan PKI yang gagal belum lama ini, akan mengakibatkan pihak pemerintah lebih berbuat kejam terhadap pergerakan politik. Oleh karena itu, dr. Cipto yang juga ikut hadir dalam rapat berdirinya PNI sejak awal telah mengingatkan kepada para pendiri PNI itu.

Sementara itu, ada juga golongan pelajar yang berwawasan politik, tetapi bersifat lunak yang di bawah pimpinan Dr. Sutomo. Golongan pelajar tersebut bernama "Indonesische Studie Club", yang pada tahun 1927 berubah nama menjadi "Persatuan Bangsa Indonesia" (PBI). Kemudian Perkumpulan Budi Utomo, yang juga pernah dipimpin

Dr. Sutomo yang sejak berdirinya bergerak dalam bidang sosial budaya, mulai dibenahi untuk bergerak dalam bidang politik. Tetapi baik PBI maupun Budi Utomo ini, mengambil sikap "Kooperasi". Jadi mulai tahun 1927 setelah PNI berdiri ada dua kelompok pergerakan nasional, yaitu pergerakan nasional yang bergerak secara kooperasi dan satu lagi bergerak secara non-kooperasi. Tetapi kedua-duanya tetap bertujuan satu, yaitu menuju Indonesia Merdeka.

Oleh karena itu, berhubung dari PNI selalu menekankan dalam setiap rapat pentingnya suatu persatuan bangsa, maka tanggal 18 Desember 1927 terbentuklah wadah persatuan itu dengan nama **"Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia" (PPPKI)**. Organisasi yang masuk dalam federasi ini adalah PNI, PSI, PBI, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond dan Pemuda Kaum Betawi.

Ternyata dengan berdirinya PNI, mempunyai pengaruh sangat luas. Tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, yaitu di negeri Belanda. Antara PNI dengan PI, sangat erat hubungannya dan hal ini tampak terjalin kepemimpinan Bung Karno dengan Bung Hatta. Segala yang terjadi di negeri Belanda disampaikan ke tanah air, walaupun hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Begitu pula, hal-hal yang terjadi di tanah air, sudah pasti disampaikan ke negeri Belanda. Dalam hal ini peranan Ali Sastroamijoyo sangat besar, karena dari dialah surat tersebut disampaikan ke tanah air dan sebaliknya surat-surat dari tanah air, dia pula yang menerima.

Kemudian pengaruh di tanah air, sangat terasa dalam pergerakan pemuda dan juga dalam pergerakan wanita. Di dalam pergerakan pemuda berhasil mempengaruhi cara berpikir pemuda, sehingga keputusan dalam Kongres Pemuda II diwarnai berpikir politik seperti yang telah dilakukan oleh PNI. Antara lain ialah keputusan **"satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa"**, yakni Indonesia, itu hampir mirip dengan **Trilogi PNI** tentang *"nationale geest, nationale wil dan nationale daad"* (Sartono Kartodirdjo 1975 : 215).

Adapun pengaruh PNI dalam pergerakan wanita adalah di mana kaum wanita mulai berpikir politik, yaitu terjadinya federasi organisasi wanita dalam Kongres Perempuan Indonesia I (22 Desember 1928) dengan pembentukan organisasi persatuan wanita yang bernama

"**Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia**" (PPPI), yang kemudian dalam Kongres PPPI tanggal 28-31 Desember 1929 nama organisasi diganti menjadi "**Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia**". Dalam dua kongres tersebut dijelaskan bahwa kesatuan pergerakan wanita Indonesia tidak bersifat *fiministis* dalam arti konfrontatif terhadap kaum pria, tetapi mengutamakan suatu kerja sama, karena menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah dan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia diperlukan persatuan. (KOWANI 1978 : 29).

Dengan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa PI mempunyai kaitan dengan PNI, sedangkan PNI berhasil mempengaruhi cara berpikir kaum pemuda dan selanjutnya dari pihak pemuda dapat mempengaruhi cara berpikir kaum wanita. Kesemuanya itu suatu perjuangan dalam bidang politik dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia. Di samping PI dan PNI mempunyai hubungan langsung, karena dari PNI beranggapan bahwa PI merupakan wakil PPPKI di luar negeri, juga PI sendiri ada hubungan dengan pihak pemuda yang ikut dalam Kongres Pemuda II. Antara lain ialah Mr. Sunario (pernah menjadi anggota PI di negeri Belanda), terbentuknya PPPI dan lahirnya organisasi Jong Indonesia (Pemuda Indonesia), sangat erat dengan terselenggaranya Kongres Pemuda II.

Pada saat giat-giatnya para pemuda dan kaum pergerakan nasional untuk menyatukan organisasi, terutama yang dipelopori oleh PNI muncullah reaksi dari orang-orang Belanda di Indonesia, dengan meniupkan desas-desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan. Dengan demikian pemerintah kolonial Belanda khawatir terhadap kegiatan PNI. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan ancaman terhadap PNI dan menghalang-halangi kegiatan PNI untuk berpropaganda. Filsafat PNI untuk membela kaum **Marhaen**, tampaknya sangat mengkhawatirkan pemerintah jajahan. Pada tanggal 6 Agustus 1929, suatu ancaman dike-luarkan dan menuduh PNI mengajarkan faham marxisme melalui Filsa-fat PNI itu. Sehingga ajaran Marhaenis itu ditafsirkan sebagai marxis-me yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Di samping itu sikap non-kooperasi PNI dianggap bersifat memusuhi pemerintah.

Walaupun ada ancaman dan tuduhan seperti tersebut di atas, PNI tetap terus berjalan sesuai dengan programnya. Konsolidasi terhadap anggotanya dan propaganda terus dilakukan, sehingga di seluruh

Indonesia berdiri cabang-cabang PNI. Dalam waktu singkat anggota PNI sudah mencapai 10.000 orang, terutama untuk daerah Priangan sendiri telah mencapai 6.000 orang. Jumlah tersebut bila dibandingkan dengan para anggota SI sebenarnya masih lebih kecil, tetapi pengaruh Ir. Sukarno (Ketua PNI) sampai akhir Desember 1929 sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya pemerintah berusaha menangkap para pengurus PNI dan pada tanggal 29 Desember 1929, dilakukan penggeledahan di setiap kantor maupun cabang-cabang PNI. Dalam penggeledahan tersebut juga dilakukan penangkapan-penangkapan para anggota PNI, sehingga beberapa pengurus Pusat PNI, yaitu Ir. Sukarno (Ketua), Gatot Mangkupraja (Sekretaris II PB. PNI), Maskun Sumadireja (Sekretaris II PNI cabang Bandung) dan Supriadinata (Anggota PNI cabang Bandung) ditangkap oleh polisi di Yogyakarta. Selanjutnya keempat tokoh PNI tersebut dibawa ke Bandung untuk diajukan ke depan pengadilan kolonial di Bandung. Sedangkan penangkapan-penangkapan anggota PNI di daerah-daerah terus berjalan.

Keempat orang tokoh yang diajukan ke depan pengadilan itu, baru dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus hingga 29 September 1930. Jadi ditahan cukup lama dan persidangannya pun memakan waktu hampir 1 1/2 bulan. Dalam pidato pembelaannya Ir. Sukarno yang merupakan penggerak utama PNI menguraikan dengan jelas tentang penindasan penjajah dan revolusi rakyat terjajah. Dengan demikian pidato pembelaan Ir. Sukarno itu lebih dikenal dengan nama "**Indonesia Menggugat**". Dalam hal ini, mengingatkan kita kepada pengadilan para pemimpin PI di negeri Belanda, yaitu Moh. Hatta tahun 1927 yang dalam pidato pembelaannya diberi judul "**Indonesia Vrij**" (**Indonesia Merdeka**). Itulah sebabnya tampak ada keterpaduan antara pemimpin PNI di tanah air dengan pemimpin PI di negeri Belanda. Walaupun Moh. Hatta bebas dari tuduhan terlibat pemberontakan PKI tahun 1926, sedangkan Ir. Sukarno diputuskan bersalah akan melawan pemerintah, namun yang jelas bahwa kedua tokoh itu sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Setelah Ir. Sukarno dimasukkan dalam penjara, karena terbukti bersalah, maka kegiatan partai mengalami kemunduran bahkan terjadi perpecahan di dalam tubuh PNI sendiri. Di dalam **Kongres Luar Biasa** (KLB) PNI ke II tanggal 25 April 1931 di Jakarta, dalam kondisi

yang terpaksa, akhirnya diambil keputusan pembubaran PNI. Namun pembubaran ini menimbulkan **kontra** dan **pro**, bagi para pendukungnya. Yang terus memperjuangkan program PNI-Lama dipimpin oleh Mr. Sartono dan memberi nama organisasinya dengan nama "**Partai Indonesia**" (**Partindo**). Sedangkan yang tidak meneruskan dengan cara-cara PNI-Lama, tetap menggunakan nama PNI dengan perpanjangan "**Pendidikan Nasional Indonesia**". Yang dimaksudkan pendidikan di sini adalah **pendidikan politik** dan **sosial**. Kemudian PNI yang menekankan pendidikan ini lebih di kenal dengan nama **PNI-Baru** pimpinan Moh. Hatta dan St. Syahrir. Sebenarnya perpecahan tersebut tidak merupakan perpecahan yang vatal, karena kedua-duanya tetap setuju bahwa kemerdekaan politik adalah tujuan perjuangan utama yang harus dicapai dengan taktik non-kooperasi. Kalau PNI-Lama tetap menempuh dengan menggunakan aksi massa adalah senjata yang paling tepat, sedangkan PNI-Baru menggunakan pendidikan politik merupakan cara yang paling efektif. Sehingga tidak ada perbedaan tujuan perjuangannya, hanya berbeda taktik atau langkah yang dipakai dalam perjuangan.

Setelah Ir. Sukarno keluar dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931, masuk menjadi anggota Partindo. Tetapi pada saat itu, di dalam pemerintah Hindia Belanda, juga terjadi penggantian Gubernur Jenderal, yaitu dari De Graeff ke Gubernur Jenderal yang baru bernama De Jonge. Gubernur Jenderal ini tidak mengetahui tentang pergerakan nasional, sifatnya keras dan tidak memberi kesempatan kepada kaum pergerakan nasional untuk melakukan kegiatan politik. Sorotan terhadap gerakan Partindo dan PNI-Baru sangat tajam, sehingga menyulitkan gerakan aksi massa dan pendidikan politik. Dalam hal ini PNI-Baru mengambil cara lain, yaitu gerakan di bawah tanah secara diam-diam. Namun tindakan pemerintah Hindia Belanda bukan semakin lunak, melainkan bertambah keras. Penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh Partindo dan PNI-Baru, terus dilakukan.

Ir. Sukarno yang telah aktif lagi melalui organisasi Partindo, pada tahun 1932 ditangkap kembali dan dibuang ke Ende (Flores), Nusatenggara Timur. Pada tahun 1938 dipindah ke Bengkulu, dan pada bulan Februari 1942 dipindahkan lagi ke Padang, Sumatera Barat. Akhirnya setelah Jepang masuk dan Belanda menyerah kalah

kepada Jepang, Ir. Sukarno pada bulan Maret 1942 dibebaskan, kemudian pada bulan Juli 1942 kembali ke Jakarta. Jadi praktis sejak keluar dari penjara Sukamiskin, Bandung, Ir. Sukarno sudah dalam kondisi sulit untuk bergerak, karena sikap pemerintah kolonial Belanda yang sangat keras dan kaku. Semua perhatian pemerintah hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi dan menjaga ketertiban masyarakat. Segala yang dianggap mengganggu ketertiban umum dilarang. Pelaku-pelakunya ditangkap, apalagi bagi kaum pergerakan nasional yang bergerak secara non-kooperasi diperlakukan secara kejam. Sehingga banyak penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh politik yang berjuang secara non-kooperasi, yang kemudian diadili dan kebanyakan diputus bersalah terus dibuang ke luar Jawa atau dipenjara Glodok, Jakarta.

Begitulah sikap Gubernur Jenderal B.C. de Jonge dan juga penggantinya, yaitu Gubernur Jenderal Carda van Starckenborg Stachouwer. Semua organisasi pergerakan nasional yang bersikap non-kooperasi, ditekan dan diperlakukan secara kejam. Dengan demikian kegiatan PNI-Baru yang mengambil sikap non-kooperasi juga mendapat perlakuan yang sama, sehingga pada tanggal 25 Januari 1934 Moh. Hatta, Bondan dan St. Syahrir ditangkap di Jakarta, kemudian di penjara di Goldok. Di samping di Jakarta, juga di daerah-daerah lain-lain dilakukan penangkapan, bahkan tidak saja tokoh-tokoh PNI dan Partindo yang ditangkap, tetapi juga tokoh-tokoh Islam dan nasionalis lainnya ikut ditangkap. Dengan demikian banyak sekali kaum pergerakan nasional yang meringkuk dalam penjara. Setelah Jepang berkuasa, para tokoh pergerakan itu dikeluarkan. Dengan harapan dapat membantu Jepang untuk menghadapi pihak Sekutu.

Kebanyakan para tokoh yang sudah tertangkap sejak Gubernur Jenderal De Jonge (tahun 1931), tidak dilepas lagi. Sebagai contoh, yaitu Ir. Sukarno, kemudian Moh. Hatta dan kawan-kawannya, setelah di penjara di Glodok, pada tahun 1934 dipindahkan ke Digul. Tahun 1936 di pindah ke Bandanaire, tahun 1942 Moh. Hatta dkk-nya itu di pindahkan lagi ke Sukabumi. Jawa Barat dan setelah Jepang berkuasa, yaitu pada tanggal 9 Maret 1942 dibebaskan oleh Jepang, terus kembali ke Jakarta. Itulah resiko yang dialami oleh para tokoh pergerakan nasional yang bergerak secara non-kooperasi untuk mencapai

kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan bagi kaum pergerakan nasional yang bergerak secara kooperasi, bukan berarti mengalami perjuangan yang mudah. Bagi kaum pergerakan yang bergerak secara kooperasi, juga sangat hati-hati. Hal ini memang telah dirintis sejak awal oleh Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo ini sejak tahun 1935 telah bergabung (berfusi) dengan PBI, akhirnya menamakan organisasinya menjadi "**Partai Indonesia Raya**" (Parindra). Dengan demikian bahwa tujuan Parindra adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia Raya. Tokoh yang terkenal dalam Parindra ini adalah dr. Soetomo dan Moh. Husni Thamrin. Di samping itu, organisasi pergerakan yang lain dan juga bergerak secara kooperasi, yaitu **Gerindo** (Gerakan Rakyat Indonesia) di bawah pimpinan Moh. Yamin, Amir Syarifuddin, A.K. Gani, Mr. Sartono, Sanusi Pane dan Wikana. Partai ini sebenarnya kelanjutan dari Partindo yang bergerak secara non-kooperasi. Dengan demikian pergerakan yang ditempuh melalui kooperasi dari partai ini, sebenarnya hanya suatu taktik saja, karena bergerak secara non-kooperasi sudah sangat sulit.

Kemudian organisasi yang bergerak secara kooperasi adalah **PSII** (Partai Sarekat Islam Indonesia). Partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Sarekat Islam (PSI) yang sejak tahun 1923 sudah melakukan gerakan dengan jalan non-kooperasi, tetapi tidak keras. Jadi PSII di bawah pimpinan Haji Agus Salim dan Moh. Rum, meneruskan gerakan PSI yang menempuh langkah kooperasi. Sedang golongan Islam lainnya yang menghendaki terwujudnya "**Negara Islam**" di bawah pimpinan Kartosuwiryo, terus melakukan kegiatan dengan DI/TII-nya sampai Indonesia Merdeka, tetap terus bergerak dan memberontak. Golongan Islam Kartosuwiryo ini, akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Republik Indonesia.

Sebenarnya dari organisasi pergerakan yang bernafaskan Islam ini, banyak permasalahan intern, sehingga dari organisasi ini timbul berbagai organisasi pergerakan Islam dan ada yang bergerak secara kooperasi, yaitu PSII di bawah pimpinan H.A. Salim dan Moh. Rum tersebut. Sedangkan PSII yang bergerak secara non-kooperasi yaitu di bawah pimpinan Abikusno Cokrosuyoso. Kemudian PSII cabang Yogyakarta pecah dan membentuk organisasi baru bernama "**PARII**" di bawah dr. Sukiman tetap menempuh langkah non-kooperasi. Sedangkan yang

menginginkan berubah langkahnya dari non-kooperasi ke langkah kooperasi, yaitu mendirikan organisasi baru bernama "**Barisan Penyedar PSII**" dan menghendaki duduk dalam Volksraad di bawah H.A. Salim. Namun masalah perbedaan langkah tersebut, sebenarnya tetap menuju satu tujuan, yakni tercapainya Indonesia Merdeka. Dan perbedaan langkah atau taktik dalam perjuangan suatu hal yang wajar, demi selamatnya suatu organisasi perjuangan. Di samping itu, karena kerasnya tekanan dari pihak pemerintah Hindia Belanda, juga merupakan perubahan langkah atau strategi perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti, banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional, yang berubah langkah, yaitu dari sikap non-kooperasi berubah menjadi kooperasi. Itulah sebabnya bahwa perubahan sikap dalam suatu perjuangan, tidak dapat dikatakan suatu hal yang negatif.

Pada saat situasi dunia semakin memanas dan kondisi Hindia-Belanda diperkirakan juga akan terlibat dalam pergolakan di dunia itu, maka peranan Volksraad semakin penting. Orang-orang Indonesia yang duduk dalam Volksraad terus memikirkan masa depan negaranya. Dalam memikirkan masa depan negaranya itu, para kaum pergerakan nasional tetap menempuh dua jalan, yaitu kooperasi dan non-kooperasi. Kalau yang bergerak secara non-kooperasi sudah sulit untuk bergerak secara terbuka, tetapi yang bergerak secara kooperasi terpecah menjadi dua pandangan. Yang satu pihak menghendaki negara "**berstatus dominion**", sedangkan yang lain pihak menghendaki negara "**merdeka penuh**", walaupun untuk sementara kedua pihak itu tetap bersedia berjuang menghadapi musuh bersama-sama pemerintah Hindia-Belanda. Adapun yang dimaksudkan musuh pada waktu itu adalah kaum **fasis** atau **nazi**, yaitu Jerman, Italia dan Jepang.

Dalam situasi dunia yang semakin memanas itu, pada tahun 1936 terjadi penggantian Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda, yaitu De Jonge diganti Carda van Starckenborg Stachouwer. Sementara itu para kaum pergerakan nasional juga semakin nyata tuntutananya, yaitu mengajukan usul tentang kebijaksanaan pemerintah dan status negara di masa depan. Usul ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo pada tanggal 15 Juli 1936, yang isinya antara lain ialah agar dibentuk kerjasama antara Pemerintah Belanda dengan orang-orang Indonesia (kaum pergerakan nasional yang duduk dalam Volksraad) untuk mengatasi

segala kesukaran dan bahaya yang akan timbul. Usul ini biasa disebut "**Petisi Soetardjo**", yang ditanda tangani oleh A.J. Kasimo, Dr. Ratu-langie, Datuk Tumenggung, Kho Kwat Tiong, dan Alatas. Petisi ini mengandung maksud, agar Volksraad mengusulkan kepada pemerintah tertinggi di negeri Belanda dan Staten General untuk mengadakan konferensi antara para wakil-wakil Hindia Belanda dan wakil-wakil negeri Belanda **atas dasar hak yang sama**. Antara keduanya untuk bersama-sama mengadakan perubahan secara berangsur-angsur selama sepuluh tahun hingga datang masanya menuju kepada "**kemerdekaan Indonesia**". (Ariwiadi 1979 : 89).

Walaupun Petisi Soetardjo itu, didukung oleh sebagian kaum pergerakan nasional, antara lain G.M. Noor, R.P. Suroso, Wiwoho dan Sukardjo Wirjopranoto, namun pihak Belanda tetap khawatir dan menentang usul tersebut. Alasannya adalah bahwa belum waktunya untuk memasukkan usul semacam itu, karena perkembangan ekonomi belum baik di kalangan rakyat Hindia Belanda (Indonesia) belum cukup banyak yang mampu untuk pegang jabatan. Akibat dari penolakan usul itu, mengakibatkan retaknya hubungan antara kaum pergerakan nasional dengan pemerintah Belanda.

Sebenarnya sebagian kaum pergerakan nasional, menginginkan **kemerdekaan penuh**, bukan kemerdekaan yang **berstatus dominion** seperti yang diusulkan dalam Petisi Soetardjo. Sedangkan Moh. Husni Thamrin, sebagai Ketua Fraksi Nasional berpandangan bahwa status dominion kurang menarik, namun perjuangan untuk menentukan **status kenegaraan bagi Indonesia** sangat penting. Hal ini berkaitan dengan keinginan rakyat Indonesia untuk berdiri sendiri sangat besar.

Setelah jelas bahwa Petisi Soetardjo ditolak, yaitu secara resmi pada tanggal 16 November 1938 Pemerintah Belanda di Nederland memberikan jawaban keputusannya. Padahal keadaan pada masa itu, sudah mulai tampak adanya tanda-tanda akan terjadinya perang besar antara pihak sekutu dengan fasis (Nazi). Apabila situasi internasional yang dalam keadaan gawat itu, benar-benar diperhatikan oleh pihak Pemerintah Kolonial Belanda, seharusnya pihak pemerintah dapat mengikut sertakan kekuatan massa rakyat Indonesia. Namun kenyataannya tidak demikian, bahkan mengeluarkan jawaban yang menyakitkan hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

pemerintah Belanda tidak mau melepaskan diri dari kebijaksanaan kolonial yang telah dianut beberapa puluh tahun sebelumnya. Di samping itu pihak pemerintah juga tidak ada niat untuk memberikan pendidikan militer kepada rakyat Indonesia. Mereka beranggapan bahwa pihak sekutu akan mampu menghadapi kekuatan fasis (Nazi) dalam peperangan yang akan timbul. Dengan anggapan yang demikian itu, maka pemerintah Kolonial Belanda tidak perlu mengikutsertakan kekuatan massa rakyat Indonesia dan hanya kekuatan pasukan gabungan A-B-C-D (Amerika, British, Cina, Dutch) dan A-B-D-A-COM. (Comando Pasukan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia). Padahal pasukan gabungan tersebut belum pernah teruji kemampuannya, dan juga belum diatur dalam bentuk komando tunggal. Hal ini terbukti, Belanda sendiri tidak membangun kekuatan dengan persenjataan modern. Perlengkapan dan sistem perang Belanda sudah sangat ketinggalan, bila dibandingkan dengan perlengkapan perang fasis (Nazi). Dengan demikian tampak pemerintah Kolonial Belanda, mempunyai keyakinan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) tetap terlindung dengan pertahanan pasukan Amerika, Inggris, dan Cina di Asia. Namun kenyataannya dugaan pemerintah kolonial Belanda tersebut meleset sama sekali. Karena pertahanan pasukan Amerika, Inggris, Cina dan Perancis, ternyata tidak mampu menahan serangan pasukan Jepang yang dilancarkan secara cepat di Asia Tenggara.

Hal tersebut sebenarnya telah diperkirakan oleh kaum pergerakan nasional, jauh sebelum Jepang memulai **Perang Dai Toa (Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya)** pada tanggal 8 Desember 1941. Perkiraan kaum pergerakan nasional itu dihubungkan **Ramalan Jayabaya**, yaitu seorang pujangga terkenal di Kediri yang sangat dipercaya di kalangan masyarakat Jawa. Ramalan itu berbunyi antara lain sebagai berikut : "**bahwa nanti akan ada perubahan perubahan pemerintahan dari bangsa kulit putih ke bangsa kulit kuning berbadan cebol yang lamanya hanya seumur jagung**" (Hardi 1988 : 171).

Pada mulanya yang dimaksudkan bangsa berkulit kuning itu adalah Cina, karena memang Cina pernah menjadi bangsa yang kuat pada masa dinasti Mongol. Tetapi setelah dihubungkan bangsa yang memiliki badan cebol, akhirnya menjadi suatu tanda tanya. Di samping itu, bangsa Jepang memang tidak diperhitungkan sama sekali. Sedangkan

bangsa Cina tidak termasuk badan cebol dan dalam negeri Cina pada tahun 1931 sampai tahun 1936 sedang terjadi **Perang Saudara**, yaitu perselisihan Cina Nasionalis dengan Cina Komunis. Namun begitu Jepang ada tanda-tanda akan menyerang Tiongkok, maka terjadilah perdamaian Cina Nasionalis dan Cina Komunis di daerah Sian. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1936, dan terkenal dengan **Sian-Incident**, yaitu bersatunya kembali Cina Nasionalis dan Cina Komunis untuk menghadapi Jepang. Oleh karena itu, walaupun Jepang tetap menyerang secara cepat ke Tiongkok, namun Jepang tidak berhasil mengalahkan Tiongkok. Dan ini suatu kerugian besar Jepang, baik dari segi waktu maupun bahan-bahan perlengkapan perang Jepang.

Keadaan seperti tersebut di atas juga diketahui oleh kaum pergerakan nasional. Namun kaum pergerakan nasional pada saat itu, tidak berpikir lagi masuknya bangsa lain ke Indonesia. Pikiran mereka hanyalah berjuang untuk mendapatkan hak yang sama dengan bangsa lain di dunia, sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, dengan ditolaknya Petisi Soetardjo oleh pemerintah Belanda, kaum pergerakan nasional tidak putus asa. Walaupun langkah pergerakan mereka menempuh jalan "**kooperasi**", hal itu bukan berarti menyetujui apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Cara itu hanyalah suatu taktik dalam suatu perjuangan. Karena perjuangan melalui **non-kooperasi**", pada saat itu memang tidak mungkin. Hal ini telah terbukti, yaitu telah banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional yang bergerak secara non-kooperasi ditangkap dan dibuang atau dipenjara.

Untuk tidak mengulang peristiwa yang menyedihkan, maka kaum pergerakan nasional menempuh cara "**kooperasi**" dan mengadakan penggabungan pergerakan partai politik, dengan diberi nama "**Gabungan Politik Indonesia**" (Gapi). Inisiatif pembentukan Gapi ini adalah Moh. Husni Thamrin dalam suatu rapat Parindra yang berlangsung di Solo pada bulan Maret 1939. Alasan pembentukan Gapi adalah sebagai berikut :

- a. ditolaknya petisi Soetardjo;
- b. semakin gawatnya situasi internasional;
- c. sikap pemerintah Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia.

Hal-hal tersebut di atas mendorong rakyat Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan berdirinya suatu negara dengan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, dalam konferensi Gapi yang pertama kali pada tanggal 4 Juli 1939 di Jakarta, berhasil merumuskan tuntutanannya, yaitu "**Indonesia Berparlemen**". Waktu itu, belum menuntut untuk kemerdekaan penuh, akan tetapi suatu "**parlemen penuh**" yang didasarkan atas sendi-sendi demokrasi (Ariwiadi 1979 : 91).

Gapi terdiri dari partai-partai, yaitu Parindra, PSII, Pasundan, Persatuan Minahasa dan Partai Katholik. Walaupun sebenarnya ada beberapa kaum pergerakan nasional, kurang mendukung dengan tuntutan Gapi tersebut, tetapi hal itu bukan berarti kaum pergerakan nasional yang kurang mendukung tidak menginginkan pemerintahan sendiri. Mereka itu adalah para anggota Volksraad yang tergabung dalam **Fraksi Nasional**. Di dalam Fraksi Nasional itu terjadi perbedaan pandangan antara Moh. Husni Thamrin dengan Moh. Yamin. Akhirnya Yamin bersama-sama Soangkupon, Abdul Rasyid dan Tajudin Noor, ke luar dari Fraksi Nasional. Kemudian pada 10 Juli 1939 mendirikan organisasi baru bernama "**Golongan Nasional Indonesia**" (GNI). Organisasi yang baru ini di dalam Volksraad tidak mewakili partai-partai, akan tetapi mewakili masyarakat Indonesia. Tujuan GNI adalah membantu usaha masyarakat untuk menuju Indonesia Merdeka dan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada antara pulau Jawa dengan daerah-daerah lain di luar Jawa.

Walaupun tampak ada perbedaan pandangan antara Gapi dengan GNI, namun kedua-duanya tetap bergerak secara "kooperasi" dan bertujuan untuk mencapai pemerintahan sendiri. Hal ini dapat diketahui dari hasil Kongres Rakyat Indonesia pada bulan Desember 1939. Kongres ini dihadiri oleh berbagai golongan politik dan juga bukan golongan politik. Sedangkan penyelenggaranya adalah Gapi dengan tujuan untuk mempopulerkan tuntutan "**Indonesia Berparlemen**". Secara rinci hasil-hail dalam kongres tersebut adalah :

- a. menetapkan Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap;
- b. bendera persatuan Indonesia "**Merah Putih**";
- c. lagu persatuan Indonesia adalah "**Lagu Indonesia Raya**";
- d. bahasa persatuan adalah "**Bahasa Indonesia**" (Soeara Parindra 1940 : 79).

Ternyata tuntutan "Indonesia Berparlemen" tersebut mendapat tanggapan Pemerintah Belanda di Nederland, partai-partai besar di Nederland dan Menteri Jajahan Belanda. Kemudian pihak pemerintah menanggapi dan memberikan jawaban sebagai berikut :

"tidak dapat memenuhi keinginan rakyat Indonesia akan Indonesia Berparlemen, karena rakyat Indonesia umumnya tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup dan perkumpulan-perkumpulan politik hanya mewakili sebagian kecil dari rakyat Indonesia".

Dengan jawaban tersebut, kaum pergerakan nasional tetap terus mendesak dan mencari rumusan lain untuk diajukan kepada pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa kaum pergerakan nasional tampak ingin menunjukkan usahanya dalam mempertahankan Indonesia, agar tidak jatuh ke tangan fasisme atau Nazi Jerman, karena keadaan internasional semakin memanas, yaitu pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia, kemudian pada tanggal 10 Mei 1940 Jerman menyerbu Negeri Belanda, sehingga pemerintah memaklumkan keadaan darurat perang. Hal yang demikian diketahui oleh kaum pergerakan nasional. Oleh karena itu Gapi mengajukan tuntutan baru, yaitu pada bulan Agustus 1940 yang bunyinya sebagai berikut :

"meminta pemerintah Belanda mempergunakan hukum tata negara dalam masa genting untuk melangsungkan perubahan-perubahan ketatanegaraan dan diadakan parlemen penuh menggantikan Volksraad yang ada" (Ariwiadi 1979 : 93).

Tuntutan atau resolusi yang baru ini, ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu Wiwoho cs, Sutardjo cs, dan Thamrin cs. Dengan demikian pada saat pemerintah dalam suasana yang sulit dan kedudukan pemerintahan berada di London, maka pihak kaum pergerakan nasional makin mampu menarik perhatian rakyat Indonesia menuntut haknya. Baik tuntutan Indonesia Berparlemen maupun perubahan-perubahan ketatanegaraan tersebut, sebenarnya sudah dapat diperhitungkan oleh kaum pergerakan nasional, sudah pasti tidak akan disetujui oleh pemerintah Belanda. Karena memang sejak awal adanya tuntutan ke arah berdirinya pemerintahan sendiri, selalu ditanggapi secara menyakitkan dan menganggap belum adanya kemampuan rakyat Indonesia menjalankan pemerintahan sendiri.

Dugaan tersebut ternyata benar, yaitu dengan tanggapan yang

diberikan oleh Dr. H.J. Levelt tanggal 23 Agustus 1940 yang mengatakan sebagai berikut : "bahwa belum waktunya mengadakan suatu rancangan perubahan ketatanegaraan Indonesia. namun pemerintah akan membentuk suatu komisi untuk peninjauan dan pengumpulan alasan-alasan yang terdiri dari para cerdik pandai bangsa Belanda" (Soeara Parindra 1940 : 284 - 286).

Tidak lama setelah ada tanggapan Levelt tersebut, pada tanggal 14 September 1940 dibentuk "**Komisi Visman**". Komisi ini diketuai oleh Dr. F.R. Visman dan anggota-anggotanya terdiri dari orang Belanda maupun orang Indonesia. Mereka itu adalah Mr. K.L.J. Enthoven, Dr. Mr. T.S.G. Mulia, Mr. Ir. Ong Swan Yoe, Mr. P. Wijssen dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Maksud komisi tersebut ialah akan mengadakan pembahasan dan analisa keinginan-keinginan Indonesia dari semua tingkat mengenai susunan pemerintahan. Sebenarnya terbentuknya komisi tersebut tidak mendapat sambutan dalam Volksraad maupun kaum pergerakan nasional. Hal ini disebabkan suasana semakin genting dan yang dikehendaki oleh kaum pergerakan nasional adalah bentuk dan susunan parlemen, serta perubahan ketatanegaraan secara cepat dan jelas. Sedangkan terbentuknya Komisi Visman akan melakukan pembahasan dan perdebatan yang makan waktu lama.

Hal tersebut memang benar, karena belum banyak dilakukan oleh Komisi Visman, ternyata disusul dengan adanya pidato Wilhelmina pada tanggal 10 Mei 1941 dan diperjelas lagi dengan pidato Gubernur Jenderal dalam pembukaan sidang Volksraad yang intinya, yaitu mengadakan larangan dan pembatasan tentang rapat-rapat dan konsultasi komite-komite parlemen. Pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 14 Juni 1941 untuk melarang kegiatan politik dan rapat tertutup. Untuk rapat dan berkumpul lebih dari 25 orang dilarang. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan **milisi orang-orang bumi putera (inhemse militie)** pada bulan Juni dan Juli 1941. Walaupun inhemse militie ini tidak mendapat sambutan dari kaum pergerakan nasional, namun oleh R.P. Suroso dimanfaatkan untuk menyatukan antara golongan rakyat Indonesia di luar dan di dalam Volksraad, dalam rangka perjuangan menuju "**Indonesia Merdeka**". Oleh karena itu, perlu dibentuk badan baru yang merupakan tandingan dari Volksraad dan yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia.

Kemudian pembentukan badan baru itu dapat terbentuk pada tanggal 13 - 14 September 1941, yaitu pada saat berlangsungnya Kongres Rakyat Indonesia di Yogyakarta. Badan baru ini diberi nama "**Majelis Rakyat Indonesia**" (MARI), sebagai pengganti Kongres Rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 November 1941 berhasil memilih pimpinan hariannya, yaitu :

- Ketua : Mr. Sartono;
- Penulis : Sukardjo Wirjopranoto;
- Bendahara : Atik Suardi.

Tidak lama terbentuknya badan baru tersebut, pada tanggal 8 Desember 1941 terdengar berita bahwa Jepang telah mengadakan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Kep. Hawaii. Penyerangan ini dinyatakan bahwa Perang Pasifik yang merupakan bagian Perang Dunia II telah meletus. Dalam Perang Dunia II ini pihak Belanda masuk dalam blok sekutu dan Jepang masuk dalam blok fasisme (Nazi). Kemudian pihak rakyat Indonesia pada tanggal 13 Desember 1941 dianjurkan, agar berdiri di belakang pemerintah untuk mempertahankan negara "**Hindia Belanda**" (**Indonesia**). Anjuran ini datang dari pimpinan harian Majelis Rakyat Indonesia, yaitu Mr. Sartono dan Sukardjo Wirjopranoto. Ternyata anjuran ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara kaum pergerakan nasional. Akibatnya PSII pimpinan Abikusno Tjokrosujoso keluar dari MARI dan Gapi. Alasannya adalah bahwa Sartono dan Sukardjo telah bertindak sendiri tanpa sepengetahuan anggota-anggotanya yang lain. Namun demikian perselisihan ini tertutup dengan keberhasilan Jepang dalam mengalahkan kekuatan pasukan-pasukan sekutu yang bertahan di Asia Tenggara. Antara lain adalah Malaka dan Singapura yang dipertahankan oleh Inggris dapat direbut dengan cepat oleh pasukan Jepang. Indo-Cina yang dipertahankan oleh Perancis sudah terlebih dahulu jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Birma, Thailand yang dipertahankan oleh pasukan gabungan sekutu (A-B-C-D), juga dapat direbut oleh Jepang. Adapun Philipina yang dipertahankan oleh pasukan Amerika di bawah pimpinan Jenderal Mac. Arthur hampir secara keseluruhan dapat direbut oleh Jepang. Dan di Philipina ini tinggal Semenanjung Bataan yang masih dapat dipertahankan oleh pasukan Amerika. Dengan demikian dalam suasana yang demikian itu,

untuk Hindia Belanda (Indonesia) tinggal menunggu waktu saja, karena Pemerintah Kolonial Belanda tidak membangun pertahanan dan kekuatan militer yang modern. Oleh karena itu, begitu Jepang masuk ke Indonesia, Belanda tidak dapat berbuat banyak dan hanya dalam waktu satu minggu saja, Jepang dapat menghancurkan pertahanan di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Jepang.

Penyerahan kalah tanpa syarat itu dilakukan oleh pihak Belanda, yaitu Jenderal Ter Poorten menyerah kalah kepada Jepang yang diwakili Jenderal Hitoshi Imamura di lapangan terbang Kalijati dekat Bandung. Dengan demikian sejak penyerahan itulah, terjadi pergantian kekuasaan pemerintahan jajahan dan di Indonesia membuka lembaran baru perjuangan menghadapi pemerintahan Pendudukan Bala Tentara Jepang.

E. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Telah disinggung di bagian depan bahwa pada saat pemerintah kolonial Belanda sedang dalam kondisi sulit, yaitu adanya kesulitan dalam bidang ekonomi (**krisis ekonomi dunia**) dari tahun 1929 - 1933, perhatian pemerintah waktu itu hanya ditujukan untuk mengatasi perekonomian tersebut. Sedangkan perhatian terhadap tuntutan kaum pergerakan nasional sangat diabaikan, bahkan setiap ada pergerakan politik selalu ditekan dengan sangat keras. Korban yang paling besar adalah kaum pergerakan nasional yang bergerak secara **non-kooperasi**, karena banyak kaum pergerakan nasional tersebut yang ditangkap dan dibuang tidak pernah kembali.

Jepang mengerti betul situasi di Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Hal ini terbukti ramalan Jayabaya yang sangat dipercaya di kalangan masyarakat Jawa dihidup-hidupkan. Di samping itu, apa yang selama ini dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan oleh Jepang. Sepertinya Pengibaran Bendera Merah-Putih, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan juga latihan kemiliteran. Bahkan tokoh-tokoh politik yang ditahan selama pemerintahan Hindia Belanda, dikeluarkan. Itulah langkah-langkah awal pada saat Jepang berkuasa di Indonesia. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia yang merasa bebas dari ikatan penjajah Belanda yang hampir 3 1/2 abad lamanya.

Namun dibalik itu semua, ternyata Jepang mempunyai maksud lain. Tidak lama kemudian Jepang menyebarkan "**Barisan Propaganda**" (*Sendhenbu*) yang mengatakan bahwa Jepang harus menyusun dunia ini sebagai satu kekeluargaan yang besar dalam satu atap, di mana Jepang sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu bangsa-bangsa di Asia ini masih dalam satu ikatan kekeluargaan dan Jepang sebagai "**saudara tua**". Sedangkan bangsa-bangsa lain di Asia, sebagai "**saudara muda**". Hal itu kalau dihubungkan dengan ajaran *Shintoisme* tentang "*Hakko-Iciu* (dunia sebagai satu keluarga) memang sangat erat hubungannya. Di dalam politik Hakko-Iciu dapat diartikan bahwa Jepang akan membentuk keluarga besar dalam satu atap dan Jepang sebagai kepala keluarga. Hakku-Iciu ini menurut *Shintoisme* diperintahkan oleh *Jimmu Tenno* (Tenno Pertama k.l. 660 S.M.). Tenno merupakan penjelmaan **Dewa Amaterasu** yang dapat dianggap akan memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar di dunia ini. Bangsa Jepang merupakan keluarga yang sah dan bangsa lain dianggap tidak sah. Oleh karena itu, bangsa Jepang boleh memperlakukan sewenang-wenang dalam rangka menyusun dunia menjadi satu kekeluargaan (Soebantardjo 1954 : 14 - 15).

Dengan berpegang pada politik Hakku-Iciu tersebut, tampak sekali Jepang akan berusaha keras untuk mewujudkan satu keluarga besar. Berbagai usaha Jepang ingin mewujudkan impiannya itu. Sampai pertengahan abad XIX misi pembentukan keluarga besar itu belum dapat dibuktikan. Akhirnya Jepang mengadakan "*Meizi-Restorasi*" pada tanggal 14 Desember 1867. Dalam Meizi-Restorasi ini, terjadi perselisihan yang dapat mengkhawatirkan perpecahan di Jepang. Banyak negara-negara Barat ingin ikut campur, akan tetapi ditolak, baik oleh *Shogun* maupun *Tenno*. Dalam penolakan tersebut ditegaskan, bahwa di Jepang tidak akan terjadi perang saudara. Dan ini memang benar, karena pada tanggal 14 Desember 1867 terjadi perubahan pemerintahan dari pemerintahan "*Bakufu*" (dipegang *Shogun*) ke *Tenno* (dipegang *Gunbatsu*). Sejak itulah mulai mempercepat jatuhnya *Shogun Tokugawa* dan naiklah *Mutsuhito* yang juga disebut sebagai *Meizi Tenno*.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Meizi Tenno adalah

mengadakan **pembaruan besar-besaran secara modern (modernisasi) di Jepang**. Langkah-langkah tersebut meliputi :

1. **pembentukan parlemen** (Tenno menjadi Kepala Negara dan bersifat abadi, karena dianggap keturunan **dewa Amaterasu** atau **dewa Matahari** menurut ajaran Shintoisme). Dalam pemerintahan ini, diciptakan bendera kebangsaan Jepang, bernama "*Hinomaru*" (berbentuk Matahari Terbit). Lagu kebangsaannya "*Kimigayo*" dan "*Shintoisme*" diresmikan sebagai agama negara Jepang, feodalisme dihapuskan;
2. **menggalang persatuan** untuk mencapai kesejahteraan bangsa;
3. **semua jabatan terbuka** untuk semua orang;
4. **adat-istiadat kolot yang tidak relevan untuk modernisasi harus dihapuskan**;
5. **mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya** untuk pembangunan negara.

Jadi dari langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan melalui empat bidang, yaitu bidang **pemerintahan, angkatan perang, industri, dan pendidikan**. Untuk **pemerintahan** diatur secara Barat dengan membentuk kabinet dan parlemen yang dibatasi oleh UUD yang disahkan oleh Tenno. Kemudian **angkatan perang** dibangun secara modern, yaitu angkatan darat mengikuti pola Jerman dan angkatan lautnya mengikuti pola Inggris. Sedangkan **industri** ditempuh dengan kerja keras untuk menambah produksi teh dan sutera, karena dua bahan komoditi ini laku keras di pasaran dunia. Akhirnya Jepang mendapatkan "**devisen di luar negeri cukup banyak**" yang dapat digunakan untuk membeli mesin-mesin modern. Sejak itu modernisasi secara besar-besaran dilakukan dalam segala bidang, antara lain dalam bidang pertanian, industri, termasuk pula persenjataan perangnya. Mesin-mesin diimport sebanyak-banyaknya dan secepatnya, dalam hal ini Jepang juga mendatangkan tenaga ahli dari luar. Baik dari Inggris, Amerika maupun dari Jerman. Dalam waktu singkat Jepang memiliki pabrik-pabrik, dok-dok kapal, pusat listrik, dan industri tekstil dalam jumlah banyak. Akibat banyaknya perusahaan dan industri tekstil, maka di Jepang timbul golongan kapitalis besar yang berpengaruh dalam pemerintahan. Golongan kapitalis atau pengusaha ini disebut

"**Zaibatsu**", yang bersama-sama dengan "**Gunbatsu**" (golongan militer) memegang kekuasaan di Jepang. Akibatnya parlemen tidak berfungsi dan demokrasi di Jepang tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena golongan militer dan kapitalis terlampau kuat. Ini semua menimbulkan saingan berat bagi Inggris dalam pasaran industri di Asia. Di samping itu, karena kuatnya tekanan golongan Gunbatsu, maka industri biasa dapat dirubah menjadi industri perang. Akhirnya Jepang menjelma menjadi negara maju dan bersifat "*fasisme*".

Dalam bidang **pendidikan**, sejak Meiji-Restorasi 1867 Jepang melakukan pendidikan sistem barat, yang bersifat ilmiah dan modern. Wajib belajar setiap anak umur 6 tahun diberlakukan bagi semua penduduk. Sekolah-sekolah didirikan secara cepat dan dalam jumlah cukup besar. Banyak dikirimkan pelajar-pelajar ke luar negeri untuk belajar tentang ilmu pengetahuan dan peradaban barat. Tetapi di dalam negeri telah disiapkan mesin-mesin modern untuk dipergunakan di pabrik-pabrik. Dengan demikian para pelajar yang dikirim ke luar negeri tersebut, setelah selesai studinya kembali ke tanah air, terus ditugaskan bekerja sesuai dengan bidangnya.

Iniilah sebab-sebab timbulnya Jepang ingin mengadakan ekspansi ke luar negeri, karena didorong oleh :

1. kemajuan di Jepang yang pesat, mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk yang pesat pula. Hal ini memerlukan ruang hidup baru (*lebensraum*). Jepang ingin memindahkan warganya ke negara jajahan dan mendirikan pabrik-pabrik di negara jajahan;
2. Jepang ingin bebas, tidak mau diadakan "**restriksi (pembatasan) imigrasi**" yang dilakukan oleh negara-negara lainnya;
3. ingin mencari bahan-bahan mentah untuk menunjang industri dan ingin mencari daerah untuk pasar industri;
4. ingin merealisasi ajaran Shintoisme tentang *Hakko-Ichi* (dunia sebagai satu keluarga besar dan Jepang sebagai kepala keluarga), di samping itu Jepang sebagai negara besar ingin berbuat seperti negara besar lainnya.

Dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan langkah-langkah di Jepang seperti tersebut di atas, maka tidak mengherankan apabila kemampuan militernya sangat kuat. Karena memang pemerintahan di

Jepang dipegang oleh golongan militer (Gunbatsu) yang sifatnya *otoriter*. Hal ini terbukti bahwa separoh dari hasil industri digunakan untuk industri perang. Tentang langkah dan perkembangan yang pesat di Jepang tersebut, rupanya tidak diperhitungkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda tampak tidak khawatir terhadap kemajuan Jepang itu. Pihak Belanda sangat percaya terhadap gabungan kekuatan yang dijalin antara A-B-C-D maupun A-B-D-A-COM (Amerika, British, Dutch, Australia, dalam satu Komando). Itulah sebabnya pemerintah kolonial Belanda tidak membangun kekuatan secara modern, walaupun Jepang telah memiliki pasukan yang dilengkapi dengan persenjataan dan teknik perang modern. Akibatnya seperti telah dijelaskan di bagian depan, bahwa Jepang dengan mudah merebut daerah-daerah jajahan pihak sekutu di Asia Tenggara, termasuk Indonesia jatuh ke tangan Jepang.

Sejak Jepang menguasai Indonesia, **Barisan Propaganda (Sendhenbu)** Jepang tidak henti-hentinya melancarkan aksinya. Dalam propaganda tersebut, sangat mengagung-agungkan kehebatan Jepang terutama dalam kemenangannya terhadap sekutu. Di samping itu, Sendhenbu juga mengatakan bahwa Jepang datang di Indonesia sebagai penyelamat, karena bangsa-bangsa di Asia dianggap sebagai "**saudara muda**"-nya. Dengan perkataan yang memikat itu, maka hampir seluruh rakyat Indonesia percaya kepada Jepang. Perkataan manis itu, juga dibuktikan dengan sikap pemerintah Bala Tentara Jepang yang juga memperbolehkan pengibaran Bendera Merah Putih dan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya bagi bangsa Indonesia. Namun hal seperti itu tidak berjalan lama. Kurang lebih hanya berlangsung satu bulan ternyata pemerintah Bala Tentara Jepang mulai mengadakan berbagai larangan. Walaupun Sendhenbu masih terus berpropaganda, bahwa Jepang berperang untuk kemakmuran bersama di seluruh rakyat Asia Raya, ternyata rakyat sudah mulai mengerti tujuan Jepang yang sebenarnya. Sehingga dukungan rakyat semakin berkurang.

Untuk memancing semangat rakyat di Asia, pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk wadah gerakan pemuda, yang diberi nama "**Gerakan Tiga A**" pada bulan April 1942. Tiga A, yaitu Jepang sebagai **Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia**. Gerakan ini dipimpin Mr. Syamsudin. Di samping wadah tersebut

Jepang juga membentuk organisasi pemuda dengan diberi nama "**Barisan Pemuda Asia Raya**". Akan tetapi kedua wadah tersebut tetap tidak mendapat dukungan rakyat Indonesia.

Memang pada masa awal pemerintahan Bala Tentara Jepang tidak terasa bahwa Jepang akan berbuat kejam. Hal ini diperlihatkan dalam pembebasan tokoh-tokoh nasionalis dari dalam tahanan pada masa penjajahan Belanda. Mereka itu antara lain : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, St. Syahrir, dan lain-lain. Tetapi dibalik itu, kaum pergerakan nasional juga ada yang tetap tidak menyambut baik tentang kedatangan Jepang itu. Hal ini diketahui dengan adanya larangan kegiatan dan pembubaran seluruh organisasi politik oleh pemerintah Bala Tentara Jepang. Padahal organisasi politik itu suatu wadah atau alat untuk berjuang dalam rangka "**Mencapai Indonesia Merdeka**". Oleh karena itu, apa yang dipropagandakan oleh Jepang itu sebenarnya hanya untuk mengelabui rakyat saja. Dengan demikian kaum pergerakan nasional dalam perjuangan melawan penjajah Jepang, menempuh dua cara, yaitu ada yang secara "**legal**" dan "**ilegal**". Legal berarti mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang, sedangkan "ilegal" berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang, akhirnya mereka ini bergerak secara sembunyi-sembunyi atau disebut bergerak **di bawah tanah**.

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian depan bahwa Jepang membentuk dua wadah pemuda. Ternyata pihak pemuda yang tidak percaya kepada perkataan manis dari Jepang itu, kemudian mendirikan organisasi yang diberi nama "**Barisan Banteng**" untuk mempengaruhi pemuda. Barisan ini dipimpin oleh pemuda-pemuda yang bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta. Akan tetapi pihak Jepang dengan cepat membubarkan Barisan Banteng yang belum lama terbentuk itu, karena Jepang tidak setuju arah dan tujuannya.

Berhubung dua wadah gerakan pemuda bentukan Jepang, yaitu Gerakan Tiga A dan Barisan Pemuda Asia Raya tidak mendapat dukungan rakyat, maka dibubarkan. Sebagai penggantinya agar mendapat dukungan rakyat, dibentuk lagi suatu gerakan yang diberi nama "**Poesat Tenaga Rakyat**" (**Poetera**). Poetera ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 dan pimpinannya diserahkan kepada "**Empat Serangkai**", yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansur dan Ki Hadjar Dewantoro. Tujuan yang diharapkan oleh

Jepang adalah agar para pemimpin Poetera mengerahkan segala tenaga dan kekuatan rakyat dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Tetapi oleh para pemimpin atau kaum pergerakan nasional itu diartikan lain, yaitu menggunakan semua sarana Jepang untuk tetap berjuang mencapai kemerdekaan.

Sementara itu Perang Pasifik semakin hari semakin menunjukkan kekuatan pasukan Sekutu memperoleh kemenangan. Sebaliknya pasukan Jepang semakin terdesak. Sejak kekalahan armada Jepang di dekat **Midway** dan di sekitar **Kep. Salomon**, Jepang mulai berada dalam pihak yang defensif. Dalam kondisi ini wilayah Indonesia menjadi front depan, maka bantuan rakyat Indonesia makin diperlukan. Latihan kemeliteran mulai diselenggarakan. **Seinen Dojo** (tempat latihan militer) banyak didirikan, untuk melatih para pemuda. Pada tanggal 29 April 1943 dibentuk beberapa organisasi para-militer, yaitu : **Seinendan** (Barisan Pemuda), **Keibodan** (Barisan Bantu Polisi) dan **Fuzinkai** (Perkumpulan Wanita). Khusus mengenai Fuzinkai adalah merupakan bagian dari **Jawa Hookokai**. Sedangkan pemuda-pemuda dari barisan tersebut dapat latihan militer elementer dengan senjata tiruan terbuat dari kayu. Untuk kaum wanita dalam hal peningkatan pengabdianya membantu perang Asia Timur Raya, maka pemerintah Jepang membentuk "**Barisan Srikandi**" pada tahun 1944 dan pimpinannya dipegang oleh Ny. Mangunpuspito.

Sebenarnya di samping barisan pemuda tersebut, Jepang juga menginginkan kebaktian yang menyeluruh secara *tonarigumi* (sifat gotong royong ditonjolkan secara aktif). Dan badan ini disebut "**Jawa Hookokai**" yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1944. Kemudian semua badan yang ada yang bersifat kebaktian dilebur ke dalam badan yang baru ini. Namun semua bentuk kebaktian tersebut tidak mendapat dukungan pihak pemuda. Akhirnya setelah Poetera bubar dan diganti menjadi Jawa Hookokai, juga mengalami nasib yang sama seperti Poetera, yang akhirnya bubar pula.

Dalam usaha pembubaran segala bentuk badan kebaktian terhadap tercapainya kemenangan perang Asia Timur Raya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh para pemuda yang bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta. Asrama mereka ini diberi nama "**Asrama Angkatan Baru Indonesia**" di bawah pimpinan Chairul Saleh,

Sukarni, dkk, yang mendapat gemblengan oleh Amir Syarifuddin, Ir. Sukarno, Mr. Sunario, Drs. Moh. Hatta, D.N. Aidit, dan lain-lain. Usaha para pemuda ini sangat berani namun selalu selamat, antara lain ialah untuk menghadapi Jawa Hookokai (Pusat Kebaktian Rakyat Jawa), maka para pemuda mendirikan "**Gerindom**" (Gerakan Indonesia Merdeka). Gerindom ini bersikap ilegal yang anti fasis dan anti imperialis.

Usaha untuk membubarkan badan-badan bentukan Jepang itu, dapat berhasil dengan baik adanya kerjasama antara kelompok-kelompok yang bekerja di bawah tanah dengan kelompok-kelompok yang bekerjasama dengan Pemerintah Bala Tentara Jepang. Hal ini dilakukan secara diam-diam termasuk pula pada saat tokoh-tokoh pergerakan nasional mengadakan penggemblengan para pemuda yang bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta. Namun lama-kelamaan pihak Jepang mengetahui bahwa di Gedung Menteng 31 itu digunakan pendidikan politik untuk menentang pemerintah Jepang. Akibatnya asrama Pemuda Menteng 31 dibubarkan. Tetapi tidak lama kemudian, para pemuda mendirikan Asrama Indonesia Muda di bawah pimpinan Wikana, Sudiro (mBah) dan Mohammad Said. Gerakannya agak lebih lunak, namun penuh perhitungan. Oleh karena itu, para pemuda yang termasuk anggota Asrama Indonesia Muda itu tidak dicurigai oleh Jepang.

Perlu dicatat bahwa pada saat Jepang melatih kemiliteran bagi para pemuda, pada saat itu pula Jepang juga membentuk organisasi militer penuh, yang dikenal dengan nama "**Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Peta)**". Peta ini dibentuk pada tanggal 7 September 1943 atas usul dari R. Gatot Mangkuprojo dengan alasan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang tidak saja di belakang garis-perang, tetapi juga di medan-perang (Sartono Kartodirjo 1975 : 14).

Di samping itu, Jepang juga membentuk "**barisan berani mati**" (*Jibakutai*) dan *Heiho* (pembantu prajurit), yang tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu. Walaupun banyak orang-orang Indonesia yang tertarik untuk menjadi Peta dan Heiho, akan tetapi tidak berarti mereka benar-benar ingin membantu Jepang. Dalam hati mereka sebagian besar hanya ingin mendapatkan pendidikan kemiliteran.

untuk bekal perjuangan fisik dalam rangka mencapai Indonesia merdeka. Karena pendidikan semacam ini tidak pernah diberikan pada masa penjajahan Belanda.

Bukti bahwa pendidikan kemiliteran tersebut akhirnya "**senjata makan tuan**", dapat dilihat pada peristiwa pemberontakan Peta di Blitar 14 Februari 1945 yang dipimpin Shodanco Supriyadi. Di samping itu, diberbagai daerah sebelum terjadi pemberontakan Peta di Blitar juga ada perlawanan rakyat terhadap Jepang, yaitu di desa Sukamanah, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 25 Februari 1944 di bawah pimpinan K.H. Zaenal Mustafa. Kemudian di daerah Indramayu pada bulan April 1944 juga meletus perlawanan rakyat terhadap Jepang dan tiga bulan kemudian disusul pergolakan rakyat melawan Jepang di desa Cidempet. Kec. Lohbener, karena rakyat dipaksa menyerahkan hasil padi dan Jepang berbuat sewenang-wenang.

Ternyata perlawanan terhadap Jepang itu tidak hanya terjadi di P. Jawa saja, melainkan juga terjadi di luar P. Jawa. Diantaranya ialah di Aceh pada bulan Nopember 1944 yang dipimpin oleh Teuku Hamid. Kemudian di Sulawesi Selatan di daerah Unra, sehingga terkenal dengan "**Peristiwa Unra**". Perlawanan rakyat ini dipimpin oleh Haji Temmale. Dan perlawanan yang sangat memakan korban besar pada masa pemerintahan Bala Tentara Jepang adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Kalimantan Barat. Walaupun di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, sama-sama terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, tetapi korban yang paling besar terjadi di Kalimantan Barat. Banyak rakyat dari golongan bangsawan (raja-raja), tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan, dan rakyat biasa, yang dibunuh secara kejam di daerah Kalimantan Barat ini, dan oleh masyarakat dimakamkan di pemakaman "**Mandor**". Saat ini di daerah tersebut telah didirikan "**Monumen Mandor**" untuk mengenang peristiwa pembunuhan yang kejam itu dan mengingatkan keberanian rakyat di daerah Kalimantan Barat. (Sagimun 1989 : 248 - 249).

Sementara Jepang mengadakan penumpasan terhadap perlawanan rakyat diberbagai daerah di Indonesia, ternyata di front pertempuran pasukan Jepang mengalami kekalahan hampir di seluruh front pertempuran. Akibatnya kurangnya persediaan senjata dan amunisi, ditambah

lagi dengan timbulnya soal-soal logistik karena banyak kapal-angkut dan kapal-perang yang hilang. Garis pertahanan Jepang di Pasifik terancam, karena pada bulan Juli 1944 Kep. Saipan yang sangat strategis jatuh ke tangan Amerika. Kemudian disusul dipukul mundurnya pasukan Jepang dari Irian Timur, Kep. Salomon dan Marshall oleh pasukan Sekutu, maka sudah dapat dibayangkan kekalahan Jepang.

Dalam situasi dan kondisi seperti tersebut di atas, maka menyebabkan jatuhnya kabinet Jepang yang dipegang oleh **P.M. Tojo** pada tanggal 17 Juli 1944 dan diganti **Jenderal Kuniaki Koiso**. Langkah yang diambil oleh Jend. Koiso adalah mempertahankan pengaruh Jepang terhadap penduduk negeri-negeri yang didudukinya, yaitu dengan cara mengeluarkan pernyataan berupa "**Janji Kemerdekaan Indonesia dikemudian Hari**". Janji ini mempunyai maksud, agar rakyat di daerah pendudukan mengadakan perlawanan terhadap pasukan Sekutu, apabila pasukan Sekutu datang. Hal ini berarti pasukan Jepang tidak usah berhadapan langsung dengan pasukan Sekutu, melainkan mengandalkan kekuatan massa rakyat di negeri-negeri jajahan tersebut.

Janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang itu, ternyata mendapat tanggapan yang kontra dan pro oleh rakyat Indonesia. Inilah titik awal adanya perbedaan pandangan para pejuang bangsa Indonesia. Bagi kaum pergerakan nasional yang dipimpin Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, dan lain-lain, sangat percaya terhadap janji Jepang itu. Tetapi golongan pemuda banyak yang tidak percaya dengan janji itu, dan mereka lebih setuju bahwa kemerdekaan atas usaha dari bangsa Indonesia sendiri tanpa dibantu dari pihak lain. Namun golongan pemuda ini tidak menentang langsung kepada kaum pergerakan Ir. Sukarno, dan kawan-kawannya tersebut, bahkan mereka memanfaatkan Ir. Sukarno dkk. itu untuk tetap berjuang dalam rangka mencapai kemerdekaan.

Tidak lama kemudian, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikikan (Panglima Tentara Jepang) Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan suatu **Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Jumbi Cosakai)**. Sebagai Kaico (Ketua) ditunjuk dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan Fuku Kaico (Ketua Muda) dijabat oleh orang Jepang yakni Syucokan Cirebon.

Juga R. Surowo sebagai *Fuku Kaico* Kedua, R.P. Suroso diangkat sebagai Kepala Sekretariat dan dibantu oleh Tohohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Sedangkan anggotanya (lin) cukup banyak, yaitu 60 orang terdiri dari orang-orang Indonesia, Cina, Arab dan ada satu orang peranakan Belanda. Mayoritas memang orang-orang Indonesia dan Ir. Sukarno sendiri termasuk dalam daftar anggota. (Kan Po 1945 No. 66).

Sidang pertama BPUPKI bertempat di *Gedung Cuo Sangi In* (Gedung Pejambon atau Gedung Pancasila Sekarang), berlangsung dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, yang terkenal dengan rapat mencari **Dasar Negara Indonesia**, apabila nanti merdeka. Usaha mencari dasar negara ini, berkaitan dengan pernyataan janji Jepang yang diucapkan oleh Jenderal Koiso pada tanggal 17 Juli 1944. Walaupun tumbul kontra dan pro, namun bagi kaum pergerakan nasional yang bergerak secara legal sangat percaya dengan janji itu. Akhirnya terjadilah rapat untuk mencari dasar negara tersebut.

Tentang usaha mencari dasar negara, memang suatu hal yang sangat **positif**. Namun kemerdekaan yang akan diperoleh dari pihak Jepang dapat dianggap suatu hal yang **negatif**. Inilah yang tidak dikehendaki oleh golongan pemuda yang progresif-revolusioner yang banyak bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta itu. Oleh karena itu hasil rapat tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 itu, walaupun banyak yang menjadikan bahan pembicaraan secara politis, namun ditinjau dari segi historis memang menghasilkan "**Dasar Negara Indonesia**" setelah bangsa Indonesia merdeka. Hanya pengesahannya saja dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, secara historis 1 Juni 1945 tercatat sebagai "**Hari Lahirnya Pancasila**". Sedangkan secara Yuridis Formal, baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Inilah yang biasa menjadi bahan pembicaraan ramai di kalangan masyarakat. Untuk itu sebaiknya didudukkan permasalahannya dari sejak awal usaha mencari dasar negara itu. Oleh karena itu tentang pernyataan "**Hari Lahirnya Pancasila**", kiranya tidak menjadi masalah, apakah 1 Juni 1945 atau 18 Agustus 1945, kiranya tidak perlu diperdebatkan. yang penting adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui "**Pancasila**" sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terus dipertahankan dan diamalkan.

Adapun rumusan Pancasila, sebelum menjadi rumusan seperti yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau yang sekarang dipakai, telah mengalami perdebatan secara mendalam. Rumusan Pancasila dalam pidato Mr. Muh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dikemukakan sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Peri Kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Ir. Sukarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, atau Peri Kemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial.
5. Ketuhanan.

Kemudian dalam **Dokumen Piagam Jakarta** dari hasil rumusan panitia kecil sebanyak 9 orang anggota BPUPKI, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosuyoso, dalam rapat panitia kecil tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan Pancasila hampir sama dengan rumusan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, hanya ada perubahan pada sila pertama. Kalau dalam rumusan Piagam Jakarta pada sila pertama berbunyi : **ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**

Kemudian rumusan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 berbunyi : Ketuhanan Yang Maha Esa. perubahan tersebut berdasarkan usulan dan keberatan dari beberapa orang anggota PPKI yang hadir pada rapat tanggal 18 Agustus 1945, terutama dari para penganut non-Islam. Hal itu ditujukan demi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian pada sila ke-empat ada tambahan sedikit, yaitu : antara perkataan

permusyawaratan perwakilan (tertulis dalam Piagam Jakarta), di dalam rumusan Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 diberi tambahan **garis miring** (/), sehingga tertulis : **permusyawaratan / perwakilan**.

Demikianlah rumusan Pancasila yang sampai saat ini dipakai adalah Pancasila yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu. Adapun yang mengesahkan Pancasila adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya tidak disebut kata-kata Pancasila namun rumusan sila-sila yang tercantum dalam Pancasila itu, tertulis dalam "**Pembukaan UUD 1945**". Dengan demikian **Pembukaan dan seluruh batang-tubuh UUD 1945** itulah yang disahkan oleh PPKI.

Perlu dicatat bahwa sejak tanggal 7 Agustus 1945, nama badan bentukan Jepang, yaitu "*Dokuritsu Jumbi Cosakai (BPUPKI)*" telah diganti namanya menjadi "*Dokuritsu Jumbi linkai (PPKI)*". Kemudian oleh *Gunseikan (Jenderal Yamamoto)* menjelaskan sambil mengucapkan terima kasih kepada para anggota PPKI, bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI tidak dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Keenam-belas saja, akan tetapi oleh Panglima Perang Tertinggi di Asia Tenggara (*Marsekal Terauci*) juga. Oleh karena itu, *Marsekal Terauci* memanggil tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Ir. Sukarno (Ketua PPKI), Drs. Moh Hatta (Wakil Ketua PPKI) dan dr. Radjiman Wediodiningrat (Mantan Ketua BPUPKI) ke *Dalath* (Vietnam Selatan) untuk mendapat pesan-pesan dan petunjuk dari *Marsekal Terauci*.

Ketiga tokoh nasional tersebut berangkat dari Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1945 dan tiba di *Dalath* tanggal 11 Agustus 1945. Kemudian tanggal 12 Agustus 1945 *Marsekal Terauci* menyampaikan penjelasan kepada ketiga pemimpin tersebut, sebagai berikut : "bahwa Pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia, melainkan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat" (Moh. Hatta 1969 : 18 - 19).

Demikianlah penjelasan Marsekal Terauci kepada ketiga tokoh pergerakan nasional dan untuk penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Setelah jelas penjelasan tersebut pada tanggal 14 Agustus 1945, mereka bertiga berangkat kembali menuju Jakarta. ternyata pada tanggal tersebut Jepang menyerah kalah terhadap Sekutu (dalam hal ini diwakili oleh Amerika). Penyerahan kalah itu dilakukan karena di negara Jepang telah terjadi pemboman, yaitu kota Hiroshima dibom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kemudian disusul kota Nagasaki dibom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya banyak rakyat Jepang yang korban sangat mengerikan. Dengan akibat dari pemboman tersebut, maka diputuskan oleh Kaisar Jepang *Hirohito*, bahwa Jepang menyerah kalah kepada Sekutu.

Pada saat penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu, ketiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Ir., Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediadinigrat, masih dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dengan demikian mereka bertiga tidak mengetahui berita kekalahan Jepang dan penyerahan kepada Sekutu itu. Di samping itu memang ada kesengajaan dari pihak Jepang, memperlambat berita tersebut. Oleh karena itu, menimbulkan kurang percayanya Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta tentang berita yang disampaikan oleh pihak pemuda. Inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia. Pihak Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan para anggota PPKI, masih mengharapkan kemerdekaan atas bantuan Jepang. Sedangkan pihak pemuda mengharapkan kemerdekaan Indonesia atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian tidak minta bantuan dari Jepang lagi, karena Jepang telah kalah terhadap Sekutu. Perbedaan pandangan itu terus berlanjut. Golongan pemuda terus berupaya agar golongan tua mau melepaskan harapan kemerdekaan bantuan Jepang dan diselenggarakan secepat-cepatnya. Jadi langkah yang ditempuh oleh pihak pemuda adalah **"ilegal"**. Sedangkan golongan tua tetap mengharapkan kemerdekaan bantuan Jepang dan menempuh langkah perjuangan secara **"legal"**. Memang dari kedua langkah perjuangan tersebut ada segi-segi positif maupun segi negatifnya. Yang positif dari perjuangan secara legal, yaitu keberhasilan menentukan **"Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945"**. Sedangkan perjuangan secara ilegal, hasil yang positif adalah menentukan sikap terselenggaranya

"proklamasi kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri pada momentum yang sangat tepat".

Oleh karena itu, perjuangan legal dan ilegal itu saling isi mengisi dan hasilnya dapat dinikmati bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun yang termasuk golongan tua pada masa itu, antara lain ialah: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, St. Syahrir, Mr. Subardjo, Mr. Maramis, dr. Latuharhary, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk golongan muda adalah : Sukarni, Chairul Saleh, Adam Malik, B.M. Diah, Wikana, Darwis, Yusuf Kunto, dan lain-lain. Mereka inilah yang pada saat menjelang proklamasi terjadi perbedaan pandangan yang cukup keras.

Penyebab perbedaan pandangan atau pendapat sebenarnya tidak begitu prinsip. Karena hanya masalah kekurangjelasan informasi yang diterima oleh golongan tua, terutama Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta tentang penyerahan dan kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Memang ada unsur kesengajaan oleh pemerintah Bala Tentara Jepang, untuk menyembunyikan berita kekalahan dan penyerahan itu. Berita-beritanya telah tersebar ke seluruh pelosok dunia, namun untuk daerah-daerah pendudukan Jepang termasuk Indonesia masih dirahasiakan. *Radio Domei* (Jawatan/Kantor Penerangan Jepang), menutup pemberitaan tersebut kepada masyarakat umum. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti tentang keadaan pasukan perang Jepang yang sebenarnya. Tetapi para pemuda Indonesia yang bekerja di Kantor Berita tersebut, mengetahui secara jelas tentang kekalahan dan penyerahan Jepang kepada Sekutu itu. Oleh karena itu, wajar apabila Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh pihak pemuda tersebut. Hal ini disebabkan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta belum lama diberi penjelasan dari Marsekal Terauci untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia, tanpa menyebutkan keadaan perang yang sebenarnya. Di samping itu mereka juga sedang dalam perjalanan pulang ke tanah air dari Dalath ke Jakarta. Akan tetapi yang sulit untuk dipengaruhi adalah kepercayaan mereka terhadap janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, golongan pemuda berusaha menggagalkan rapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh PPKI.

Karena rapat tersebut dikhawatirkan akan digunakan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai pesan atau petunjuk Marsekal Teruaci sejak Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta di Dalath. Cara untuk menggagalkan tersebut, yakni pihak pemuda terlebih dahulu mengadakan rapat tanggal 15 Agustus 1945 di salah satu ruang Lembaga Bakteriologi, Pegangsaan Timur pada pukul 20.00. Di antara yang hadir dalam rapat itu adalah : Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, di samping Wikana dan Armansyah (dari golongan Kaigun, karena Wikana dan Armansyah termasuk pegawai Kaigun). Rapat dipimpin oleh Chairul Saleh berhasil mengambil keputusan, sebagai berikut :

"bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan kerajaan lain. Maka diputuskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang dan sebaliknya mengharapkan diadakannya perundingan dengan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi" (Adam Malik 1970 : 35).

Setelah selesainya rapat di Lembaga Bakteriologi, Pegangsaan Timur itu, pada tanggal 15 Agustus 1945 pk. 24.00 menjelang pagi hari (pk. 04.00 WIB) rapat baru selesai diadakan di Gedung Cikini 71. Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat yang diselenggarakan di Lembaga Bakteriologi, Pegangsaan Timur, karena pemuda-pemuda yang hadir di Gedung Cikini 71 itu juga hadir pada rapat di Lembaga Bakteriologi tersebut. Hanya yang hadir di Gedung Cikini 71 lebih banyak, antara lain yang hadir di Gedung Lembaga Bakteriologi, ditambah Sukarni, Yusuf Kunto, dr. Muwardi (dari Barisan Pelopor), Shodanco Singgih (dari Peta Jakarta), dan lain-lain. Jadi yang hadir dalam rapat tersebut terdiri dari para pemuda yang bermarkas di Gedung Menteng 31, Gedung Cikini 71 dan Mahasiswa Prapatan 10. Adapun rapat dipimpin oleh Sukarni (Pemuda Menteng 31), dengan keputusan sebagai berikut :

"Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta akan diamankan ke luar kota, di mana Peta telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi dinyatakan. Sebab jika mereka berada di Jakarta, mereka akan

dipengaruhi dan ditekan oleh kekuatan Jepang untuk menghalang-halangi berlangsungnya proklamasi kemerdekaan" (Adam Malik 1970 : 38).

Rapat lanjutan diadakan di Gedung Cikini 71 tersebut, sebenarnya akibat ditolaknya utusan pemuda untuk membujuk Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, agar mereka mau menyatakan proklamasi sesuai hasil rapat di Gedung Bakteriologi, Pegangsaan Timur. Pihak pemuda menugaskan Wikana dan Darwis, dan kedua utusan pemuda ini diterima oleh Ir. Sukarno dan para anggota PPKI di kediaman Ir. Sukarno. Tetapi setelah terjadi pembicaraan keras dan tidak ada titik temu, akhirnya kedua pemuda tersebut kembali untuk menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Ir. Sukarno kepada para pemuda yang masih berada di Gedung Bakteriologi. Adapun pembicaraan berlangsung k.l. pukul 22.00 - pk. 23.00. Setelah mendengar hasil pertemuan antara Wikana dan Darwis (utusan pemuda) dengan Ir. Sukarno dan para anggota PPKI, tanpa membuahkan hasil, maka rombongan terus menuju ke Gedung Cikini 71, di mana di Gedung ini telah menunggu beberapa pemuda utusan dari berbagai asrama pemuda yang ada di Jakarta. Akhirnya rapat dimulai dan membuahkan hasil keputusan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Setelah selesai rapat di Gedung Cikini 71, dan juga telah diambil keputusan untuk mengamankan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta. Akhirnya pada pagi hari k.l. pk. 04.00 berangkatlah para pemuda menuju ke rumah Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta. dengan mengendarai sebuah mobil, yaitu Chairul Saleh, Sukarni, Yusuf Kunto dan dr. Muwardi, mula-mula menuju ke rumah Danu Asmoro, untuk meminjam sebuah mobil dan Danu Asmoro juga diminta untuk menyopirnya. Kemudian mobil yang satu mengantar dr. Muwardi menuju ke rumah Ir. Sukarno untuk membangunkannya. Sedangkan Sukarni dan Yusuf Kunto terus menuju ke rumah Drs. Moh. Hatta untuk membangunkannya. Ternyata atas bantuan dari penjaga, Sukarni dan Yusuf Kunto berhasil membangunkan Drs. Moh. Hatta, walaupun sebenarnya Drs. Moh. Hatta setengah marah, karena sedang nyenyak tidur. Tetapi setelah mendengar keterangan dari Sukarni, akhirnya Drs. Moh. Hatta bersedia diajak ke luar kota Jakarta. Sedangkan dr. Muwardi yang mendapat tugas membangunkan Ir. Sukarno tampak agak ragu-ragu,

karena keadaan masih terlalu malam (dini hari) dan Ir. Sukarno diperkirakan masih dalam keadaan tidur nyenyak. Oleh karena itu, setelah Chairul Saleh datang bersama Danu Asmoro (supir), maka barulah tugas tersebut dilakukan. Ternyata dugaan dr. Muwardi tersebut benar, bahwa Ir. Sukarno kaget dan marah, karena masih malam-malam dibangunkan. Tetapi setelah dijelaskan oleh Chairul Saleh bahwa keadaan Jakarta sudah mulai genting dan apabila terjadi sesuatu yang membahayakan, maka pemuda dan rakyat tidak berani menanggung keselamatan tokoh nasional itu. Oleh karena itu, Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, diminta secepatnya (waktu itu juga) bersedia diamankan ke luar kota Jakarta.

Akhirnya dengan perasaan was-was dan hati yang dongkol, Ir. Sukarno, Ibu Fatmawati, Guntur (baru berusia 9 bulan), Drs. Moh. Hatta dan beberapa pemuda, dengan dua buah kendaraan berangkat ke luar kota. Sedangkan Chairul Saleh kembali ke Gedung Cikini 71, menerangkan kepada para pemuda bahwa Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sudah berhasil dibawa ke luar kota. Setelah mendengar keterangan dari Chairul Saleh, para pemuda meninggalkan Gedung Cikini 71 terus kembali ke rumah masing-masing.

Sementara itu perjalanan rombongan Sukarni, Yusuf Kunto, Ir. Sukarno, Ibu Fatmawati, Guntur (masih kecil), Drs. Moh. Hatta, yang dikawal sebuah mobil (escorte tentara Peta) dari Daidan Purwakarta yang dipimpin Umar Bachsan. Sedangkan mobil dari Jakarta hasil pinjaman dari Danu Asmoro dikirim kembali ke Jakarta. ada beberapa penumpang dari rombongan tersebut terpaksa dipindahkan dan pakaiannya juga berganti pakaian Peta, untuk menjaga kemungkinan apabila ada pertanyaan dari pihak petugas. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Pergantian pakaian tersebut dilakukan di daerah Cakung, yang merupakan perbatasan antara Daidan Purwakarta dengan Cudan Jakarta. Sebagai penghubung antara Cudan Jakarta dengan Cudan Rengasdengklok adalah Shodanco Singgih dan dr. Sucipto. Oleh karena itu, segala sesuatu untuk pengamanan para rombongan tokoh nasional itu telah diatur secara baik. Bahkan untuk di daerah Cudan Rengasdengklok, sudah dibebaskan terlebih dahulu dari kekuasaan Jepang sebelum para tokoh nasional tersebut sampai di Rengasdengklok. Oleh karena itu, di dalam bukunya Adam

Malik, bahwa Rengasdengklok dinyatakan sebagai "**Republik Pertama**". Karena sebelum terjadi pernyataan "**Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**" pada tanggal 17-8-1945, di Rengasdengklok telah dinyatakan terlebih dahulu "**Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**" pada tanggal itu juga pagi hari k.l. pk. 08.00.

Proklamasi Kemerdekaan di Rengasdengklok itu, dilakukan oleh rakyat Rengasdengklok bersama Peta Rengasdengklok yang tidak lagi tunduk kepada Jepang. Di Rengasdengklok sudah berkibar bendera tunggal, yaitu Sang Saka Merah Putih. Pimpinan Pemerintahan dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri yang bersih dari bangsa lain. Oleh karena itu, dari Rengasdengklok-lah lahirnya "**Republik Indonesia**". (Adam Malik 1970 : 41).

Tetapi di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sampai saat ini tetap mencatat, bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara resmi yang di- **Proklamasikan pada tanggal 17-8-1945 di Gedung Proklamasi Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta** (saat ini disebut Jl. Proklamasi). Hal tersebut bukan tidak menghargai perjuangan rakyat Rengasdengklok, akan tetapi bila ditinjau dari segi historis sejak awal para pejuang yang berada di Jakarta itu memang sudah bersifat nasional. Segala sesuatunya telah terorganisasi secara teratur dan bobot perjuangannya sudah mengarah kepada "*Nation State*" (Negara Kebangsaan). Sedang perjuangan di Rengasdengklok masih tampak bersifat parsial (lokal). Para pelakunya pun di Rengasdengklok juga masih banyak menunjukkan sifat kedaerahan, yang tujuannya masih terbatas kepada daerah Rengasdengklok saja.

Sementara itu, keberadaan tokoh-tokoh nasional di Rengasdengklok, yaitu Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 dari pagi k.l. pk. 06.30 sampai sore hari k.l. pk. 20.00, ternyata tidak terjadi rapat antara golongan muda dengan golongan tua. Rombongan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta tersebut pada mulanya dibawa ke sebuah asrama PETA (Cudan Rengasdengklok). Setelah istirahat sebentar keluarga Ir. Sukarno, yaitu Ibu Fatmawati dan Guntur dibawa ke sebuah rumah milik seorang Cina bernama Djiauw Kie Siong yang tidak jauh dari asrama tersebut. Sedangkan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta masih berada di ruangan Cudanco Soebeno, namun Komandan Peta Rengasdengklok itu sedang tidak berada di tempat, karena sedang

pergi ke luar kota untuk mengontrol wilayah. Di ruang Cudanco Soebeno inilah Sukarni menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya membawa kedua tokoh nasional itu. Yaitu agar kedua tokoh bersedia menyatakan Proklamasi Kemerdekaan atas nama seluruh rakyat, karena keadaan sudah mendesak dan suasana pun sudah memuncak. Juga dijelaskan bahwa Jepang benar-benar sudah kalah dan menyerah kepada Sekutu.

Mendengar penjelasan Sukarni tersebut, ternyata tidak merubah sikap kedua tokoh nasional, yaitu Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta. Kedua-duanya tetap teguh dengan pendiriannya. Dengan pendirian yang tetap teguh itu, maka akhirnya Yusuf Kunto ditugaskan kembali ke Jakarta untuk melaporkan dan merundingkan dengan kelompok-kelompok pemuda yang ada di sana. Sedangkan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta terus dibawa ke rumah seorang Cina yang terlebih dahulu sudah disiapkan. Dengan demikian berkumpullah kedua tokoh nasional itu dengan Ibu Fatmawati beserta Guntur. Mereka beristirahat sehari penuh di rumah seorang Cina tersebut, tanpa ada kegiatan apa pun.

Ternyata Yusuf Kunto yang diutus ke Jakarta tidak berhasil menemui golongan-golongan pemuda, melainkan hanya berhasil bertemu dengan golongan "*Kaigun*", yaitu Mr. Ahmad Subardjo dan Wikana. Setelah kedua golongan Kaigun itu, mendengar cerita tentang keadaan kedua tokoh nasional selama dalam pengamanan di Rengasdengklok, maka kedua golongan Kaigun tersebut terdapat kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta, karena ada jaminan dari Laksamana Maeda apabila pemrosesan Proklamasi dilakukan di rumahnya. Dalam hal ini bukan berarti Laksamana Maeda akan ikut campur dalam pemrosesan Proklamasi, melainkan Maeda hanya sebatas menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Karena Maeda telah mengetahui bahwa untuk penyelenggaraan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah diserahkan kepada Ketua dan Wakil Ketua PPKI, sebagaimana pesan dan petunjuk Marsekal Terauci pada waktu Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta dipanggil datang ke Dalath.

Sejak terjadi kata sepakat itulah, akhirnya Mr. Ahmad Subardjo, Sudiro (mBah) dan Yusuf Kunto, pada hari itu juga berangkat menuju Rengasdengklok. Tiba di Rengasdengklok k.l. pk. 17.30 WIB., kebetulan Cudanco Soebeno telah berada di Cudan Rengasdengklok. dengan

demikian rombongan diterima oleh Komandan PETA Rengasdengklok itu. Tetapi Sukarni sempat menyatakan keberatannya, atas kedatangan Mr. Subardjo dan Sudiro (mBah) itu. Setelah Mr. Subardjo menjelaskan, bahwa kedatangannya bukan atas nama Kaigun, melainkan diutus oleh Wikana yang telah menyiapkan Proklamasi di Jakarta, barulah Sukarni percaya. Namun demikian Cudanco Soebeno masih belum bersedia melepaskan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta beserta rombongannya itu, apabila tidak ada jaminan terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan pada tengah malam hari itu juga. Berhubung sempitnya waktu, maka Mr. Subardjo tidak dapat memenuhi permintaan itu. Akan tetapi pada hari esoknya k.l. pk. 10.00 Proklamasi Kemerdekaan sudah pasti dapat dilakukan. Dan Mr. Subardjo menyatakan jaminannya, apabila sampai tidak terlaksana Proklamasi pada hari esoknya, ia bersedia "**ditembak mati**".

Setelah ada jaminan itulah, maka rombongan tokoh nasional Ir. Sukarno baru dilepaskan untuk kembali ke Jakarta. Berangkat dari Rengasdengklok k.l. pk. 20.30 sampai Jakarta k.l. pk. 23.00. Keadaan di Jakarta sudah berubah, karena Jepang sudah menyerah dan sejak penyerahan itu Jepang ditugasi untuk menjaga "*Status-quo*". Hal ini berarti Jepang harus tunduk kepada Sekutu dan bertanggungjawab menjaga keamanan serta tidak boleh mengadakan perubahan-perubahan apa pun sampai Sekutu datang. Oleh karena itu, rombongan dari Rengasdengklok terus menuju rumah Laksamana Maeda (Jl. Imam Bonjol No. 1 dan sekarang dipergunakan untuk Museum Perumusan Naskah Proklamasi). Sedangkan Ir. Sukarno, Ibu Fatmawati dan putranya (Guntur), serta Drs. Moh. Hatta sempat pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak lama kemudian Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta dapat bertemu dengan Somubu (Mayor Jenderal Nisyumura) untuk menjajagi sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ternyata Somubu tersebut sangat keberatan dan tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Proklamasi itu. Hal ini dilakukan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, sebenarnya juga untuk mendapatkan kepastian tentang penyerahan Jepang terhadap Sekutu. Dengan demikian, setelah mendapat jawaban dari Somubu itu, Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta baru percaya betul bahwa Jepang telah menyerah. Sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk memproses Proklamasi Kemerdekaan.

Sementara itu, di rumah Laksamana Maeda telah dipersiapkan tempat untuk pemrosesan Proklamasi dan juga telah berkumpul orang-orang yang terdiri dari golongan tua maupun golongan muda. Laksamana Maeda dan beberapa orang Jepang juga ada di rumah tersebut. Namun orang-orang Jepang itu tidak ada satu pun yang turut rapat dalam pemrosesan Proklamasi Kemerdekaan. Bahkan Laksamana Maeda naik ke lantai atas sengaja tidak ikut campur. Dengan demikian, pemrosesan Proklamasi Kemerdekaan sejak penyusunan **konsep Teks Naskah Proklamasi** sampai menjadi **Teks Naskah Proklamasi Resmi** (setelah diketik oleh Sayuti Melik dan ditanda tangani Sukarno - Hatta), sama sekali tidak ada pengaruh apa pun dari Jepang.

Adapun penyusunan rumusan teks naskah proklamasi, dilakukan oleh panitia kecil yang terdiri dari : Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo dan turut menyaksikan adalah Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Diah dan Sudiro (mBah). (Nugroho Notosusanto 1971 : 10).

Penulisannya dilakukan oleh Ir. Sukarno, sedang kalimat pertama yang berbunyi : **"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia"**, adalah merupakan kalimat yang dikutip oleh Mr. Ahmad Subardjo dari Piagam Jakarta yang antara lain berbunyi sebagai berikut: **"Atas berkat Rahmat Allah maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya"**.

Kemudian untuk kalimat kedua, sebagai kesempurnaan teks proklamasi yang berbunyi sebagai berikut : **"Hal-hal yang mengenai pemerintahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"**, adalah hasil pemikiran dari Drs. Moh. Hatta.

Tetapi apabila diperhatikan dari konsep asli yang ditulis tangan, tampak ada beberapa perubahan, antara lain :

pada konsep teks naskah yang ditulis tangan :	pada naskah teks yang telah diketik :
- tempoh (memakai h) - Wakil-wakil bangsa Indonesia (belum ada tanda tangan)	- tempo (tidak pakai h) - Atas nama bangsa Indonesia (ditanda tangani Sukarno - Hatta)

Kemudian pada konsep teks naskah yang ditulis tangan terdapat kata-kata yang dicoret, antara lain :

- **penyerahan** menjadi **pemindahan**
- **diusahakan** menjadi **diselenggarakan**

Perubahan inilah yang sering dipermasalahkan oleh pihak Jepang, dan dianggap ada pengaruh dari pihak Jepang. Padahal perubahan itu adalah hasil pertimbangan dan pemikiran dari Ir. Sukarno, agar terhindar dari bentrokan fisik dengan pihak Jepang. Dengan demikian Teks Naskah Resmi Proklamasi Kemerdekaan berbunyi sebagai berikut :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun '05.

Atas nama bangsa Indonesia

Sukarno - Hatta.

Setelah perumusan konsep teks Naskah Proklamasi selesai disusun, kemudian dibacakan di depan para yang hadir yang sebagian besar terdiri dari para anggota PPKI. Mereka itu menunggu "**di serambi depan**" dan juga ada yang "**di ruang makan**". Mula-mula pihak panitia kecil, menawarkan bahwa yang tandatangan diharapkan semua yang hadir. Namun Chairul Saleh langsung menjawab tidak setuju apabila teks itu ditandatangani oleh para anggota PPKI, karena PPKI bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menegaskan dan sebagai jalan ke luar agar tidak berbau Jepang, maka teks Proklamasi ditanda tangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Ternyata usul Sukarni tersebut disetujui oleh semua yang hadir. Dengan demikian selesailah perbedaan pendapat masalah Proklamasi Kemerdekaan antara golongan tua dengan muda. Setelah teks Proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan hasil ketikan itulah yang **dianggap resmi dan otentik**, karena ketikan asli dan telah

ditandatangani oleh Sukarno - Hatta. Namun demikian konsep teks naskah hasil tulisan tangan Ir. Sukarno itu pun juga otentik namun belum resmi, karena belum ditandatangani. Konsep Teks Naskah Proklamasi otentik, tetapi belum resmi inilah yang pernah hilang. Ternyata disimpan oleh B.M. Diah bertahun-tahun dan begitu B.M. Diah sudah mencapai usia lanjut konsep Teks Naskah Proklamasi otentik yang tidak resmi itu, diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Menurut keterangan B.M. Diah diambil dari bak sampah, setelah diketik oleh Sayuti Melik.

Rapat di rumah Laksamana Maeda itu, berlangsung kurang lebih pk. 23.30 (tanggal 16 Agustus 1945) sampai dengan pk. 04.00 (tanggal 17 Agustus 1945). Menurut rencana pembacaan Naskah Teks Proklamasi, akan dilakukan di lapangan IKADA (lapangan Monas sekarang), pada hari itu juga pk. 12.00 (waktu Tokyo) atau pk. 10.30 waktu Jawa jaman Jepang dan pk. 10.00 WIB. Tetapi karena rencana tersebut tampaknya sudah diketahui oleh pihak Jepang, terbukti di lapangan IKADA sudah dijaga ketat oleh tentara Jepang. Akhirnya pembacaan Teks Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dilakukan di rumah Ir. Sukarno Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jl. Proklamasi). Pembacaan dilakukan oleh Ir. Sukarno didampingi oleh Drs. Moh. Hatta dan beberapa tokoh pejuang lainnya.

Dengan demikian berarti berakhirlah pemerintahan jajahan (baik penjajah Belanda maupun penjajah Jepang) untuk selama-lamanya, walaupun bangsa Indonesia masih memperkirakan pihak penjajah Belanda pasti akan kembali ke Indonesia. Hal itu disebabkan bahwa Belanda termasuk blok Sekutu dan pihak Sekutu dalam Perang Dunia II (1939-1945), dinyatakan sebagai pihak yang menang perang. Tetapi bangsa Indonesia telah mengambil **momentum yang tepat**, yaitu sejak kekalahan dan disusul dengan penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, bangsa Indonesia terus cepat bergerak untuk memproses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Jepang berhasil dilawan dan dipulangkan ke negara Jepang. Hal ini dilakukan dengan penuh keberanian dan berlaku di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan atas dasar senasip sepenanggungan untuk menegakkan dan mempertahankan negara merdeka tumbuh secara spontanitas, berjuang tanpa pamrih, rela

berkorban, tanpa menuntut balas jasa dan bersemboyan "**Merdeka atau Mati**" demi negara bangsa (*Nation State*), yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

Hal tersebut di atas adalah suatu kenyataan dan tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu hari bersejarah yang tak ternilai harganya, yaitu "**Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**". Hari tersebut juga merupakan puncak-puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka **berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia kembali**. Hal ini didasarkan dalam kenyataan sejarah, bahwa kemerdekaan tersebut adalah milik bangsa Indonesia sendiri yang pernah direbut oleh penjajah Belanda sejak VOC melakukan penerapan **dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kekuasaan dan kebudayaan** di Indonesia dimulai pada awal abad ke-17. Jadi bangsa Indonesia yang telah memiliki kemerdekaan dan berkuasa penuh sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, begitu memasuki jaman kerajaan Islam (Mataram, Banten, Makasar, Aceh, dan lain-lain), satu-persatu dapat direbut oleh pihak penjajah Belanda. Akhirnya kemerdekaan Indonesia lepas ke tangan penjajah, baru pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia bangkit kembali untuk menegakkan kemerdekaan yang telah tumbang, karena ditumbangkan oleh Belanda. Kemudian setelah bangsa Indonesia berhasil menegakkan kemerdekaan, karena penjajah Belanda telah kalah perang dengan Jepang dan bangsa Indonesia berhasil **merebut kembali kemerdekaannya** dari tangan Jepang, sehingga bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berkuasa di bumi tanah air yang tercinta. Dengan demikian kita harus gunakan istilah "**merebut kembali kemerdekaan**" yang pernah lepas, karena direbut oleh Belanda. Jadi Belanda adalah bangsa yang merampas, bukan bangsa Indonesia yang merampas. Karena bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kembali hak dan kemerdekaannya.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para tokoh pejuang kemerdekaan mulai melengkapi perangkat pemerintahan negara yang telah merdeka itu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama, berhasil menetapkan tiga buah keputusan yang sangat penting, yaitu :

1. mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara;

2. memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta;
3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional. (Muh. Yamin 1969 : 399).

Menurut ketentuan dalam UUD 1945, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Kemudian bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sedang sistem pemerintahannya adalah "Kabinet Presidensiil". Berarti Kepala Negara (Presiden) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan sebagai Mandataris MPR. Kabinet Presidensiil ini dibentuk oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945, PPKI berhasil menetapkan alat-alat perlengkapan negara, antara lain :

Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, menyatakan terbentuknya tiga badan baru tersebut melalui pidato radionya pada tanggal 23 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan pembantu Presiden diresmikan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 29 Agustus 1945.

Adapun tugas-tugas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tidak saja sebagai badan pembantu Presiden, tetapi ditingkatkan menjadi badan yang ikut menentukan garis-garis besar haluan negara dan ikut membuat Undang-Undang. Dengan demikian dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X (baca **Eks** bukan 10) tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya, sebagai berikut : "Sebelum terbentuknya DPR dan MPR yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat bertindak sebagai Parlemen".

Hal itu disebabkan keadaan yang belum memungkinkan pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum, yang akan menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Oleh karena itu, misi dari maklumat tersebut merupakan penyimpangan awal dari UUD 1945. Sebab sistem kabinet yang dihasilkan dari maklumat tersebut adalah sistem **kabinet parlementer**, bukan **kabinet presidensiil** seperti yang dimaksudkan dalam UUD 1945. Hal tersebut bukan tidak disadari oleh para pendiri negara pada waktu itu. Namun karena keadaan yang sangat mendesak,

sedangkan keadaan negara masih dalam rongrongan pihak penjajah Belanda, maka hal itu terpaksa dilakukan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian untuk memperkuat posisi negara yang baru merdeka itu, masih diperlukan pengakuan dari dunia internasional, maka bangsa Indonesia menempuh **perjuangan diplomasi**, di samping juga **perjuangan bersenjata**. Dua cara perjuangan ini ternyata saling mengisi dan berjalan dengan sangat baik. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia menganut **azas demokrasi**, maka kehidupan organisasi kemasyarakatan dan politik yang pada masa pemerintahan Bala Tentara Jepang dilarang dihidupkan kembali. Untuk itu pemerintah mengeluarkan pernyataan politiknya yang pertama **(Manifesto-Politik)** pada tanggal 3 November 1945, untuk memperbolehkan kembali mendirikan **partai politik**. Demikianlah usaha bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan sadar bahwa rongrongan dari luar maupun dari dalam negeri masih cukup berat. Rongrongan dari luar, terutama dari Belanda karena Belanda di pihak Sekutu, merasa menang dalam Perang Dunia II, sudah pasti akan datang ke Indonesia untuk menjajah dan tidak mengakui "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945". Sedangkan rongrongan dari dalam, terutama datang dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan berdirinya **Negara Kesatuan Republik Indonesia**, karena kelompok-kelompok tertentu itu dipengaruhi oleh ideologi politik internasional yang condong **ke kiri (komunis)** dan **ke kanan (DI/TII untuk mendirikan Negara Islam)**.

BAB IV

MASA PERGERAKAN NASIONAL MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

A. Perjuangan Diplomasi

Untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menempuh dua cara, yaitu perjuangan diplomasi dan perjuangan fisik (bersenjata). Kedua-duanya memang saling isi-mengisi, walaupun pada mulanya tampak ada perbedaan pendapat. Namun kesemuanya mempunyai alasan yang cukup kuat dan mendasar. Bagi pihak yang memilih perjuangan diplomasi, mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinia 4 terdapat kata-kata yang berbunyi : **ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan**,
2. Jepang walaupun sudah kalah perang dengan Sekutu, namun masih bersenjata lengkap. Oleh karena itu, berjuang dengan senjata akan menimbulkan korban cukup besar;
3. Belanda yang termasuk di pihak Sekutu, akan mendapat bantuan kekuatan dan dukungan cukup besar oleh kelompok Sekutu, karena Sekutu di pihak yang menang.

Sebaliknya alasan yang dikemukakan oleh para pejuang yang memilih perjuangan fisik (bersenjata), juga tidak kalah bagusnya, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi tenaga-tenaga pejuang yang pernah dipersiapkan latihan kemiliteran, tentu sangat senang mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Hal ini merupakan tanggung jawab mereka terhadap negara dan bangsa, sehingga berani berjuang dengan semboyan "**merdeka atau mati**";
2. Ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka sanggup menjaga dan mempertahankan negara merdeka, apabila ada pihak penjajah (Belanda) ingin kembali ke Indonesia;
3. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah terikat dari berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan, yang selama

penjajah selalu ditekan oleh pihak penjajah, maka telah menunjukkan tekad untuk bangkit melawan secara fisik (bersenjata) demi tegaknya Indonesia merdeka.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, terutama untuk perjuangan secara diplomasi perlu mendapat penjelasan sebagai berikut :

Pada alasan pertama, yaitu **ikut melaksanakan keter-tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan** Dalam hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia mendapat beban atau tugas untuk memelihara perdamaian. Apabila ada persengketaan antara negara dengan negara lain, bagi negara-negara yang menjadi anggota PBB, sedikit banyak harus turut prihatin dan sedapat mungkin dapat membantu penyelesaian melalui meja perundingan. Dengan demikian apabila bangsa Indonesia menghadapi penjajah Belanda melalui perjuangan bersenjata, akan mendapat kecaman dari dunia internasional dan berarti bertentangan dengan isi Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinia 4.

Oleh karena itu, pihak pemerintah pada awal pemerintahannya menempuh perjuangan diplomasi dengan sasaran untuk mendapatkan perhatian dunia internasional, agar memberikan pengakuan terhadap negara Republik Indonesia. Program politik pemerintah yang harus dijalankan oleh Kabinet Syahrir ialah "**Berunding atas dasar kemerdekaan penuh (100%)**". Saat itu pihak Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Indonesia dan didukung oleh Amerika Serikat. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah mencoba menarik perhatian dunia luar dengan cara : **memberikan bantuan beras kepada India** dan juga **menjamin modal asing** (investasi) yang ditanamkan di Indonesia.

Usaha pemerintah Indonesia itu, diimbangi oleh Belanda dengan cara memecah belah wilayah tanah air Indonesia, melalui **Konferensi Malino** tanggal 15 - 25 Juli 1946 yang dipimpin "Letnan Gubernur Jenderal Dr. M.J. van Mook. Tidak lama kemudian Konferensi ini disusul **Konferensi Pangkal Pinang** tgl. 1 - 12 Oktober 1946 dan pihak Belanda berhasil mendirikan "**Negara Boneka**" (**negara kecil-kecil**).

Memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan Belanda itu, maka pemerintah Republik Indonesia protes dan terjadilah **perundingan Linggajati** tanggal 7 Oktober 1946, yang menghasilkan 3 pokok permasalahan, antara lain :

1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan "*de facto*" RI dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa dan Madura;
2. RI dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara RIS dan negara RI merupakan salah satu negara bagian dari RIS;
3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Penandatanganan Perundingan Linggajati itu dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 oleh pemerintah masing-masing. Delegasi Indonesia oleh **St. Syahrir** dan pihak Belanda oleh **Prof. Schmerhorn**. Perundingan ini memang tidak lancar oleh karena itu berkali-kali mengalami penundaan. Setelah dianggap cukup dan menghasilkan keputusan sebanyak 17 pasal, ternyata oleh kedua-belah pihak menafsirkan hal yang berbeda. Akibatnya terjadilah **agresi militer Belanda I** tanggal 21 Juli 1947. Untuk menghadapi agresi tersebut, bangsa Indonesia terpaksa melancarkan perjuangan bersenjata, untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dalam *Clash I* antara pasukan Belanda dengan pasukan RI itu, mendapat perhatian PBB dan dibentuklah "**Komisi Tiga Negara**" yang terdiri dari Australia (pilihan Indonesia), Belgia (pilihan Belanda) dan Amerika Serikat (pilihan Australia dan Belgia). Pada tanggal 27 Oktober 1947 KTN memulai bekerja dan meminta perundingan di atas kapal angkut .milik Amerika Serikat bernama "*Renville*".

Dalam Perundingan Renville yang berlangsung dari tanggal 6 Desember 1947 dan hasilnya ditandatangani tanggal 17 Januari 1948, ternyata makin mempersempit wilayah negara RI. Delegasi RI dipimpin oleh **Mr. Amir Syarifuddin** dan delegasi Belanda dipimpin oleh **R. Abdulkadir Widjoatmodjo** (orang Indonesia berwargakenegaraan Belanda). Isi pokok perundingan ini ada 2 permasalahan, yaitu :

1. Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia-Belanda, sampai waktu terbentuknya RIS;
2. Diberbagai daerah di Jawa, Madura dan Sumatera, diadakan

pemungutan suara untuk mengetahui daerah-daerah itu mau masuk RI atau RIS;

Dalam perundingan ini, KTN bertindak sebagai saksi saja dan akan menyampaikan hasilnya ke PBB. Namun pihak RI tidak menyetujui dan antara rakyat dengan pemerintah (Kabinet Amir Syarifuddin) terjadi perselisihan pendapat, akibatnya Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, karena ditentang rakyat. Pada saat ini pula terjadi pergolakan politik di dalam negeri RI dan terjadilah penggantian Kabinet Amir Syarifuddin diganti Kabinet Hatta. Dalam Kabinet Hatta tersebut tidak menerima Mr. Amir Syarifuddin masuk ke dalam susunan kabinet. Akibatnya Mr. Amir Syarifuddin dkk, membentuk wadah baru bernama **Front Demokrasi Rakyat** (FDR) dan bekerjasama dengan **Persatuan Perjuangan** yang dipimpin **Tan Malaka**.

Sementara itu Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, yaitu menyelesaikan masalah intern terlebih dahulu. Beberapa kali diadakan Konferensi Inter-Indonesia menghadapi usaha Dr. H.J. van Mook dengan negara Boneka-nya. Ternyata hasil Konferensi Inter-Indonesia itu berhasil dengan baik. Walaupun untuk sementara pihak RI menyetujui terbentuknya negara RIS, akan tetapi bukan berarti pemerintah RIS tunduk kepada pemerintah Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam perjuangan diplomasi selanjutnya.

Perjuangan bangsa Indonesia setelah berhasil menyelesaikan intern dalam negeri adalah meneruskan perundingan-perundingan untuk segera menyelesaikan persengketaan dengan Belanda. Ternyata pihak Belanda bersedia mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia setelah mendapat desakan dari berbagai negara yang menjadi anggota PBB. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1949 - 2 September 1949 diadakan **Konferensi Meja Bundar** di kota Den Haag, Negeri Belanda. Pihak Belanda senantiasa mengundur-undur keputusan KMB, karena pihaknya merasa sudah menang dalam perundingan-perundingan sebelumnya. Baru berhasil disepakati hasil keputusan itu oleh kedua belah pihak, yaitu pada tanggal 2 November 1949, dengan menghasilkan k.l. 6 pokok permasalahan yang intinya bahwa pihak Belanda akan melakukan "**penyerahan kedaulatan**" atas Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat dicabut lagi kepada negara RIS. Adapun pelaksanaan penyerahan kedaulatan itu baru akan dilaksanakan kemudian setelah segala sesuatu

telah siap. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah hal tersebut yang dilakukan baik di negeri Belanda atau pun di Indonesia. Yang di negeri Belanda delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, sedang di tanah air Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamangku Buono IX. Dalam berlangsungnya Konferensi tersebut peranan PBB cukup besar dan berfungsi sebagai pengawas. Akhirnya pihak Belanda tidak dapat mengulur-ulur waktu lagi. Dengan berakhirnya KMB itu, berakhir pula persengketaan Indonesia - Belanda. Dan dalam kenyataan juga membuktikan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mendapat pengakuan dari berbagai negara-negara di luar Indonesia. Yang datang pertama kali adalah dari negara yang tergabung dalam "**Liga Arab**", yaitu Mesir, Suriah, Libanon, Saudi Arabia, dan akhirnya juga menyusul Afghanistan, India dan lain-lain. Untuk perkataan "**penyerahan kedaulatan**" itu, oleh pihak Indonesia diartikan sebagai "**pengakuan kedaulatan**" walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut. Namun dalam kenyataan oleh masyarakat internasional mengakuinya.

B. Perjuangan Bersenjata

Telah disebutkan di bagian depan bahwa bangsa Indonesia dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menempuh dua cara, yaitu perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Di bawah ini akan membahas khusus masalah perjuangan bersenjata.

Dalam perjuangan bersenjata, sebenarnya telah dimulai sejak sebulan tercetusnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu ditandai oleh dua peristiwa bersejarah yang terjadi di Jakarta dan di Surabaya. Untuk di Jakarta dan Surabaya tersebut ternyata terjadi dalam waktu bersamaan, yakni pada tanggal 19 September 1945. Di Jakarta pada tanggal tersebut, telah berlangsung **Rapat Raksasa Ikada**, yang merupakan *Show of Force* (pameran kekuatan) rakyat Indonesia, yang intinya diwakili rakyat yang ada di sekitar Jakarta. Dalam rapat tersebut pihak Jepang mengadakan penjagaan ketat kepada orang-orang yang akan menghadiri di lapangan Ikada (sekarang lapangan Monas). Ternyata ada ancaman dari pihak Jepang, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta dipersulit untuk datang ke lapangan Ikada itu. Akhirnya dengan berbagai

usaha Bung Karno dan Bung Hatta dapat menghadiri rapat tersebut, walaupun hanya mengucapkan pidato sangat singkat, yang bersifat membubarkan massa rakyat yang hadir. Rapat hanya memakan waktu kurang lebih lima menit, namun kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Bung Karno - Hatta tetap tinggi. Rapat itu ternyata digerakkan oleh kelompok-kelompok pemuda yang bermarkas di Gedung Menteng 31, Prapatan 10 dan Cikini 71.

Bersamaan dengan Rapat Raksasa Ikada itu, di Surabaya juga terjadi "**Insident Bendera**", yaitu Bendera Belanda "**Merah-Putih-Biru**", birunya dirobek dan tinggal Merah-Putih dikibarkan kembali di atas hotel Yamato atau Hotel Oranye pada masa penjajahan Belanda. Insident Bendera ini menimbulkan bentrokan fisik yang sangat hebat di Surabaya dan menunjukkan tanggung jawab bangsa Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya untuk mempertahankan negara merdeka yang baru satu bulan di-proklamasikan itu. Peristiwa ini ternyata ada kaitannya dengan peristiwa di Jakarta yang terjadi di lapangan Ikada. Hal tersebut diketahui dari tokoh-tokoh Pemuda Menteng 31 yang bergerak di bawah tanah dengan membawa selebaran gelap ke kota Surabaya. Hal ini membuktikan, bahwa kejadian itu berarti sudah ada bentuk kesatuan dan persatuan yang dibina oleh para pemuda, tidak hanya dalam satu wilayah, melainkan sudah jauh ke berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebab peristiwa-peristiwa di daerah-daerah di luar P. Jawa, juga tidak kalah hebatnya, antara lain di Sumatera yang terkenal "**Medan Area**", di Kalimantan yang terkenal "**Peristiwa Mandor**" dan lain-lain.

Seperti telah dijelaskan di bagian depan bahwa antara perjuangan diplomasi dengan perjuangan fisik (bersenjata) saling isi mengisi. Walaupun pada mulanya terjadi perbedaan pendapat di antara kaum pergerakan nasional dengan mengemukakan alasan yang kesemuanya masuk akal. Yang menempuh berjuang secara diplomasi tujuan utamanya adalah menghindari clash fisik dan kecaman dari pihak luar. Karena Indonesia menghendaki ketertiban dan perdamaian dunia serta ingin mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Jadi tidak menginginkan perang dan segala sesuatu dapat diselesaikan di meja perundingan. Sedangkan pihak yang lain, yaitu para pejuang yang menempuh perjuangan fisik menginginkan clash fisik, walaupun Jepang

masih memiliki senjata lengkap maupun Belanda apabila nanti datang. Alasan mereka adalah sebagai tanggung jawab bangsa Indonesia, yang telah berani memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Cara perjuangan diplomasi dilakukan oleh kelompok pemerintah, yang pada waktu itu Perdana Menteriya dijabat oleh St. Syahrir dan didukung oleh Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain. Sedangkan cara perjuangan fisik atas kemauan Tan Malaka sebagai pemimpin organisasi **Persatuan Perjuangan** dan didukung oleh orpol dan ormas yang jumlahnya kurang lebih ada 140-an. Jenderal Sudirman juga ada kecenderungan mendukung cara perjuangan fisik tersebut, yang dalam hal ini dapat dimaklumi mengingat beliau dibesarkan dari PETA. Tetapi kenyataannya kedua-duanya sangat berguna dalam perjuangan untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan fisik pertama sejak Indonesia merdeka, telah dimulai di Surabaya dengan terjadinya "**Insident Bendera**" pada tanggal 19 September 1945. Sedangkan pada waktu yang bersamaan di Jakarta juga terjadi Rapat Raksasa Ikada, yang dapat diartikan sebagai pameran kekuatan (*Show of Force*) rakyat Indonesia. Kalau di Jakarta tidak terus terjadi perang fisik, tetapi di Surabaya terus berlanjut perang fisik, bahkan sampai puncaknya terjadi **ultimatum** dari Inggris disebabkan perlawanan rakyat Surabaya sampai terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby. Batas waktu ultimatum tersebut, yakni tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 yang isinya antara lain sebagai berikut : "Semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang ditentukan, selanjutnya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke atas. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut tidak diindahkan, maka Surabaya akan dibumi hanguskan".

Ternyata rakyat Surabaya tidak gentar, bahkan dijawab dengan perlawanan yang lebih hebat lagi. Walaupun banyak rakyat terbunuh, namun tidak mengendorkan semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Dalam pertempuran ini, patut dicatat atas kepemimpinan Bung Tomo yang dengan tegas komandonya menggunakan semangat Islam, yaitu "**Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar.**"

Dengan komando tersebut memberikan semangat perjuangan rakyat

Surabaya, bahwa **Tuhan Menyertai Kita** dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Memang pihak Sekutu merasa menang dalam Perang Dunia II, yang sejak penyerahan Jepang terhadap Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, mereka (Sekutu) sudah pasti akan kembali untuk berkuasa di negara-negara bekas jajahannya yang telah diduduki oleh Jepang. Tanpa memperhatikan perjuangan rakyat di negara-negara bekas jajahannya itu, mereka datang untuk mengambil kekuasaannya yang telah lepas tersebut. Kedatangan pasukan Sekutu memang agak terlambat, karena bangsa Indonesia terlebih dahulu telah berjuang mengusir dan memulangkan Jepang dari Indonesia. Momentum yang sangat tepat itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, untuk berjuang sampai memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak diakui oleh pihak Sekutu, terutama Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia terus berjuang untuk mempertahankannya.

Pasukan Belanda datang lagi di Indonesia dengan membonceng tentara Inggris. Tetapi dengan diam-diam mengibarkan bendera Belanda diberbagai kota-kota besar di Indonesia. Tentara Inggris yang mulai mendarat pada tanggal 29 September 1945 di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan dan di kota-kota besar lainnya di bawah pimpinan **Letnan Jenderal Christison**, ternyata tidak bertanggung-jawab terhadap "**Berkibarnya Bendera Belanda**" itu. Hal ini menyebabkan kemarahan rakyat Indonesia, akhirnya berani mengadakan perlawanan terhadap pasukan Inggris maupun Belanda. Bangsa Indonesia juga melancarkan perjuangan diplomasi dan banyak negara-negara lain yang mendukung Indonesia. Akibatnya diadakan perjanjian Linggajati sebagaimana yang telah diuraikan di bagian depan. Ternyata masing-masing, yaitu pihak Belanda maupun Indonesia, membuat penafsiran dan kesimpulan dari naskah Linggajati itu, ada perbedaan yang tidak dapat diambil kata sepakat. Hal tersebut memang ada suatu kesengajaan dari pihak Belanda, dengan maksud tidak akan melepaskan daerah-daerah untuk dikuasai bangsa Indonesia. Akhirnya perang fisik terjadi dan diakhiri dengan gencatan senjata. Namun demikian, pihak Belanda makin tidak mematuhi gencatan senjata itu, karena merasa telah kuat disebabkan mendapat dukungan senjata dari Amerika Serikat.

Sebenarnya pada saat gencatan senjata tersebut, Belanda sangat aktif menyusun kekuatan. Oleh karena itu pihak Sekutu ada yang

mendukung, tetapi juga ada yang tidak mendukungnya. Belanda didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Cina Nasionalis. Sedangkan Indonesia didukung oleh Rusia, Suriah dan Kolombia. Adapun India dan Australia mendesak Dewan Keamanan PBB, agar soal Indonesia diperbincangkan dalam persidangan. Sebab pihak Belanda menganggap bahwa soal Indonesia, hanyalah merupakan **soal dalam Negeri**, yaitu antara **Indonesia - Belanda**.

Masalah Indonesia itu, mulai menarik perhatian dunia internasional setelah Belanda tidak mematuhi perjanjian Linggajati dan pada tanggal 21 Juli 1947 mulai melancarkan **Agresi Militer-nya yang Pertama**. Dalam **Agresi Militer I** (sebutan oleh bangsa Indonesia atau juga disebut **Perang Kemerdekaan I**, karena pihak Belanda dianggap pihak yang menyerang (**agresor**) untuk menggagalkan/tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Belanda menyebutnya "**Aksi Polisionil**, yang artinya Belanda datang ke Indonesia bertugas untuk mengatur ketertiban dan keamanan, karena Belanda menganggap bahwa Indonesia masih menjadi miliknya), ada kesengajaan dari Belanda bahwa menyerang Republik Indonesia tidak akan mendapat kecaman dari pihak luar atau dunia internasional. Ternyata hal tersebut di luar dugaan Belanda, karena dengan penyerangan tersebut Belanda mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia. Untuk mengakhiri Agresi Militer I itu, Dewan Keamanan PBB membentuk **Komisi Tiga Negara (KTN)**, yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Dari hasil KTN itu diadakan **Persetujuan Renville** pada tanggal 17 Januari 1948. Namun dalam persetujuan itu, hasilnya sangat merugikan pihak Indonesia. Karena wilayah RI makin dipersempit dan hanya akan merupakan negara bagian dari Negara Indonesia Serikat yang dibentuk itu. Oleh karena itu, mendapat reaksi yang sangat keras dari berbagai golongan bangsa Indonesia.

Di dalam naskah Persetujuan Renville juga dijelaskan, agar RI menarik tentara gerilyanya dari daerah-daerah kantong. Dengan penarikan tersebut, berarti daerah yang strategis bagi pejuang bersenjata RI menjadi kosong dan diserahkan kepada kekuasaan Belanda. Inilah yang banyak mendapat reaksi dari berbagai golongan bangsa Indonesia yang kedua kalinya. Pertama masalah wilayah yang makin sempit dan masuk ke dalam salah satu negara bagian RIS dan yang kedua adalah

hilangnya daerah-daerah kantong yang sangat strategis itu. Oleh karena itu, bagi golongan yang tidak setuju dan karena mempunyai tujuan lain, yaitu tidak menuju ke pembentukan negara nasional (**Republik Indonesia**, yang nanti lebih lengkapnya disebut "**Negara Kesatuan Republik Indonesia**") tidak mau menyerahkan daerah-daerah kantong tersebut. Golongan yang tidak setuju dengan penyerahan tersebut, yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, karena ia akan membawa perjuangan untuk membentuk Negara Islam. S.M. Kartosuwirjo waktu itu memimpin pasukan Hisbullah dan Isabilillah yang kemudian diganti menjadi Gerakan DI/TII yang dengan persenjataan lengkap mempertahankan daerah kantong yang jadi wilayahnya. Inilah sebab-sebab S.M. Kartosuwirjo melakukan pemberontakan habis-habisan, walaupun bangsa Indonesia telah berhasil mengusir penjajah dari tanah air sampai bangsa Indonesia berjuang untuk mengisi kemerdekaan.

Isi naskah Persetujuan Renville memang sangat merugikan bangsa Indonesia, dan akhirnya menyebabkan jatuhnya **Kabinet Amir Syarifuddin** berganti **Kabinet Hatta** (17 Januari 1948 sejak terjadi penandatanganan Persetujuan Renville). Walaupun sebenarnya naskah Persetujuan Renville sendiri juga tidak begitu menguntungkan pihak Belanda, karena dari segi politik Belanda merasa dirugikan. Antara lain masuknya RI yang hanya golongan minoritas menurut Belanda ke dalam Negara Indonesia Serikat, akan merupakan kepentingan hubungan Republik dengan Belanda. Itulah sebabnya Belanda khawatir untuk perkembangan selanjutnya. Karena apabila hal tersebut benar terjadi, maka kekuasaan RI semakin lama semakin luas wilayahnya sampai pada penyerahan Negara Federal yang telah susah payah dibentuk oleh Dr. H.J. Van Mook dengan "**Negara Bonekanya**". Oleh karena itu, Belanda memanfaatkan situasi gencatan senjata untuk bersiap-siap menyerang wilayah-wilayah RI dan merebut pemerintahan RI. Namun dalam masa persiapan untuk memukul RI tersebut, terlebih dahulu di dalam negeri RI sendiri terjadi **gerakan PKI Musso** untuk mengadakan "**Pemberontakan PKI di Madiun**", yang bertujuan menggulingkan pemerintahan RI yang sah, untuk diganti dengan pemerintahan komunis atau mendirikan "**Negara Komunis**".

Perlu dicatat bahwa sejak kegagalan pemberontakan PKI tahun 1926, banyak tokoh-tokoh komunis melarikan diri ke luar negeri antara

lain ke Rusia. Oleh karena itu boleh dikatakan pada saat bangsa Indonesia berjuang untuk Proklamasi Kemerdekaan tidak banyak orang-orang komunis yang ikut berjuang. Di samping itu perjuangan kaum komunis internasional masih menganut "**garis Dimitrov**" yang men-canangkan bahwa "**perjuangan kaum komunis di dunia di dalam menghadapi kekuatan fasisme internasional (Italia, Jerman, dan Jepang), diharuskan bekerjasama dengan kaum kapitalis Barat (Amerika Serikat dan sekutunya)**". (Saleh A. Djamhari dkk. 1986 : 1).

Berdasarkan garis perjuangan itu, maka dapat dimengerti bahwa pada awal kemerdekaan, orang-orang komunis Indonesia bersikap lunak terhadap Belanda. Di samping itu dalam berlangsungnya Perang Dunia II (1939 - 1945) negara-negara komunis internasional masih tergabung dalam blok sekutu. Dengan demikian perjuangan menentang imperialis-kapitalis belum nampak. Perubahan langkah perjuangan komunis internasional ini baru terjadi pada tanggal 22 September 1947, yang pada saat itu **Andrei Zhdanov** berpidato di Warsawa dengan mengemukakan sebagai berikut :

"Kekuatan Komunis harus meninggalkan front populer, karena Perang Dunia II mengakibatkan krisis sistem kolonial yang terlihat pada pergerakan pembebasan nasional dan kemerdekaan dari kolonial. Pengertian **front populer** diganti dengan **garis keras**, yaitu garis yang selama ini membenarkan kerjasama dengan imperialis-kapitalis, harus ditinggalkan dan diganti dengan garis anti imperialis-kapitalis. Dengan demikian ada dua blok di dunia berdasarkan ideologi, yaitu blok imperialis-kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat dan blok anti imperialis-kapitalis yang demokratis yang dipimpin oleh Uni Soviet" (Saleh A. Djamhari dkk. 1986 : 4 dan 37).

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kabinet Amir Syarifuddin, sebenarnya dalam rangka memperjuangkan garis Dimitrov. Karena pada waktu itu Musso belum kembali ke Indonesia. Persetujuan Renville masih menguntungkan Belanda dan menguntungkan pihak komunis. Tetapi menurut **garis Zhdanov** yang telah dibawa oleh Musso ke tanah air, apa yang telah dilakukan Kabinet Amir Syarifuddin itu tidak cocok lagi. Dengan demikian perjuangan PKI menyesuaikan dengan perubahan perjuangan komunis internasional itu, yaitu garis Moskow.

Dengan cepat PKI mengadakan Konferensi pada akhir bulan Agustus 1948, dan dalam konferensi tersebut menerima "**Jalan Baru untuk Republik Indonesia**" yang lebih terkenal dengan sebutan **garis Musso**, yang menempatkan Indonesia pada blok Uni Soviet. Sejak itulah Musso tampil sebagai pemimpin PKI di Indonesia, menentang Kabinet Hatta yang bersikap **politik Bebas Aktif**. Politik Bebas Aktif ini memang ditempuh Kabinet Hatta, karena untuk mempertahankan terus hidupnya negara Republik Indonesia yang tidak mau terikat blok Barat maupun blok Timur.

Langkah Musso selanjutnya adalah meningkatkan perlawanan FDR (Front Demokrasi Rakyat) bentukan Amir Syarifuddin pada tanggal 26 Februari 1948, dan membentuk **Front Persatuan Nasional (FPN)** yang gerakannya menyerupai **Persatuan Perjuangan** pimpinan Tan Malaka. Semuanya itu bergabung dalam satu komando dari PKI. Setelah persiapan telah cukup, maka mulailah suatu gerakan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah RI untuk diganti pemerintahan komunis. Ini semua telah dipertimbangkan, karena Belanda sedang mengadakan persiapan dalam menyelesaikan sengketa dengan Indonesia. Selanjutnya gerakan komunis tersebut lebih dikenal dengan **Pemberontakan PKI Madiun 1948**. Karena pemberontakan ini dilancarkan mulai tanggal 18 September 1948 dan secara cepat dapat ditumpas oleh pemerintah RI tanggal 30 September 1948. Dengan demikian sangat cepat, namun belum sampai berhasil membersihkan orang-orang komunis Indonesia, pihak Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 telah meluncurkan **Agresi Militer II** terhadap Republik Indonesia.

Dalam Agresi Militer II itu pasukan RI belum siap, karena baru mengadakan konsolidasi ke dalam, sehingga untuk sementara belum mengadakan perlawanan terhadap serangan Belanda tersebut. Dalam situasi yang demikian itu, pihak Belanda menyatakan bahwa RI sudah tidak berdaya dan kalah. Tetapi ternyata dengan gerakan pasukan gerilya, pasukan Belanda diserang dengan tiba-tiba dan hanya **dalam waktu 6 jam** telah membuktikan bahwa RI masih ada. Inilah yang terkenal **Serangan Umum 1 Maret di Yogya** di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, untuk menjawab dalam forum internasional terhadap Belanda yang menganggap RI sudah tidak ada atau menyerah.

Dan dalam perdebatan di forum internasional RI mendapat dukungan dari berbagai negara, sehingga dalam KMB pihak Belanda diharuskan menyerahkan kedaulatan kepada RI. Perlu dicatat juga bahwa pada saat Belanda menduduki ibukota RI di Yogyakarta, maka pemerintahan RI secara darurat pindah ke Sumatra bernama **Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)** yang dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara.

C. Pengakuan Kedaulatan

Akibat perdebatan dalam KMB, yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 September 1949 di kota Den Haag, Negeri Belanda, ternyata menghasilkan persetujuan yang intinya pihak Belanda harus "**menyerahkan kedaulatan**" kepada pemerintah RI. Namun persetujuan tersebut baru ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 November 1949. Di dalam perundingan itu delegasi Indonesia dipimpin oleh **Drs. Moh. Hatta**, delegasi BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg* - terdiri dari negara-negara di luar RI) dipimpin oleh **Sultan Hamid II**, dan delegasi pemerintah Belanda dipimpin **Van Maarseveen**, dalam pengawasan Komisi PBB.

Dengan persetujuan tersebut, berarti berakhirlah persengketaan Indonesia - Belanda, namun masih ada satu masalah yaitu mengenai Irian Barat yang untuk sementara (paling lama satu tahun) masih belum diserahkan kepada RI. Oleh karena itu, ini masih menjadi beban di masa yang akan datang dan ternyata sampai tahun 1962 Irian Barat baru dipersengketaan lagi, yang akhirnya diserahkan oleh Belanda kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk penyebutan **penyerahan kedaulatan** sebenarnya mengandung pengertian politis, karena masih ada unsur penugasan kepada RI oleh pihak Belanda dan kalau itu tetap diterima, maka RI harus melaporkan tugas-tugas tersebut kepada pemerintah Belanda. Tetapi oleh pihak RI masalah tersebut sementara dapat diterima, dengan tujuan segera menyelesaikan masalah persengketaan antara Indonesia - Belanda. Di samping itu dalam persetujuan KMB, juga berarti terbentuknya negara RIS, yang berarti pula menyimpang dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945. Karena dalam Proklamasi maupun UUD 1945, negara Indonesia berbentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**, bukan negara Serikat atau negara Federal.

Kemudian atas dasar konstitusi RIS, membuka kesempatan untuk membentuk "**Negara Kesatuan**" yang menurut keinginan rakyat Indonesia. Kemudian diadakan susunan ketatanegaraan, yang mengakibatkan gugurnya negara-negara bagian satu-persatu dan beralih menjadi satu kesatuan dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kehendak rakyat Indonesia, dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk membentuk satu negara atas dasar senasib dan sepenanggungan hidup dalam cengkeraman penjajah. Akhirnya terjadilah persetujuan dalam persidangan antara RI dan RIS pada tanggal 19 Mei 1950, untuk membentuk "**Negara Kesatuan Republik Indonesia**". Sejak itu pula mulailah berdatangan pengakuan terhadap negara Republik Indonesia dari berbagai negara di dunia. Walaupun oleh Belanda sendiri, tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan yang diakui adalah tanggal 27 Desember 1949, namun oleh bangsa Indonesia keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Memang pada saat itu bangsa Indonesia tidak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang, karena Belanda sudah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Oleh karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri.

Dengan demikian perkataan **penyerahan kedaulatan** yang tercantum dalam naskah persetujuan KMB itu tidak tepat dan oleh bangsa Indonesia diartikan sebagai **pengakuan kedaulatan** terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Telah dijelaskan di bagian depan bahwa Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 mengarah dan mencantumkan tentang bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam naskah persetujuan KMB ternyata mengarah kepada terbentuknya negara RIS, maka dalam hal ini berarti penyimpangan dengan kehendak rakyat dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Oleh karena itu perlu diluruskan kembali agar kehidupan rakyat dalam berbangsa dan bernegara terjalin rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang perlu terus menerus dipertahankan, agar **Negara Kesatuan Republik Indonesia** dapat terus hidup dan berkembang

untuk selama-lamanya. Kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan nasional bila kita selalu menengok di masa lampau, yaitu masa kejayaan Sriwijaya sebagai negara besar yang mampu bertahan kurang lebih selama 7 abad. Kemudian kerajaan Majapahit mampu bertahan kurang lebih 3 abad. Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini baru berusia sampai saat ini (1997) kurang lebih 1/2 (setengah) abad. Dengan demikian kita wajib mempertahankannya sampai kapanpun, yaitu dengan cara menggalang persatuan dan kesatuan, seperti semboyan yang pernah dipakai oleh raja-raja Majapahit, yaitu **"Bhineka Tunggal Ika"** yang dicetuskan **Empu Tantular**. Dan sekarang dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap menggunakan semboyan tersebut ternyata berhasil dengan baik. Karena disadari oleh bangsa Indonesia bahwa di kalangan masyarakat Indonesia terdapat berbagai ragam perbedaan, antara lain tentang suku bangsa, adat-istiadat, agama, dan lain sebagainya, maka dengan berpegang kepada semboyan tersebut akan dapat terus terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Inilah kesadaran yang perlu terus-menerus dipupuk dan dibina sampai kapanpun.

Oleh karena itu, pada saat negara Indonesia berbentuk RIS banyak rakyat Indonesia yang tidak setuju. Dan dalam hal ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan tokoh-tokoh masyarakat, antara lain Drs. Moh. Hatta dengan berbagai tokoh lainnya, yaitu Mr. Supomo dan Mr. Sunario. Pihak Drs. Moh. Hatta yang pada saat itu disebut **Kabinet Hatta**, sangat mempertahankan pendapat Hatta yang menginginkan bentuk negara tetap **"Negara Serikat"**. Hal itu dapat dimaklumi, karena Drs. Moh. Hatta-lah yang menjadi pimpinan delegasi Indonesia dalam KMB. Namun pihak Mr. Supomo dan Mr. Sunario, tidak menyetujui bentuk negara **Serikat** itu. Dengan alasan bahwa bentuk negara Serikat berbeda dengan isi dari Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945. Di samping itu, hal tersebut sangat rawan, karena di Indonesia terdapat berbagai perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Mr. Supomo dan Mr. Sunario lebih menekankan kepada bentuk negara **Kesatuan** yang akan menjamin berlangsungnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ternyata pendapat Mr. Supomo dan Mr. Sunario mendapat dukungan rakyat banyak, akhirnya negara Republik Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam Konstitusi RIS tahun

1950, yang membuka kesempatan terbentuknya negara yang dimaksud. Namun demikian, dengan dihapuskannya RIS mengakibatkan **Kabinet Hatta jatuh**. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 bertepatan dengan pidato kenegaraan oleh Bung Karno, dinyatakan bahwa pemerintahan dan sistem mekanisme kerja **kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Walaupun pada Konstitusi RIS tersebut belum cocok dengan isi UUD 1945, antara lain mengenai tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan masih dipegang oleh parlemen (**Kabinet Parlementer**), sedangkan dalam UUD 1945 seharusnya sepenuhnya dipegang oleh presiden (**Kabinet Presidensiil**). Dengan demikian secara berangsur-angsur akan diluruskan. Tetapi untuk kedaulatan tetap di tangan rakyat. Inilah yang perlu dipegang dalam pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adam Malik, **"Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945"**, Wijaya, Jakarta, 1970.
- Ahmad Subardjo, Mr., **"Lahirnya Republik Indonesia"**, Jakarta, 1972.
- - - - , **"Peranan Ide-ide dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia"**, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- Ali Sastroamidjojo, **"Tonggak-tonggak di Perjalananku"**, Pt. Kinta, Jakarta, 1974.
- Alfian, Ibrahim, T., Dr., MA., dkk., **"Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945 - 1949)"**, Dep. P dan K., Proyek Pengembangan Permuseuman, DI. Aceh, 1982.
- Ariwiadi, Drs., **"Ichtisar Sejarah Nasional Indonesia"** (awal-sekarang), Dep. Hankam, Pusjarah ABRI, 1971.
- Armin Pane, **"Habis Gelap Terbitlah Terang"**, (terjemahan), Balai Pustaka, Jakarta 1968.
- Hadisutjipto, S.Z., **"Gedung STOVIA sebagai Cagar Sejarah"**, DMS. DKI, Jakarta 1977
- Hatta, Moh., **"Sekitar Proklamasi"**, Tinta Mas, Jakarta, 1970.
- Hardi, **"Menarik Pelajaran dari Sejarah"**, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988.
- Kahin, George Mc. Turnan, **"Nationalism and Revolution in Indonesia"**, Indiana N.Y., Cornel University Press, 1852.
- Koch, DMG., **"Om de Vrijheit", de Nationalistische Beweging in Indonesia**, (terjemahan) Abd. Moeis **"Menuju Kemerdekaan"**, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1951.
- Kohn, Hans, **"Nasionalisme Its meaning and History"**, (terjemahan) Sumantri Martodipuro. Pustaka Sarjana, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Kowani, **"Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia"**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1978.

- Nilakusuma, S., **"Wanita di dalam dan di luar Rumah Tangga"**, Nusantara, Bukit Tinggi, Jakarta, 1955.
- Renan, Ernest, **"Qu'est ce qu'une Nation"**, (terjemahan) dengan kata pengantar Prof Mr. Sunario, Yayasan Dharma, Jakarta, 1963.
- Ruben Nalenan. **"Sejarah Indonesia"**, Upik dan Buyung, Jakarta, 1981.
- Saleh A. Djamhari, dkk., **"Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966"**, Depdikbud, 1986.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., **"Sejarah Nasional Indonesia"**, Jilid VI, Depdikbud, 1975.
- Soebantardjo, **"Sari Sejarah"**, Jilid I, Asia-Australia, Yogyakarta, 1954.
- Soemandari Soeroto, Siti, **"Kartini Sebuah Biografi"**, Gunung Agung, 1977.
- Sudiyo, Drs., **"Perhimpunan Indonesia sampai dengan Sumpah Pemuda"**, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
- Susanto Tirtoprodjo, Drs., **"Sejarah Revolusi Nasional Indonesia"**, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1962.
- Yamin, Moh., Prof., Mr., **"Naskah Persiapan UUD 1945"**, 1971.
- - - - , **"Persatuan dan Kebangsaan Indonesia"**, Weltevreden, 1938.
- Wall, Van der, **"De Volksraad en Staatkundige Ontwikkeling van Nederlands, (1942 - 1943)"**, Groningen, Wolters's, 1969.
- Dari Surat Kabar / Majalah :**
- Asia Raya, 24 Mei 1945 (2605).
- Kan Po No. 67, 25 Januari 1945 (2605).
- Soeara Parindra, 1940 - 1941.

